

Sur  
p c l

**PENGARUH ANGKATAN KERJA, INVESTASI  
SWASTA, INVESTASI PEMERINTAH DAERAH,  
SARANA ANGKUTAN DAN ENERGI LISTRIK  
TERHADAP PDRB KABUPATEN/KOTA  
DI JAWA TENGAH  
(Studi Kasus Tahun 1995 – 2001)**



**TESIS**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S2

Program Studi  
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Oleh

Agus Suranta

C4B001126

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**Juni**

**2003**

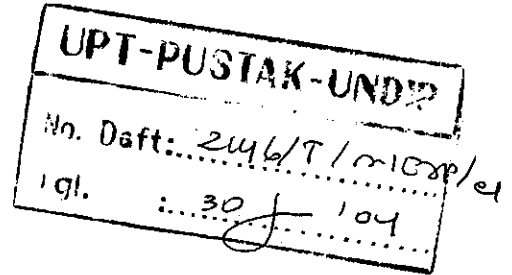
**UPT-PUSTAK-UNDIP**

**TESIS**  
**PENGARUH ANGKATAN KERJA, INVESTASI SWASTA, INVESTASI  
PEMERINTAH DAERAH, SARANA ANGKUTAN DAN ENERGI  
LISTRIK TERHADAP PDRB KABUPATEN / KOTA DI JAWA TENGAH**  
(Studi Kasus Tahun 1995 – 2001)

Disusun oleh

Agus Suranta

C4B001126



Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 12 Juni 2003  
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

DR. Syafrudin Budiningharto, SU

Pembimbing Anggota

Drs. Nugroho SBM, MT.

Anggota Penguji

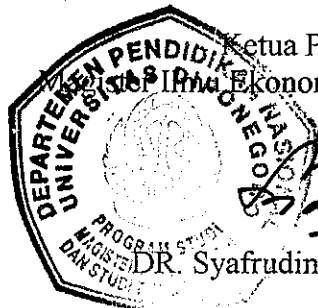
Prof. Dr. H. Miyasto

Drs. H. Wiratno, MEd

Dra. Tri Wahyu Rejekiningsih, MSi.

Semarang,

2003



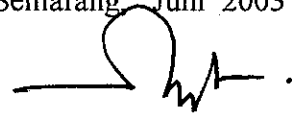
Ketua Program Studi  
Ekonomi dan Studi Pembangunan

DR. Syafrudin Budiningharto, SU

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalamnya dan daftar pustaka.

Semarang, Juni 2003



(Agus Suranta)

## ABSTRACT

This research is intended to analyze the effect of work forces, private investment, local government investment, means of transportation, and electric power on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of regencies/municipalities in Central Java during the period of 1995 – 2001. Model labor force in this research is neoclassic local economic growth. Chow test is used to analyze the impact of crisis, and variable dummy (D1) is used to describe the economic crisis of 1997.

Data used in this research is secondary data obtained from Central Bureau of Statistics (BPS), the Local Capital Investment Board (BPMD), Bureau of Industry and Trading, and Bureau of Finance- the Local Secretary, Province of Central Java. To gather reliable sample, this research uses pooling data, a combination between cross section data of 35 regencies/municipalities and time series data during 7 years. Based on pooling data, this research employs 245 samples.

The results of research show that work force, private investment, means of transportation and electric power positively influence the GRDP of regencies/municipalities in Central Java. Meanwhile, the effect of local government investment on the GRDP is not significant. It is also found, that the economic crisis has significant influence on the GDRP negative direction.

It is recommended that to increase GRDP in the regencies/municipalities, a policy is needed to motivate all parties to make investment in the regencies/municipalities. The effort to increase investment should be focused on activities that involve many workers. In addition, the development of transportation means and availability of electric power is required to help the increase in productivities in the regencies/municipalities.

Finally, in allocating budget for local development, the local government should consider potentials of each local economy, which can hopefully stimulate development of businesses in the region.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh angkatan kerja, investasi swasta, investasi pemerintah daerah, sarana angkutan dan energi listrik terhadap PDRB Kabupaten/kota di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 1995 – 2001. Model yang digunakan adalah model pertumbuhan ekonomi neoklasik. Untuk memberi gambaran adanya krisis ekonomi tahun 1997, maka dimasukkan variabel dummy, dan dilakukan uji chow.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Penanaman Modal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah. Untuk memperbesar jumlah sampel maka digunakan data pooling, yaitu gabungan dari data silang tempat (*cross section*) dari 35 kabupaten /kota di Jawa Tengah dan data runtut waktu (*time series*) selama 7 tahun, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 245.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa angkatan kerja, investasi swasta, sarana angkutan dan energi listrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten/kota di Jawa Tengah, sedangkan pengaruh investasi pemerintah daerah tidak signifikan terhadap PDRB Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Krisis ekonomi menyebabkan perbedaan yang nyata kondisi sebelum dan sesudah krisis dan memberi arah yang negatif.

Sebagai upaya meningkatkan PDRB Kabupaten/kota di Jawa Tengah maka diperlukan kebijakan untuk mendorong minat berinvestasi di daerah. Pengembangan usaha sebaiknya diarahkan pada kegiatan yang bersifat padat karya agar mampu menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. Pengembangan sarana angkutan dan penyediaan energi listrik yang mencukupi diperlukan untuk membantu peningkatan produktifitas di daerah.

Dalam pengalokasian anggaran pembangunan daerah diharapkan pemerintah daerah memperhatikan potensi ekonomi daerah masing-masing agar mampu memberikan rangsangan bagi pengembangan usaha di daerah.

## KATA PENGANTAR

PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah angkatan kerja, investasi swasta, investasi pemerintah daerah, sarana angkutan dan ketersediaan energi listrik. Sejauhmana pengaruh faktor-faktor tersebut dalam pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Tengah menarik untuk diamati sebagai bahan kajian, sehingga penulis mengambil judul PENGARUH ANGKATAN KERJA, INVESTASI SWASTA, INVESTASI PEMERINTAH DAERAH, SARANA ANGKUTAN DAN ENERGI LISTRIK TERHADAP PDRB KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH (Studi Kasus Tahun 1995 – 2001).

Temuan dalam tesis ini bukanlah merupakan hal yang baru dalam studi mengenai pertumbuhan PDRB Kabupaten/kota di Jawa Tengah, temuan ini hanya merupakan sumbangan kecil bagi beberapa studi sebelumnya. Berbagai pendekatan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya memberikan inspirasi bagi penulis untuk melakukan penelitian lanjutan. Semoga temuan yang kecil ini dapat menambah hasil studi sebelumnya, setidaknya tidaknya dari dimensi waktu dan ruang. Penulis juga menyadari bahwa walaupun telah berusaha semaksimal mungkin namun hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, karenanya sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan.

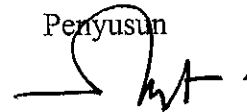
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Syafrudin Budiningharto, SU., selaku Pembimbing Utama dan Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan .
2. Bapak Drs. Nugroho SBM, MT, selaku Pembimbing Pendamping
3. Bapak Gubernur Jawa Tengah, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan dan pendanaan kepada penulis untuk melanjutkan studi di Program Studi MIESP UNDIP Semarang.
4. Kedua orang tuaku, istri dan anakku tercinta, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, teman sejawat yang semuanya selalu mendorong, memberikan semangat dan mendoakan selama penulis menempuh studi di Program Studi MIESP UNDIP Semarang.
5. Bapak/ibu pengajar dan karyawan pada Program Pasca Sarjana MIESP UNDIP Semarang. Serta semua pihak yang telah turut serta membantu kelancaran studi penulis yang tidak dapat terlupakan.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, Juni 2003

Penyusun



Agus Suranta

## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I      PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS	10
2.1. Tinjauan Umum	10
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	10
2.1.2. Sistem Ekonomi Campuran	11
2.1.3. Kebijakan Makroekonomi	13
2.2. Landasan Teori	15
2.2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional	15
2.2.1.1. Model Pertumbuhan Regional Neoklasik	16
2.2.1.2. Teori Penyebab Kumulatif	16
2.2.1.3. Model Pertumbuhan Agregat	17
2.2.1.4. Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi	19
2.2.2. Pertumbuhan Angkatan Kerja	21
2.2.3. Investasi	23
2.2.4. Pengeluaran Pemerintah	27
2.2.5. Sarana Angkutan	31
2.2.6. Energi Listrik	32
2.3. Ringkasan Penelitian Terdahulu	33
2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis	40
2.4.1. Model Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik	40
2.4.2. Bagan	42
2.5. Hipotesis	43

BAB III	METODE PENELITIAN	44
	3.1. Jenis dan Sumber Data	44
	3.2. Metode Pengambilan Data	45
	3.3. Teknik Analisis	55
	3.4. Definisi Operasional Variabel	47
	3.5. Uji Ekonometrik	47
	3.5.1. Uji Asumsi Klasik	50
	3.5.2. Uji Statistik	54
BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	57
	4.1. Keadaan Wilayah	57
	4.2. Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah	58
	4.3. Pendapatan Perkapita di Jawa Tengah	62
	4.4. Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah	63
	4.5. Typologi Klassen	65
	4.6. Sektor Unggulan di Jawa Tengah	67
	4.7. Kondisi Angkatan Kerja di Jawa Tengah	68
	4.8. Investasi di Jawa Tengah	74
	4.9. Pengeluaran Pemerintah	78
	4.10. Sarana Angkutan	83
	4.11. Energi Listrik	87
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	92
	5.1. Hasil Pengujian Regresi	92
	5.1.1. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik	94
	5.1.2. Pengujian Statistik	97
	5.2. Pembahasan	98
BAB VI	PENUTUP	115
	6.1. Kesimpulan	115
	6.2. Limitasi	116
	6.3. Rekomendasi Kebijakan	118
	DAFTAR PUSTAKA	119
	LAMPIRAN	
	BIODATA	

## DAFTAR TABEL

		Halaman	
Tabel	1.1	Pertumbuhan Ekonomi Lima Propinsi di Jawa Tahun 1995 – 2001 Batas Dasar Harga Konstan 1993 (Dalam %)	3
Tabel	1.2.	Besarnya Nilai Rata-rata PDRB, dan Jumlah Angkatan Kerja yang Terserap Menurut Lapangan Usaha di Jawa Tengah Tahun 1995-2001	4
Tabel	1.3.	Jumlah Perusahaan , Nilai Investasi dan Nilai Output Industri di Jawa Tengah Tahun 2001	5
Tabel	2.1	Hasil Perhitungan Model Regresi Hasil Penelitian Sebelumnya	38
Tabel	4.1	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 Propinsi Jawa Tengah Tahun 1995 – 2001 (dalam jutaan rupiah)	59
Tabel	4.2	Besarnya Nilai Rata-rata PDRB, Distribusi PDRB dan PDRB perkapita Kabupaten /kota di Jawa Tengah ADHK 1993 Tahun 1995 – 2001	61
Tabel	4.3.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 1995 – 2001 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 ( dalam percentase)	64
Tabel	4.4	Pembagian Daerah Kabupaten / kota di Jawa Tengah Menurut Typologi Klassen Berdasarkan Nilai PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2001 Atas Dasar Harga Konstan 1993.	66
Tabel	4.5	Sektor Dominan dan Nilai LQ dalam Perekonomian di Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2001	69
Tabel	4.6	Jumlah Angkatan Kerja di Jawa Tengah Tahun 1995 – 2001 (dalam jiwa)	70
Tabel	4.7	Nilai rata-rata Jumlah Angkatan Kerja, Distribusi dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 1995 - 2001	73

Tabel	4.8	Besarnya Rata-rata Nilai Investasi Swasta (IS), Anggaran Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah (IG), Rasio Investasi Swasta Terhadap PDRB, (IS/Y)Rasio Anggaran Pembangunan Terhadap PDRB (IG/Y) dan Rasio Antara IG Terhadap APBD Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 1995-2001	77
Tabel	4.9	Rata-rata Jumlah, Distribusi dan Pertumbuhan Sarana Angkutan Menurut Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 1995 - 2001	84
Tabel	4.10	Besar Rata-rata, Distribusi dan Pertumbuhan Daya Listrik Tersambung Menurut Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 1995 - 2001	92
Tabel	5.1.	Perbandingan Nilai $R^2$ dari Model Regresi awal atau Utama dengan $R^2$ model auxilliary regression antar variabel penjelas	95
Tabel	5.2.	Hasil Perhitungan Model Regresi Hasil Penelitian	101

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar	2.1. Peranan Sektor Pemerintah Dalam Perekonomian	12
Gambar	2.2. Efek Pertambahan Pengeluaran Pemerintah yang Dibiayai dari Pasar Modal	15
Gambar	2.3. Efek Kenaikan Pengeluaran Pemerintah	29
Gambar	2.4. Bagan Kerangka Pemikiran Teoritis	42

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 1995 – 2001 (dalam jutaan Rupiah)	L-1
Lampiran	2	Distribusi PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 1995 – 2001 (Percentase )	L-2
Lampiran	3	Laju Pertumbuhan PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 1995 – 2001 (percentase)	L-3
Lampiran	4	PDRB Dengan Migas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2001 (dalam jutaan Rupiah)	L-4
Lampiran	5	Distribusi PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2001 (dalam jutaan Rupiah)	L-5
Lampiran	6	PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Tahun 1995 – 2001 (dalam jutaan rupiah)	L-6
Lampiran	7	Nilai Location Quotient (LQ) sektoral Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kota di Jawa Tengah Tahun 2001	L-7
Lampiran	8	Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 1995 – 2001 (Dalam jiwa)	L-8
Lampiran	9	Laju Pertumbuhan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 1995 – 2001(dalam percentase)	L-9
Lampiran	10	Distribusi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 1995 – 2001 (dalam percentase)	L-10
Lampiran	11	Besarnya Nilai Investasi Industri Kecil dan Menengah Menurut Kabupaten /Kota di Jawa Tengah Tahun 1995 – 2001 ( dalam Jutaan rupiah)	L-11
Lampiran	12	Nilai Realisasi PMDN Menurut Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 1995 – 2001 (dalam jutaan rupiah)	L-12

Lampiran	13	Besarnya Investasi Swasta Menurut Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 1995 – 2001 (dalam Jutaan rupiah)	L-13
Lampiran	14	Besarnya Realisasi Pengeluaran Pembangunan Daerah Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 1995 – 2001 (dalam jutaan rupiah)	L-14
Lampiran	15	Distribusi Pengeluaran Pembangunan Daerah Menurut Kabupaten / kota di Jawa Tengah Tahun 1995 – 2001 (dalam persentase)	L-15
Lampiran	16	Laju pertumbuhan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 1995 – 2001 (dalam persentase)	L-16
Lampiran	17	Prosentase Alokasi Pengeluaran Pembangunan Daerah Menurut Sektor Kabupaten / kota di Jawa Tengah Tahun 2000 – 2001 (dalam persentase)	L-17
Lampiran	18	Besarnya Realisasi Pengeluaran Rutin Daerah Menurut Kabupaten / kota di Jawa Tengah Tahun 1995 – 2001 (dalam juta rupiah)	L-21
Lampiran	19	Besarnya Realisasi APBD Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 1999 – 2001 (dalam jutaan rupiah)	L-22
Lampiran	20	Besarnya Nilai Rasio Investasi Swasta Terhadap PDRB Tanpa Migas ADHK 1993 Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 1995 – 2001	L-23
Lampiran	21	Besarnya Nilai Rasio Anggaran Pembangunan Terhadap APBD Kabupaten/kota di Jawa Tengah 1995 – 2001	L-24
Lampiran	22	Besarnya Nilai Rasio Anggaran Pembangunan Terhadap PDRB Tanpa Migas ADHK 1993 Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 1995 – 2001	L-25
Lampiran	23	Jumlah Sarana Angkutan Menurut Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 1995 – 2001 (dalam unit)	L-26
Lampiran	24	Distribusi Sarana Angkutan Menurut Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 1995 – 2001 (dalam persentase)	L-27
Lampiran	25	Laju Pertumbuhan Sarana Angkutan Menurut Kabupaten /kota di Jawa Tengah Tahun 1995 – 2001 (dalam persentase)	L-28

Lampiran	26	Banyaknya Kendaraan Wajib Uji Menurut Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2001 ( dalam unit)	L-29
Lampiran	27	Besarnya Daya Listrik Tersambung Menurut Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 1995 – 2001 (dalam KVA)	L-30
Lampiran	28	Distribusi Daya Listrik Tersambung Menurut Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 1995 – 2001 (dalam percentase)	L-31
Lampiran	29	Laju Pertumbuhan Daya Listrik Tersambung Menurut Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 1995 – 2001 (dalam Percentase)	L-32
Lampiran	30	Banyaknya Pelanggan dan Besarnya Daya Listrik Tersambung PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Menurut Unit PLN dan Kelompok Pelanggan di Jawa Tengah	L-33
Lampiran	31	Besarnya Nilai PDRB ADHK 1993, Angkatan Kerja, Investasi Swasta, Investasi Pemerintah Daerah, Sarana Angkutan dan Energi Listrik dan variabel dummy	L-34
Lampiran	32	Besarnya Nilai log PDRB ADHK 1993, Angkatan Kerja, Investasi Swasta, Investasi Pemerintah Daerah, Sarana Angkutan dan Energi Listrik dan variabel dummy	L-38
Lampiran	33	Hasil Persamaan Regresi Dengan Variabel Dummy	L-43
Lampiran	34	Uji asumsi Klasik Persamaan Regresi dengan Variabel Dummy	L-44
Lampiran	35	Uji Chow	L-51
Lampiran	36	Uji Asumsi Klasik Persamaan Regresi Sesudah Krisis	L-53
Lampiran	37	Hasil Persamaan Regresi Dengan Menggunakan Model Pertumbuhan Makroekonomi dari Skinner	L-59
Lampiran	38	Hasil Persamaan Regresi Dengan Menggunakan variabel Lag	L-60
Lampiran	39	Hasil Persamaan Regresi Dengan Menggunakan variabel Pertumbuhan PDRB (On)	L-61
Lampiran	40	Klasifikasi Kabupaten/kota di Jawa Tengah Berdasarkan Typologi Klassen Tahun 1996 - 2001	L-62

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha perubahan yang dilakukan secara terus menerus menuju peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam segala bidang termasuk ekonomi. Walaupun pertumbuhan ekonomi bukan merupakan satu-satunya komponen pembangunan, namun pertumbuhan ekonomi seringkali menjadi salah satu ukuran dari keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto diartikan sebagai berapa produk yang dihasilkan pada suatu daerah tersebut dalam satu satuan waktu tertentu. Dari nilai Produk Domestik Regional Bruto ini akan dapat digambarkan sejauhmana kemampuan daerah dalam mengelola/memanfaatkan sumberdaya yang ada. Sedangkan unsur-unsurnya adalah pemupukan kapital/investasi yang dibiayai oleh tabungan domestik maupun luar negeri (hutang pemerintah atau swasta); human capital atau sumberdaya manusia yang menekankan pada skill; dan teknologi dimana untuk mengembangkannya diperlukan perdagangan (Todaro, 2000).

Dengan dilaksanakan otonomi daerah, di mana titik berat pembangunan diletakkan pada daerah (kabupaten/kota), maka diharapkan akan memberikan dampak bagi percepatan pembangunan, karena kebutuhan masyarakat secara riil



dapat lebih diketahui dan dipenuhi secara tepat dan cepat oleh pemerintah di daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, Kabupaten/kota mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Penjelasan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah). Sisi lain dari dilaksanakannya otonomi daerah adalah adanya upaya dari masing-masing daerah untuk berupaya memanfaatkan sumberdaya yang ada seoptimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai hal tersebut perlu didukung dengan kajian tentang potensi ekonomi yang dimiliki dari masing-masing daerah.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 1995 - 2001 relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional bahkan terendah diantara 5 propinsi di Jawa (tidak termasuk Propinsi Banten). Hal ini merupakan suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji mengingat sumberdaya alam,

prasarana penunjang relatif sama, bahkan letak propinsi Jawa tengah yang berada ditengah P. Jawa dinilai memiliki arti strategis dengan segala konsekuensinya.

Tabel 1.1.

**Pertumbuhan Ekonomi Lima Propinsi di Jawa Tahun 1995 - 2001 Atas Dasar Harga Konstan 1993. (Dalam %)**

Propinsi	1995	1997	1999	2001
Jawa Tengah	7,34	3,03	3,49	3,33
Jawa Timur	8,18	5,04	0,54	3,34
Jawa Barat	8,07	4,87	2,08	4,08
DKI Jakarta	9,27	5,11	-1,25	3,64
DI Yogyakarta	8,09	3,52	3,31	2,13
Nasional	8,22	4,70	0,31	3,32

*Sumber : BPS, Pendapatan Regional Jawa Tengah, Berbagai Tahun*

Dalam struktur perekonomian Jawa tengah selama tahun 1995-2001, peranan sektor industri pengolahan masih cukup dominan, hal ini terlihat dari besarnya kontribusi sektor tersebut rata-rata sebesar Rp. 12,611,786.65 juta atau 31,01 % terhadap PDRB. Sektor industri mampu menyerap 2,104,587 orang atau 14.74 % dari angkatan kerja yang ada. Industri tersebut sebagian besar merupakan industri kecil dan menengah dan cenderung padat karya. Dengan struktur perekonomian tersebut ternyata memberikan bukti lebih tahan terhadap perubahan ekonomi. Pada saat krisis ekonomi terjadi tahun 1997 yang menyebabkan kemerosotan pertumbuhan ekonomi secara nasional termasuk Jawa Tengah seperti terlihat pada Tabel 1.1., kondisi perekonomian Jawa Tengah mengalami kontraksi yang lebih ringan bila dibandingkan dengan propinsi lain di Jawa.

Tabel 1. 2.

**Besarnya Nilai Rata-rata PDRB dan Rata-rata Jumlah Angkatan Kerja yang Terserap Menurut Lapangan Usaha di Jawa Tengah Tahun 1995 -2001**

Sektor / Lapangan Usaha	PDRB (juta Rp)	%	Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	%
1. Pertanian	8,299,345.16	20.40	6,244,410.29	43.73
2. Pertambangan & Penggalian	562,842.35	1.38	104,682.57	0.73
3. Industri Pengolahan	12,611,786.65	31.01	2,104,587.29	14.74
4. Listrik Gas dan Air Minum	415,068.37	1.02	31,773.71	0.22
5. Bangunan	1,768,848.65	4.35	697,556.71	4.89
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	9,212,005.70	22.65	2,670,902.71	18.71
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1,852,549.02	4.55	558,817.14	3.91
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,808,997.50	4.45	88,071.00	0.62
9. Jasa-jasa	4,141,788.86	10.18	1,777,906	12.45
Jumlah	40,673,232.27	100	14,278,707.43	100

*Sumber: BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, Pendapatan Regional Jawa Tengah, Berbagai Tahun*

Peranan industri kecil dan menengah di Jawa Tengah dinilai cukup potensial untuk dikembangkan, hal ini dilandasi suatu kenyataan bahwa jenis usaha ini relatif tahan terhadap fluktuasi kondisi ekonomi pada masa krisis. Berdasarkan Tabel 1.3. dapat diketahui bahwa dari sisi jumlah perusahaan, industri di Jawa Tengah sebagian besar terdiri dari industri kecil dan menengah, namun dari sisi besarnya investasi dan total output, jenis industri kecil dan menengah relatif

lebih kecil bila dibandingkan dengan industri besar dan sedang. Jenis industri tersebut lebih bersifat padat karya.

Struktur perekonomian daerah khususnya kabupaten di Jawa Tengah ternyata peranan sektor pertanian dan industri masih dominan. Industri yang berkembang merupakan industri kecil dan menengah yang cukup besar jumlahnya. Sebagian industri ini berada pada daerah perdesaan yang mengolah hasil pertanian dan bersifat padat karya.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Perusahaan , Nilai Investasi dan Nilai Produksi Industri**  
**di Jawa Tengah Tahun 2001**

No	Kelompok Industri	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi (Juta Rp)	Nilai Produksi (Juta Rp)
I	Industri Hasil Pertanian			
	a. Besar	223	3.142.544	6.595.236
	b. Kecil dan Menengah	324.399	492.510	2.365.353
II	Industri			
	a. Besar	469	9.091.745	9.792.456
	b. Kecil dan Menengah	319.105	641.423	2.924.692

*Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka 2002.*

Investasi yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik seperti jalan, sarana dan prasarana transportasi, pengairan dan lain-lainnya. Besarnya investasi pemerintah dapat dihitung dari selisih antara anggaran pemerintah keseluruhan dengan belanja rutinnya. Di Indonesia besarnya

investasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat dari besarnya pengeluaran pembangunan seperti termuat dalam APBD "Pembangunan". Dalam melaksanakan pembangunan ini, maka tujuan pemerintah daerah adalah mengejar pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Pada penelitian penelitian sebelumnya kajian mengenai peranan sektor swasta cenderung dilihat investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi PMA dan PMDN memiliki nilai investasi relatif lebih besar, dan *output*/ nilai produksi yang dihasilkan relatif besar sehingga tidak dapat diabaikan peranannya, namun pada umumnya tidak berbasis sumberdaya domestik (*domestic resource based economy*) dan komunitas lokal (*local community based*), sehingga walaupun memiliki nilai tambah yang besar namun kurang mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat (lokal) sebanding dengan output yang dihasilkan. Menurut Gunawan Sumodiningrat (2001) pembangunan adalah milik rakyat, sehingga strategi pembangunan haruslah berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat. Hal ini sebagai perwujudan dari pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people centered development*). Namun demikian dalam pembentukan PDRB peran dari perusahaan besar yang investasinya berasal dari PMA/PMDN tidak dapat diabaikan begitu saja.

Selain investasi, maka tenaga kerja (angkatan kerja) merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya

masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar, maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia, dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi /output dari suatu daerah.

Untuk meningkatkan output suatu daerah baik dari sisi jumlah maupun nilai tambahnya, maka diperlukan suatu sarana pendukung seperti tersedianya sarana angkutan yang memadai. Sarana angkutan yang memadai akan mampu meningkatkan mobilitas manusia (orang) sebagai pelaku ekonomi maupun barang sebagai bahan baku dan hasil produksi. Dengan dukungan sarana angkutan yang baik, maka diharapkan aliran barang sebagai bahan baku akan lancar dan mendukung peningkatan proses produksi, serta distribusi hasil produksi dapat menjangkau pada daerah pasar yang luas. Pada akhirnya akan mendorong peningkatan output suatu daerah.

Energi listrik merupakan salah satu fasilitas dasar bagi pengembangan suatu daerah. Tersedianya energi listrik akan menimbulkan kenyamanan bagi masyarakat untuk tinggal dan melaksanakan kegiatan ekonominya. Dengan adanya energi listrik juga akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan produktifitasnya. Sedangkan bagi perusahaan industri pengolahan dan industri jasa, energi listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kelancaran

kegiatan produksinya. Dengan demikian tersedianya energi listrik yang murah, berkualitas, dan mencukupi kebutuhannya merupakan harapan guna meningkatkan produksi, produktifitas dan efisiensi usahanya.

Di Jawa Tengah kebutuhan energi listrik sebagian besar dipenuhi oleh PT (Persero) PLN dan hanya sebagian kecil yang dipenuhi dari pembangkit listrik sendiri. Sejuahmana pengaruh energi listrik terhadap pembentukan PDRB Kabupaten/kota menarik untuk dikaji

Dengan melihat kenyataan tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji sejuahmana pengaruh angkatan kerja, investasi swasta, investasi pemerintah daerah, sarana angkutan dan energi listrik terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan studi kasus tahun 1995 - 2001.

## **2. Perumusan Masalah**

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, di mana fokus pembangunan lebih diletakkan pada daerah Kabupaten/kota, maka sangat menarik untuk mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah PDRB. Oleh karena itu untuk mengkaji pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dapat diamati dari faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah".

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran dari kemampuan suatu daerah dalam mengelola/memanfaatkan sumberdaya yang ada, dimana unsur-unsur pembentuknya adalah kapital, tenaga kerja dan teknologi.

Apabila investasi swasta yang ditanamkan baik dengan fasilitas PMDN maupun non fasilitas (swasta pada sub sektor industri kecil dan menengah), investasi pemerintah daerah, diasumsikan sebagai stok kapital, angkatan kerja diasumsikan sebagai tenaga kerja; dan energi listrik dan sarana angkutan menggambarkan teknologi yang ada, maka unsur pembentukan PDRB merupakan fungsi dari angkatan kerja, investasi swasta investasi pemerintah daerah, energi listrik dan sarana angkutan.

Dengan melihat latar belakang permasalahan tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pengaruh angkatan kerja, investasi swasta, investasi pemerintah daerah, energi listrik dan sarana angkutan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten / Kota di Jawa Tengah, dengan mengambil studi kasus pada tahun 1995 – 2001.

### **3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh angkatan kerja, investasi swasta, investasi pemerintah daerah, energi listrik dan sarana angkutan terhadap PDRB Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah .

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu masukan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah.
2. Memberikan tambahan acuan bagi penelitian lebih lanjut yang sejenis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

#### 2.1. Tinjauan Umum

##### 2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (2000) istilah pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Istilah ini juga untuk menggambarkan tentang masalah ekonomi yang dihadapi dalam jangka panjang. Masalah pertumbuhan ekonomi bersumber dari perbedaan diantara tingkat pertumbuhan potensial dengan tingkat pertumbuhan yang dicapai sebenarnya. Pertumbuhan ini disebabkan karena semakin meningkatnya pemanfaatan sumberdaya yang dimilikinya. Peningkatan sumberdaya akan menyebabkan meningkatnya produksi nasional. Untuk dapat meningkatkan sumberdaya tersebut, maka diperlukan adanya investasi.

Selanjutnya dikatakan, bahwa aspek kedua dari masalah ekonomi yang ada adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dan aspek ketiga adalah mengenai keteguhan pertumbuhan ekonomi yang berlaku dari satu tahun ke tahun lainnya.

Ada tiga fenomena penting mengenai ciri pertumbuhan, yaitu : pada masa kini terdapat perbedaan yang nyata dalam taraf kemajuan ekonomi dan kemakmuran yang dicapai di berbagai negara; terdapat perbedaan yang nyata terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai berbagai negara; dan

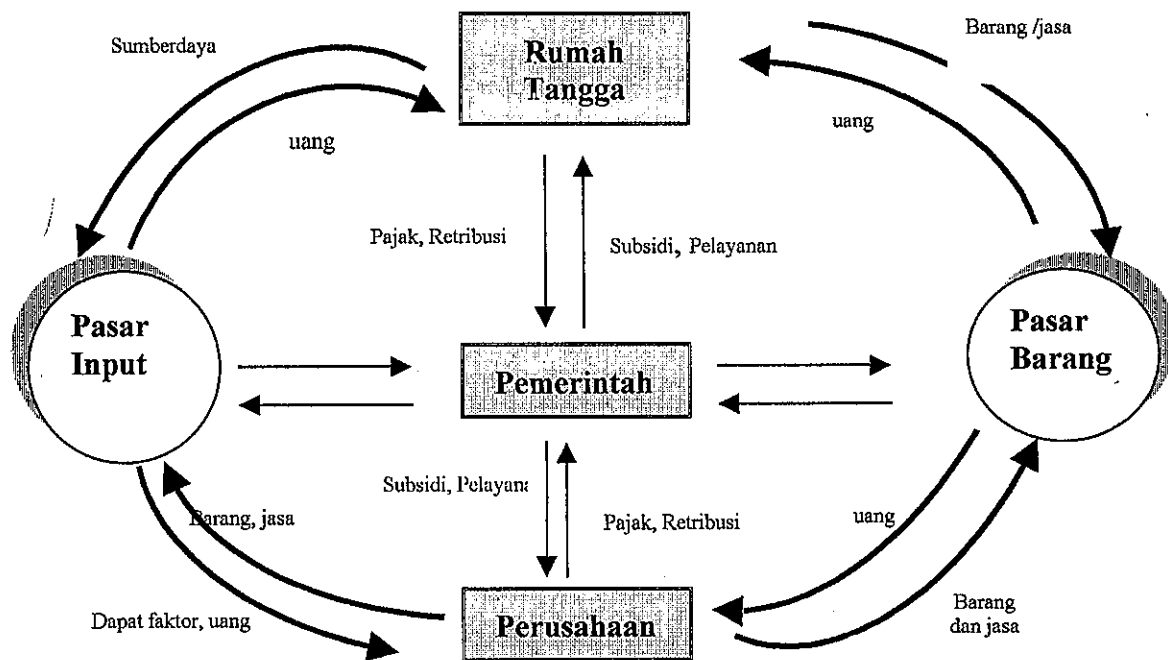
pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara masih tetap mengalami perubahan yang relatif besar dan tingkat pertumbuhannya tidak selalu teguh (Sadono Sukirno 2000).

### **2.1.2. Sistem Ekonomi Campuran**

Menurut Hyman, dkk (1996), bahwa kebanyakan sistem ekonomi negara di seluruh dunia pada saat ini adalah ekonomi campuran (*mixed economy*). Ekonomi campuran adalah suatu perekonomian di mana pemerintah menyediakan jumlah barang dan jasa tertentu serta mengatur aktivitas perorangan.

Pemerintah berperan dalam menyediakan kebutuhan barang dan jasa publik (*public good*) yang tidak dapat disediakan oleh swasta. Barang publik (atau biasa disebut dengan dengan barang milik bersama atau barang sosial seperti yang didefinisikan oleh Samuelson) adalah barang yang dapat dinikmati secara bersama-sama, dimana setiap individu dapat menggunakan untuk konsumsi sebanyak yang dibutuhkan tanpa mengurangi dari individu lain yang mengkonsumsi barang tersebut (Cullis J G and Phillip Jones, 1998). Barang publik memiliki ciri-ciri : (1) Tidak bersaing (*Non Rival in Consumption*), yaitu konsumsi dari seseorang tidak menyebabkan menurunnya kemanfaatan oleh individu lainnya; (2) Tidak dapat dikecualikan *Non Excludability*, tidak seorangpun konsumen dapat dilarang dalam memanfaatkannya. Barang dan jasa yang diproduksi pemerintah tersedia dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang / jasa yang relatif murah karena harganya ditentukan rendah oleh pemerintah (subsidi) (Sukanto R , 2001).

**Gambar 2.1.**  
**Peranan Sektor Pemerintah Dalam Perekonomian Campuran**



Pada gambar tersebut diatas terlihat bahwa sektor rumah tangga mendapatkan penghasilan dari menjual faktor yang dimiliki (tenaga kerja) pada pasar input. Pendapatan yang diperoleh akan dibelanjakan pada pasar barang. Pemerintah berpartisipasi dalam pasar sebagai pembeli barang dan jasa. Pemerintah membeli input dari rumah tangga dan perusahaan serta mendapatkan hak kepemilikan dari sumber produktif seperti modal dan tanah. Pemerintah menggunakan input untuk menghasilkan barang dan jasa yang tidak dijual kepada sektor rumah tangga dan perusahaan, tetapi disediakan melalui distribusi tanpa melalui pasar. Namun demikian pemerintah juga memiliki dan menjalankan perusahaan, seperti jasa pelayanan pos, kereta api, telekomunikasi, listrik dan lain-lain. Pemerintah juga membeli output perusahaan, seperti kertas, mobil dan lain-

seperti kertas, mobil dan lain-lain. Untuk membayar barang dan jasa yang dipergunakannya, pemerintah mendapatkan pemasukan dari perusahaan dan rumah tangga, seperti hasil pembayaran pajak, retibusi, royalti dan fee. Pemerintah menggunakan sumberdaya yang produktif untuk menghasilkan barang dan jasa termasuk pertahanan, jalan, sekolah, polisi dan banyak jasa penting lainnya.

### **2.1.3. Kebijakan Makroekonomi**

Kebijakan makroekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada pada saat itu. Persoalan pokok dalam perekonomian menurut Sadono Sukirno (2000) adalah (1) Pengangguran; (2) Inflasi; (3) Kelesuan pertumbuhan ekonomi; (4) Ketidakstabilan neraca pembayaran. Sedangkan kebijakan ekonomi yang dilaksanakan antara lain kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Bentuk utama dari kebijakan fiskal adalah dengan menambah pengeluaran pemerintah dan mengurangi pajak pendapatan. Penambahar pengeluaran pemerintah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu meminjam dari masyarakat melalui pasar modal (*loanable fund*) dan meminjam dari bank sentral melalui pencetakan uang baru. Penurunan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu (1) menurunkan sejumlah pajak tertentu; dan (2) menurunkan persentase pajak pendapatan.

Kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu : (1) kebijakan yang mempengaruhi suku bunga; dan (2) mempengaruhi penawaran uang, yang dilakukan dengan mencetak uang baru atau

menggalakkan lembaga keuangan terutama bank perdagangan untuk menciptakan pinjaman yang lebih banyak (Sadono Sukirno, 2000).

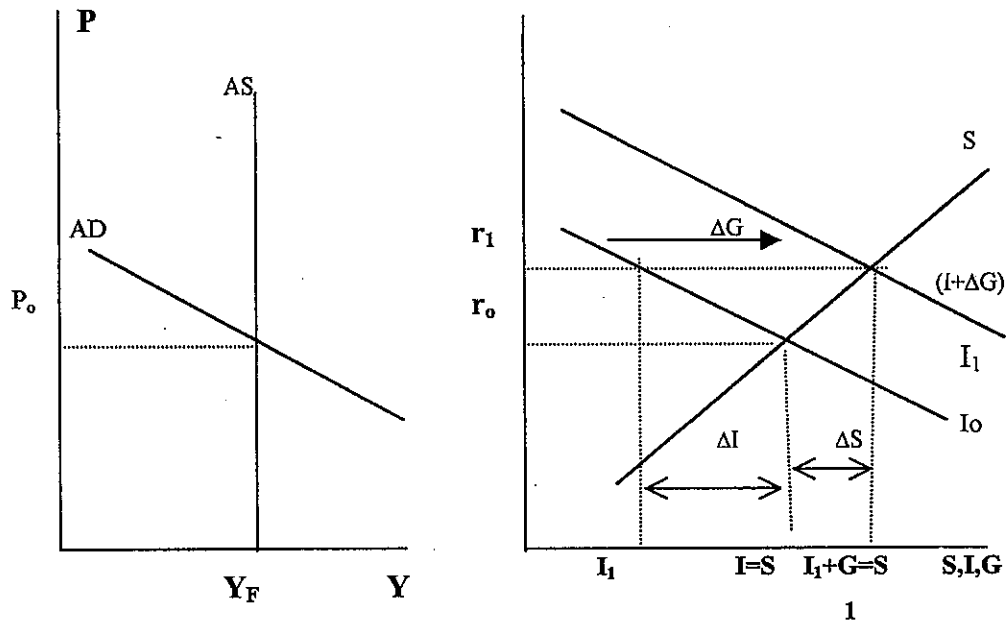
Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral. Pada masa otonomi daerah, maka daerah hanya memiliki kewenangan dalam kebijakan fiskal melalui kebijakan pengaturan pengeluaran pemerintah daerah.

Peningkatan pengeluaran pemerintah merupakan konsekuensi dari ditentukannya program kerja yang membutuhkan anggaran yang besar, dan menerapkan kebijakan defisit anggaran. Apabila pinjaman pemerintah dibiayai oleh dana masyarakat, maka akan menyebabkan penurunan investasi dan kenaikan tabungan masyarakat, maka kenaikan pengeluaran pemerintah akan berdampak pada kenaikan suku bunga dan selanjutnya menurunkan tingkat investasi swasta, kondisi ini disebut dengan *crowding out*.

Meskipun *aggregat demand* akan naik mengikuti kenaikan pengeluaran pemerintah, akan tetapi efeknya tergantung juga kepada bentuk kurva *aggregat supply*. Dalam kasus klasik semua efeknya akan terjadi pada harga dan keseimbangan output tetap. Sedangkan dalam kasus keynesian yang ekstrim, semua efeknya akan jatuh kepada output, sementara harga-harga dianggap tetap. Dalam kasus Keynesian secara umum, efeknya terdistribusi antara kenaikan output dan tingginya harga.

Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah dengan menurunkan pajak sama dengan efek kenaikan dari pengeluaran pemerintah, yaitu akan menggeser kurva IS kekanan, sehingga mengakibatkan pergeseran kurva *aggregat demand*.

**Gambar 2.2.**  
**Efek Pertambahan Pengeluaran Pemerintah yang Dibiayai**  
**Dari Pasar Modal**



Efek Pertambahan Pengeluaran  
 Pemerintah

Permintaan - penawaran dana

Sumber : Sadono Sukirno, 2000.

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999). Pada saat ini tidak ada satupun teori yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif, namun beberapa teori yang secara parsial dapat membantu untuk memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hakekatnya inti dari teori ekonomi

regional tersebut berkisar pada metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah (regional).

**2.2.1.1. Model Pertumbuhan Ekonomi Regional Neoklasik.** Dalam model pertumbuhan ekonomi neoklasik Solow (*Solow neoclassical growth model*), maka fungsi produksi agregat standart adalah sama seperti yang digunakan dalam persamaan sektor modern Lewis, yakni

$$Y = Ae^{\mu t} K^{\alpha} L^{1-\alpha} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

Y adalah produk domestik bruto,

K adalah stok modal fisik dan modal manusia,

L adalah tenaga kerja non terampil.

A adalah suatu konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar,

$e^{\mu t}$  melambangkan tingkat kemajuan teknologi.

$\alpha$  melambangkan elastisitas output terhadap modal, yaitu persentase kenaikan PDB yang bersumber dari 1 % penambahan modal fisik dan modal manusia.

Menurut teori pertumbuhan neoklasik tradisional, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor, yakni kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi (Todaro M, 2000).

**2.2.1.2. Teori Penyebab Kumulatif (*Cumulative Causation Theory*).** Teori ini pada awalnya dikemukakan oleh Myrdal (1957). Myrdal mengkritik teori Neoklasik mengenai konsep pertumbuhan yang stabil. Myrdal menyatakan bahwa perbedaan tingkat kemajuan pembangunan ekonomi antar daerah selamanya akan menimbulkan adanya "*backwash effects*" yang mendominasi "*spread effects*" dan

proses pertumbuhan ekonomi regional merupakan proses yang tidak ekuilibrium. Perbedaan utama dari teori neoklasik dan Myrdal adalah yang pertama menggunakan *constant return to scale* dan yang kedua menggunakan *increasing return to scale*. Perbedaan tingkat pertumbuhan antar wilayah mungkin akan menjadi sangat besar jika *increasing return to scale effect* berlangsung terus.

Menurut Kaldor (1970), prinsip-prinsip dari penyebab kumulatif adalah penyederhanaan dari *increasing return to scale* di perusahaan. *Increasing return to scale* ini membantu memperkaya sementara dan mencegah meluasnya daerah miskin. Kekuatan pasar menyebabkan adanya pengelompokan aktivitas dengan *increasing return to scale* di area perekonomian tertentu. Hal ini menimbulkan adanya eksternalitas atau internalitas di pusat aglomerasi. Keunggulan yang terbatas dari suatu daerah terbelakang (*backward region*), seperti tenaga kerja yang murah, tidak mencukupi untuk bersaing dengan aglomerasi ekonomis.

**2.2.1.3. Model Pertumbuhan Agregat.** Glasson (1977), menyatakan bahwa teori pertumbuhan regional jangka panjang harus memperhitungkan faktor-faktor yang dianalisis jangka pendek diasumsikan konstan, yakni seperti penduduk, upah, harga, teknologi dan distribusi pendapatan. Mobilitas faktor-faktor terutama tenaga kerja dan modal harus menjadi pertimbangan yang sangat penting. Pada umumnya orang sependapat bahwa pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen ataupun eksogen, yakni faktor-faktor yang terdapat pada daerah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor di luar daerah atau kombinasi dari keduanya. Faktor-faktor penentu penting dari dalam daerah meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja dan modal

sedangkan salah satu faktor penentu dari luar daerah yang penting adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

Suatu pendekatan yang lebih baru untuk menjelaskan faktor penentu endogen dari pertumbuhan ekonomi regional adalah melalui penggunaan model ekonomi makro. Model ini berorientasi pada segi penawaran dan berusaha menjelaskan output regional menurut faktor-faktor regional tertentu, yang masing-masing dapat dianalisa secara sendiri-sendiri (Glasson, 1977), dan dapat dituliskan sebagai berikut :

$$O_n = f_n \{K, L, Q, Tr, T, So\} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

- $O_n$  = Output potensial dari daerah n
- $K$  = Modal (kapital)
- $L$  = Tenaga Kerja (Labour)
- $Q$  = Tanah ( Sumberdaya alam.)
- $Tr$  = Sumberdaya pengangkutan
- $T$  = Teknologi
- $So$  = Sistem Sosial Politik

Apabila dirumuskan menurut faktor-faktor yang lebih penting dan lebih mudah dikuantitaskan, maka rumus persamaan mengenai pertumbuhan dapat dinyatakan , sebagai contoh :

$$O_n = a_n k_n + (1 - a_n) l_n + t_n \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan :

- $O, k, l$  dan  $t$  = tingkat pertumbuhan output, modal, tenaga kerja dan teknologi
- $a$  = bagian pendapatan yang diperoleh modal (yakni produk marginal dari modal).

**2.2.1.4. Teori Pertumbuhan Berbasis Ekspor.** Teori pertumbuhan regional berbasis ekspor menerangkan bahwa beberapa aktivitas di suatu daerah adalah *basic* dalam arti bahwa pertumbuhannya menimbulkan dan menentukan pembangunan menyeluruh daerah itu, sedangkan aktifitas lain (*non basic*) merupakan konsekuensi dari pembangunan menyeluruh tersebut. Menurut teori ini, semua pembangunan regional ditentukan oleh sektor *basic* sedangkan sektor *non basic* yang mencakup sektor sektor pendukung melayani sektor *basic* tersebut (Hoover, 1984 dalam Prasetyo Soepomo 2001). Selanjutnya dikatakan bahwa, perekonomian lokal harus menambah aliran uang masuk agar dapat tumbuh dan satu satunya cara yang efektif adalah dengan menambah ekspor.

Konsep kunci dari teori ini adalah bahwa kegiatan ekspor merupakan mesin pertumbuhan. Pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor dengan demikian ditentukan oleh permintaan eksternal. Untuk menentukan dan mengukur suatu basis, maka satuan ukuran yang dipilih dapat berupa pendapatan daerah, *employment* (kesempatan kerja), nilai tambah, output, penjualan kotor dan sebagainya. Sedangkan pendekatan yang digunakan untuk menentukan sektor *basic* ada dua, yaitu pendekatan langsung dan tidak langsung. Pendekatan langsung dilakukan dengan cara mengukur aliran komoditi dan uang; dan melakukan survai tentang perekonomian lokal. Sedangkan pendekatan tidak langsung meliputi pendekatan asumsi, pendekatan *location quotient* (LQ) dan pendekatan persyaratan minimum.

Pada pendekatan asumsi maka sektor *basic* dari suatu daerah diasumsikan, sedangkan sektor lainnya diasumsikan *non basic*. Dalam metode ini memiliki kelemahan karena dalam penentuan asumsi dapat salah. Metode *location quotient* (LQ) yang sangat populer serta penggunaannya berkelanjutan dari pengganda basis ekonomi. Suatu *location quotient* (LQ) diberi batasan sebagai berikut :

$$LQ_i = (E_{ij} / E_j) / (E_{in} / E_n) \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan :

- E<sub>ij</sub> = Variabel regional (pendapatan regional) di industri i di wilayah j
- E<sub>j</sub> = Variabel regional di wilayah j
- E<sub>in</sub> = Variabel regional di industri i di perekonomian nasional sebagai perekonomian benchmark / patokan
- E<sub>n</sub> = Variabel regional di perekonomian nasional

Apabila nilai :  $LQ_i > 1$ , industri i merupakan industri basis,

$LQ_i < 1$ , industri i merupakan industri non basis

Pendekatan yang didasarkan atas analisis *location quotient* (LQ) memiliki beberapa kekurangan (Prasetyo Soepono, 2001), yaitu :

1. Mengasumsikan adanya permintaan yang seragam / sama, padahal penduduk memiliki selera yang berbeda
2. Asumsi produktifitas adalah sama antar daerah;
3. Masalah *product mix* ( produk dari merk yang satu diekspor, sedang produk yang sama dengan merk yang lain diimpor;
4. Ketidakmampuan menerangkan keterkaitan antar industri;
5. Metode LQ bergantung pada tingkat agregat data;

Sedangkan keunggulannya adalah tidak mahal dan analisa LQ mampu memberikan kepada analis peluang untuk memperoleh wawasan ke dalam (Prasetyo Soepono, 2001).

Teknik Persyaratan minimum merupakan sedikit revisi dari rumus LQ untuk menghitung kesempatan kerja surplus atau ekspor sebagai berikut :

$$EX_i = E_{ij} - (E_{in}/E_n)^{\min} \times E_j \dots\dots\dots (5)$$

Keterangan :  
 $(E_{in}/E_n)^{\min}$  adalah proporsi minimum kesempatan kerja bagi industri i di kota-kota yang ukurannya serupa dengan kota yang menjadi subyek.

Teknik ini tidak lazim digunakan, sedangkan teknik *location quotient* merupakan cara yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi industri-industri ekspor. (Prasetyo Soepono, 2001).

### 2.2.2. Pertumbuhan Angkatan Kerja

Menurut Todaro M (2000), pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meskipun demikian, hal tersebut masih dipertanyakan, apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.

Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan penambahan tenaga

kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal, dan tersedianya input dan faktor produksi penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasian.

Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah tidak terbatas. Dalam keadaan demikian, penawaran tenaga kerja mengandung sifat elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja

Menurut Nicholson W (1991), bahwa suatu fungsi produksi suatu barang atau jasa tertentu ( $q$ ) adalah  $q = f(K,L)$  dimana  $K$  merupakan modal dan  $L$  adalah tenaga kerja memperlihatkan jumlah maksimum sebuah barang/jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara  $K$  dan  $L$ , maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi. Tambahan keluaran yang diproduksi inilah yang disebut dengan produk fisik marginal (*Marginal Physical Product*). Selanjutnya dikatakan bahwa apabila jumlah tenaga kerja ditambah terus menerus sedang faktor produksi lain dipertahankan konstan, maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan produktivitas, namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penurunan produktivitas serta

setelah mencapai tingkat keluaran maksimum, setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangi keluaran.

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia, maka akan menyebabkan semakin meningkatnya total produksi di suatu daerah.

Oleh karena itu hipotesis yang dapat dibangun adalah :

Angkatan kerja diduga berpengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten/kota di Jawa Tengah

### 2.2.3. Investasi

Teori Harrod-Domar (dikemukakan oleh Evsey Domar dan R.F. Harrod), mengemukakan model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori Keynes. Teori tersebut menitik beratkan pada peranan tabungan dan investasi sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah (Lincoln Arsyad, 1997). Beberapa asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah bahwa (1) perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh; (2) Dalam perekonomian terdiri dari 2 sektor, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan berarti sektor pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada; (3) besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original (nol); (4) Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save* = MPS) besarnya tetap, demikian juga rasio anatar modal dan output (*capital output ratio* = COR) dan rasio penambahan

modal-output (*incremental capital output ratio* = ICOR). Teori ini memiliki kelemahan yaitu kecenderungan menabung dan rasio pertambahan modal-output dalam kenyataannya selalu berubah dalam jangka panjang. Demikian pula proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tidak konstan, harga selalu berubah dan suku bunga dapat berubah dan akan mempengaruhi investasi.

Investasi menurut Sadono Sukirno (2000) adalah pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Investasi ini memiliki 3 peran penting dalam perekonomian, yaitu (1) merupakan salah satu pengeluaran agregat, di mana peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional; (2) pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi dimasa depan dan perkembangan ini menstimulir pertambahan produksi nasional dan kesempatan kerja; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi, sehingga akan memberikan kenaikan produktifitas dan pendapatan perkapita masyarakat. Investasi dapat dilakukan oleh swasta dan pemerintah.

Di Jawa Tengah industri yang ada sebagian besar merupakan industri kecil dan menengah yang lebih bersifat padat karya dengan teknologi yang sederhana, sehingga dari sisi output masih relatif kecil. Untuk meningkatkan output dapat dilakukan dengan meningkatkan produktifitasnya, melalui penambahan investasi guna memperbaharui / memperbaiki teknologi yang digunakan dan / atau investasi guna meningkatkan kemampuan sumberdaya manusianya (*human capital*). Dengan demikian akan meningkat rasio kapital-tenaga kerjanya Dengan meningkatnya

rasio antara kapital - tenaga kerja secara konsisten diharapkan akan meningkatkan produk domestik regional bruto (Neni Pancawati, 2000).

Investasi swasta atau penanaman modal swasta dalam negeri bruto merupakan komponen dari perbelanjaan agregat yang sifatnya tidak stabil, dan menjadi salah satu sumber penting dari konjungtur dalam perekonomian. Besarnya investasi perusahaan dapat diterangkan dalam analisis hubungannya dengan tingkat sukubunga, apabila suku bunga rendah lebih banyak investasi yang akan dilakukan, dan sebaliknya kenaikan suku bunga akan menyebabkan pengurangan dalam jumlah investasi (Sadono Sukirno, 2000). Selanjutnya dikatakan bahwa kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan kemakmuran masyarakat.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan investasi swasta adalah dengan memberikan kondisi yang kondusif dan menarik bagi berkembangnya industri dalam negeri dan masuknya investor asing. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Modal Dalam Negeri pada tahun 1966 memberikan persyaratan menarik, dan telah membuka kemungkinan bagi pertumbuhan sektor industri dengan landasan yang luas (McCawley, P 1981). Sejalan dengan semakin meningkatnya investasi yang berasal dari swasta baik investasi dengan fasilitas PMDN maupun non fasilitas, ternyata PDRB di Jawa Tengah menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun.

Oleh karena itu hipotesis yang dapat dibangun adalah :

Investasi swasta diduga berpengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten / kota di Jawa Tengah

#### 2.2.4. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat-propinsi-daerah). Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintahan ini dapat mempunyai keputusan akhir - proses pembuatan yang berbeda, dan hanya beberapa hal pemerintah yang di bawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih tinggi (Lee Robert D, Jr and Ronald W Johson, 1998).

Oleh karena itu dalam memahami berbagai pengaturan pendanaan bagi pemerintah regional (daerah), maka harus mengetahui keragaman fungsi yang dibebankannya. Fungsi-fungsi tersebut dapat digolongkan menjadi lima kelompok, yaitu : (1) Fungsi penyediaan pelayanan yang berorientasi kepada lingkungan dan kemasyarakatan; (2) Fungsi pengaturan, yaitu merumuskan dan menegakkan peraturan perundangan; (3) fungsi pembangunan, yaitu keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan penyediaan prasarana; (4) fungsi perwakilan, yaitu menyatakan pendapat daerah diluar bidang tanggung jawab eksekutif; dan (5) fungsi koordinasi, yaitu melaksanakan koordinasi dan perencanaan investasi dan tataguna tanah regional (daerah) (Davey KJ, 1988).

Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Daerah) di Indonesia, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : (1) pengeluaran rutin, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, rutin daerah, pembayaran bunga dan cicilan dan pengeluaran rutin lainnya ; (2) pengeluaran pembangunan, terdiri dari pembiayaan rupiah dan pembiayaan proyek (Sukanto R, 2001).

Dalam analisa ekonomi pembangunan, kebijakan alokasi anggaran pembangunan merupakan bagian yang sangat penting, karena melalui kebijakan ini dapat diberikan penonjolan terhadap prioritas pembangunan. Penyusunan anggaran di Indonesia yang dilakukan secara sektoral, maka sesuai dengan teori “*Unbalanced Growth*”, bila suatu wilayah masih berada pada permulaan proses pembangunan, maka alokasi anggaran biasanya terkonsentrasi pada sektor pertanian dan kemudian secara bertahap prioritas anggaran akan dipindahkan pada sektor industri (Sjafrizal, 1983). Namun demikian perlu dipertimbangkan potensi dan permasalahan masing-masing daerah. Dengan demikian konsep *space* sangat ditonjolkan dalam konsep sektoral

Terjadinya perubahan pembelanjaan agregat, baik yang berasal dari pengurangan pajak, kenaikan investasi, penambahan pengeluaran pemerintah kenaikan ekspor atau penurunan impor akan mampu mengakibatkan perubahan keseimbangan dalam perekonomian dan perubahan dalam pendapatan nasional. Apabila penambahan pengeluaran pemerintah sebesar  $\Delta G$ , maka kenaikan pendapatan nasional sebesar :

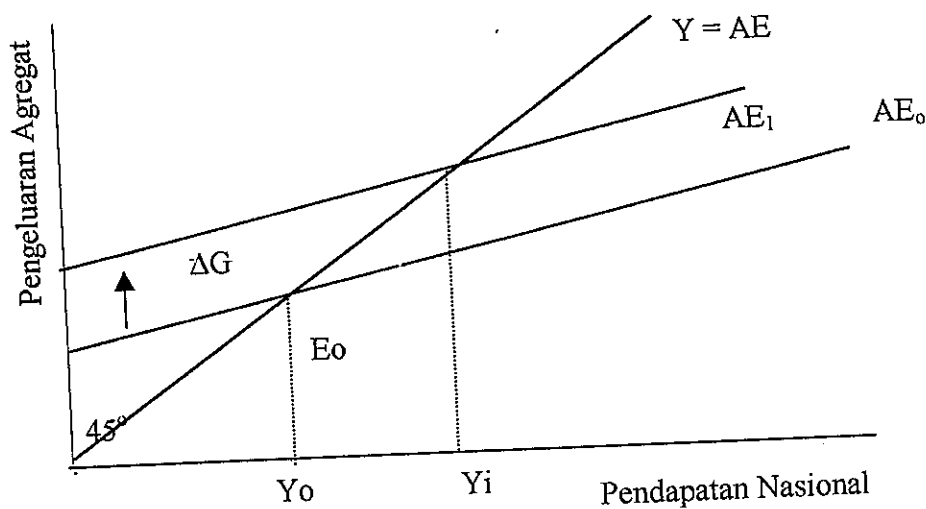
$$Y1 = 1/(1-b) \cdot (a - b T_0 + I_0 + G_0 + \Delta G)$$

$$\Delta Y = Y_1 - Y_0 = 1/(1-b) \cdot \Delta G \quad \dots\dots\dots (6)$$

sedangkan multiplier ( $\alpha$ ) dari perubahan tersebut adalah sebesar

$$\alpha = \Delta Y / \Delta G \text{ atau } 1/(1-b) \quad \dots\dots\dots (7)$$

**Gambar 2.3.**  
**Efek Kenaikan Pengeluaran Pemerintah**



Sumber : Sadono Sukirno, 2000

Dengan demikian hal ini memberikan gambaran bahwa semakin meningkat pengeluaran pemerintah maka menyebabkan semakin meningkatnya pendapatan daerah, karena peningkatan *aggregat demand* akan mendorong kenaikan investasi dan akhirnya akan menyebabkan kenaikan produksi.

Dalam model pertumbuhan endogen, dikatakan bahwa hasil investasi justru akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar. Dengan mengasumsikan bahwa investasi swasta dan publik (pemerintah) dibidang sumberdaya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal

(eksternalitas positif) dan memacu peningkatan produktifitas yang mampu mengimbangi kecenderungan alamiah penurunan skala hasil. Meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting, namun model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa faktor teknologi tersebut tidak perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Implikasi yang menarik dari teori ini adalah mampu menjelaskan potensi keuntungan dari investasi komplementer (*complementary investments*) dalam modal, atau sumberdaya manusia, sarana prasarana infrastruktur atau kegiatan penelitian. Mengingat investasi komplementer akan menghasilkan manfaat personal maupun sosial, maka pemerintah berpeluang untuk memperbaiki efisiensi alokasi sumberdaya domestik dengan cara menyediakan berbagai macam barang publik (sarana infrastruktur) atau aktif mendorong investasi swasta dalam industri padat teknologi dimana sumberdaya manusia diakumulaskannya. Dengan demikian model ini menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan investasi baik langsung maupun tidak langsung.

Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik, maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumberdaya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan semakin meningkatnya produk domestik regional bruto.

Oleh karena itu hipotesis yang dapat dibangun adalah :

Investasi pemerintah diduga berpengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten/kota di Jawa Tengah

#### 2.2.4. Sarana Angkutan

Sarana angkutan merupakan faktor endogen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya sarana angkutan aktivitas perekonomian suatu daerah akan semakin lancar, baik mobilitas barang maupun penumpang. Dengan semakin baiknya sarana angkutan yang ada dalam suatu daerah, maka diharapkan akan lebih meningkatkan mobilitas ekonomi suatu daerah dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Menurut Lincoln Arsyad (1999), bahwa variabel yang mempengaruhi pembangunan daerah adalah sumberdaya alam, tenaga kerja, investasi, entrepreneurship, transportasi, komunikasi, komposisi industri, teknologi, luas daerah, pasar, ekspor, situasi ekonomi internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah pusat dan bantuan-bantuan pembangunan.

Dari model tersebut di atas ternyata variabel transportasi mempunyai peranan dalam pertumbuhan regional, demikian pula dari model pertumbuhan agregat (pertumbuhan dari dalam). Dalam beberapa penelitian empiris sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Arief Hadiono (2001) dan Sofwin Hardiati (2002), menunjukkan bahwa jumlah sarana angkutan umum secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Oleh karena itu hipotesis yang dapat dibangun adalah :

Sarana angkutan diduga berpengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten / kota di Jawa Tengah.

### 2.2.5. Energi Listrik

Sumberdaya listrik merupakan salah satu fasilitas dasar yang merupakan prasyarat bagi pembangunan suatu daerah. Listrik telah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat baik sektor rumah tangga maupun industri. Lebih dari itu listrik memiliki peranan strategis, karena merupakan sumber energi vital untuk menggerakkan sektor kegiatan ekonomi mulai dari kegiatan ekstraksi, produksi, distribusi, konsumsi sampai dengan pembuangan limbah (Suparmoko, 2002).

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 bahwa bumi, air dan seluruh isi didalamnya yang menguasai hajat hidup orang rakyat banyak dikuasai oleh negara, sehingga industri perlistrikan dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara. Di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2001 seluruh desa yang berlistrik dari PLN mencapai 7.875 desa.

Dengan semakin meningkatnya kemajuan teknologi, maka hampir seluruh peralatan produksi di masyarakat menggunakan energi listrik. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan daya listrik tersambung. Apabila diasumsikan bahwa seluruh anggota masyarakat senantiasa menggunakan energi listrik secara produktif, maka semakin meningkatnya daya listrik tersambung akan mampu meningkatkan produktifitas kerja dan akhirnya output.

Oleh karena itu hipotesis yang dapat dibangun adalah :

Energi Listrik diduga berpengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten / kota di Jawa Tengah

### 2.3. Ringkasan Penelitian Terdahulu

1. Kim, Sung Tai, (1997) dalam penelitiannya tentang kasus pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan, menyebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah ( $\Delta Y$ ) merupakan fungsi dari laju pertumbuhan angkatan kerja (didekati dari proxy laju angkatan kerja pada sektor pertambangan dan industri manufaktur) ( $\Delta L$ ), rasio investasi swasta (didekati dari proxy investasi pada sektor industri manufaktur dan pertambangan) terhadap PDRB ( $I_p/Y$ ); rasio investasi pemerintah daerah terhadap PDRB ( $I_g/Y$ ); rasio pengeluaran / konsumsi pemerintah daerah terhadap PDRB ( $G/Y$ ); dan rasio penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari pajak daerah dan penerimaan non pajak terhadap PDRB ( $R/Y$ ), dapat disederhanakan menjadi :

$$\Delta Y = f (\Delta L, I_p/Y, I_g/Y, (G/Y)\Delta G, R/Y) \dots\dots\dots (8)$$

sedangkan modelnya adalah sebagai berikut :

$$\Delta Y = \beta_0 + \beta_k(I_p/Y) + \beta_l^* \Delta L + \gamma_x (I_g/Y) + \gamma_g (G/Y)\Delta G + \theta (R/Y) + \theta D80 + \mu \dots\dots\dots (9)$$

D80 merupakan *variable dummy* tahun 1980 karena Korea tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif karena kekacauan ekonomi dan politik.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara angkatan kerja, investasi swasta, investasi dan konsumsi pemerintah daerah mempunyai pengaruh positif yang signifikan, sedangkan disparitas pendapatan antar daerah

lebih disebabkan oleh sektor swasta (investasi swasta). Hasil estimasi secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1.

2. Neni Pancawati (2000) dalam penelitiannya tentang pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) dengan menggunakan *economic demographic modeling*, menyebutkan bahwa tingkat pertumbuhan *output* (GDP) ( $Y/N_{gr}$ ) merupakan fungsi dari rasio kapital - tenaga kerja ( $Y/N_t$ ); tingkat pendidikan (*gross enrollment ratio*) ( $X_t$ ), tingkat perubahan stok kapital ( $Z_t$ ) dan tingkat pertumbuhan penduduk ( $D_t$ ). Secara sederhana fungsi dapat ditulis :

$$Y/N_{gr} = f(Y/N_t, X_t, Z_t, D_t) \quad \dots\dots\dots (10)$$

Dan model yang digunakan adalah

$$Y/N_{gr} = \beta_0 + \beta_1 Y/N_t + \beta_2 + \beta_3 X_t + \beta_4 Z_t - \beta_4 D_t + \varepsilon \quad \dots\dots\dots (11)$$

Hasil estimasi dengan  $Y/N_{gr}$  sebagai variabel dependen, pada  $\alpha = 0,05$  menghasilkan kesimpulan bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia diikuti oleh peningkatan *gross enrollment ratio*. Pertumbuhan penduduk memberikan tekanan negatif terhadap pertumbuhan output (GDP), namun peningkatan *gross enrollment ratio* tidak mempengaruhi peningkatan output (GDP) secara signifikan.

3. Edi Suandi Hamid (1999), dalam penelitiannya tentang peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi di beberapa negara dengan menggunakan analisa kualitatif menyatakan bahwa peranan pemerintah dalam suatu perekonomian adalah mutlak. Untuk mendukung peran tersebut, maka perlu tersedia kelembagaan yang kuat guna melengkapi dan mengontrol jalannya

lembaga pemerintah tersebut. Untuk mendukung perekonomian suatu negara badan usaha milik negara masih diperlukan untuk melengkapi sektor swasta. Namun dalam penelitian ini tidak mampu menunjukkan atau mengukur seberapa besar peran pemerintah dalam perekonomian di suatu negara.

3. Kawagoe T, (1997), dalam penelitiannya tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan transfer sumberdaya antar daerah di Indonesia, dengan menggunakan alat analisis regresi linier sederhana, menyebutkan bahwa (1) indeks industrialisasi (I) sebagai rasio antara kontribusi sektor industri dengan pertanian terhadap PDRB merupakan fungsi dari *market bases* (MB), dan *Government Bases* (DE). Komponen *market base* adalah investasi dari asing (PMA)(FI) dan investasi dalam negeri (PMDN)(DI). Sedangkan *Government Bases* diukur dari total anggaran pembangunan pemerintah pusat (APBN); (2) Pendapatan perkapita merupakan fungsi dari *market bases* (MB), dan *Government Bases* (DE) Secara sederhana fungsi tersebut dapat ditulis :

$$(1) \quad I = f(\text{MB}, \text{DE}) \quad \dots\dots\dots (12)$$

$$(2) \quad Y = f(\text{MB}, \text{DE}) \quad \dots\dots\dots (13)$$

Dari hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa total investasi domestik dan asing sebagai bentuk dari pertumbuhan ekonomi yang berbasis pasar berperan sebagai pendorong proses industrialisasi, sedangkan pengeluaran pemerintah lebih berdampak pada kesejahteraan.

4. Bambang Kustitunto dan Istikomah, (1999). Dalam penelitiannya tentang peranan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan data *time series* mulai tahun 1977 – 1996, disebutkan

bahwa Produk Domestik Bruto merupakan fungsi dari penanaman modal asing (FDI), Bantuan Luar negeri (AID), dan Tabungan Domestik (S). Secara sederhana dapat ditulis :

$$GDP = f(FDI, AID, S) \dots\dots\dots (14)$$

Dengan menggunakan analisis regresi model statis dan analisis regresi model dinamis, yaitu Error Corection Model/ECM), maka diperoleh kesimpulan bahwa bantuan luar negeri dan tabungan domestik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang., dan investasi asing tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun panjang.

5. Siti Aisyah Tri Rahayu, (2000). dalam penelitiannya tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menyebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah ( $\Delta Y$ ) merupakan fungsi dari laju pertumbuhan angkatan kerja ( $\Delta L$ ), rasio investasi swasta PMA/PMDN yang disetujui terhadap PDRB (IP); rasio investasi pemerintah daerah terhadap PDRB (IG); rasio pengeluaran / konsumsi pemerintah (belanja rutin) daerah terhadap PDRB ((G/Y)  $\Delta G$ ); dan rasio penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari pajak daerah dan penerimaan non pajak terhadap PDRB (R/Y), dapat disederhanakan menjadi :

$$\Delta Y = F(\Delta L, IP/Y, IG/Y, G/Y \Delta G, R) \dots\dots\dots (15)$$

sedangkan modelnya adalah sebagai berikut :

$$\Delta Y = \beta_0 + \beta_1^* \Delta L + \beta_k(IP/Y) + \gamma_x(IG/Y) + \gamma_g(G/Y)\Delta G + \theta (R/Y) + \mu \dots (16)$$

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi swasta dan laju pertumbuhan angkatan kerja tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Tanpa memasukan hasil migas ternyata investasi pemerintah daerah mempunyai efek yang negatif, sedangkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak daerah dan non pajak memberikan efek positif yang signifikan.

Hasil estimasi dari penelitian empiris tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.

6. Arief Hadiono (2001), dalam penelitiannya tentang pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah dengan menggunakan data pooling sampel populasi kabupaten / kota di Jawa Tengah selama tahun 1994 – 1998 menyebutkan bahwa output suatu daerah (PDRB) merupakan fungsi dari investasi pemerintah, penyerapan tenaga kerja dan sarana angkutan umum., dan dapat ditulis sebagai berikut :

$$PDRB = f(TK, INV, AKT) \dots\dots\dots (17)$$

sedangkan modelnya adalah :

$$LPDRB = \beta_0 + \beta_1 LTK_{it} + \beta_2 LINV_{it} + \beta_3 LAKT_{it} + v \dots\dots\dots (18)$$

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Investasi pemerintah (INV), penyerapan angkatan kerja (TK) dan sarana angkutan umum (AKT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil estimasi dari penelitian empiris tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.

7. Sofwin Hardiati (2002), dalam penelitiannya tentang pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah dengan menggunakan data runtut waktu propinsi Jawa Tengah selama tahun 1980 – 2001 menyebutkan bahwa output suatu daerah

(PDRB) merupakan fungsi dari investasi swasta baik asing PMA maupun PMDN, pengeluaran pembangunan pemerintah, jumlah tenaga kerja dan sarana angkutan umum. dapat ditulis sebagai berikut :

$$PDRB = f(LPMA \$, LPMDN, LPPB, LTK, LSAU) \dots\dots\dots (19)$$

sedangkan modelnya adalah :

$$LPDRB = \beta_0 + \beta_1 LPMA \$ + \beta_2 LPMDN + \beta_3 LPPB + \beta_4 LTK + \beta_5 LSAU + v \dots\dots\dots (20)$$

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi swasta baik PMDN, PMA, pengeluaran pembangunan pemerintah, angkatan kerja dan sarana angkutan umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil estimasi dari penelitian empiris tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Perhitungan Model Regresi Hasil Penelitian Sebelumnya**

Variabel	Koefisien	t-hit	Keterangan
<b>1. Kim, Sung Tai</b>			
L	0,1679	3,538	***
Ip/Y	0,1385	2,255	**
Ig/Y	2,2961	3,588	***
(G/Y)G	3,3539	2,301	**
R/Y	-1,7446	2,598	***
D80	-0,1943	10,551	***
$R^2 = 0,4717$		F = 3,488	
<b>2. Neni Pancawati</b>			
Y/Nt	0,61	4,735	**
Xt	0,44	0,643	
Zt	0,37	2,259	**
Dt	-1,00	-1,855	**
$\beta_0$	4,97	1,996	
$R^2 = 0,7549$		F = 23,33	
<b>3. Kawagoe Toshihiko</b>			
I sebagai variabel dependen untuk Tahun 1983			
C	0.231	0.139	
DE	1.239	0.972	
MB	3.201	1.118	**
$adj R^2 = 0,2.89$			
I sebagai variabel dependen untuk Tahun 1990			
C	0.224	0.195	
DE	-0.712	0.574	
MB	0.450	0.083	**
$adj R^2 = 0,522$			
Y sebagai variabel dependen, untuk tahun 1983			
C	0.509	0.107	
DE	1.409	0.778	*
MB	1.482	0.902	
$Adj R^2 = 0.647$			
Y sebagai variabel dependen, untuk tahun 1990			
C	0,314	0,128	
DE	0,963	0,321	**
MB	0,267	0,065	**
$Adj R^2 = 0.579$			

<b>4. Siti Aisyah Tri Rahayu</b>			
Y tanpa migas sebagai variabel dependen			
L	1.77E-0.5	0.239	
Ip/Y	0.001	0.149	
Ig/Y	-0.017	-3.711	***
(G/Y)G	-0.005	-0.893	
R/Y	0.002	2,005	**
adj R <sup>2</sup> = 0,99		F = 67193.44	
Y dengan migas sebagai variabel dependen			
L	2.262	1.538	
Ip/Y	-2.973	-3.133	***
Ig/Y	3.900	3.977	***
(G/Y)G	-1.436	-8.471	***
R/Y	-16.225	-4.852	***
adj R <sup>2</sup> =0.26		F = 30.2644	
<b>5. Arief Hadiono (2001)</b>			
C	2.6996	4.0679	***
LTK	0.6048	10.2057	***
LINV	0.0688	2.4860	**
LAKT	0.3160	5.0231	***
adj R <sup>2</sup> = 0.6269		F-hit = 98.4925	
<b>6. Sofwin Hardiati (2002)</b>			
C	1.2861	0.0485	
LPMA	0.0298	3.0638	***
LPMDN	0.0455	3.3748	***
LPPB	0.1647	7.1721	***
LTK	0.6273	3.6221	***
LSAU	0.2842	7.3398	***
adj R <sup>2</sup> =0.999		F-hit = 10588.53	

Sumber : Kim, Sung Tai (1997), Neni Pancawati (2000), Kawagoe T (1997), Siti Aisyah Tri Rahayu (2000), Arief Hadiono (2001), Sofwin Hardiati (2002).

Keterangan :

\*\*\* signifikan pada taraf 1 %

\*\* signifikan pada taraf 5 %

## 2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis

### Model Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik (*Solow neoclassical growth model*)

Dalam model pertumbuhan ekonomi neoklasik ini maka fungsi produksi agregat standart adalah sama seperti yang digunakan dalam persamaan sektor modern Lewis, yakni :

$$Y = Ae^{ut} K^\alpha L^{1-\alpha} \dots\dots\dots (21)$$

Keterangan :

- Y : produk domestik regional bruto
- K : stok modal fisik dan modal manusia
- L : tenaga kerja non terampil
- A : suatu konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar

Dalam penelitian ini PDRB Kabupaten /kota sebagai Y, stok modal diproksikan dengan investasi, tenaga kerja non terampil diproksikan dengan angkatan kerja yang sedang bekerja, investasi swasta (IS) dan investasi pemerintah daerah (IG), sebagai K; angkatan kerja yang sedang bekerja sebagai L; sarana angkutan (SA) dan listrik (EL) sebagai A, maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = f(L, IS, IG, SA, EL) \dots\dots\dots (22)$$

Dari persamaan (21) dan (22), maka diperoleh :

$$Y = A L^{\alpha_1} IS^{\alpha_2} IG^{\alpha_3} SA^{\alpha_4} EL^{\alpha_5} \dots\dots\dots (23)$$

Untuk memperoleh linier dari persamaan (23) tersebut diatas, maka persamaan tersebut dilinierkan dengan menggunakan log, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Log Y} = & \alpha_0 + \alpha_1 \text{Log L} + \alpha_2 \text{Log IS} + \alpha_3 \text{Log IG} + \alpha_4 \text{Log SA} + \alpha_5 \text{Log EL} \\ & + \text{et} \dots\dots\dots \end{aligned} \quad (24)$$

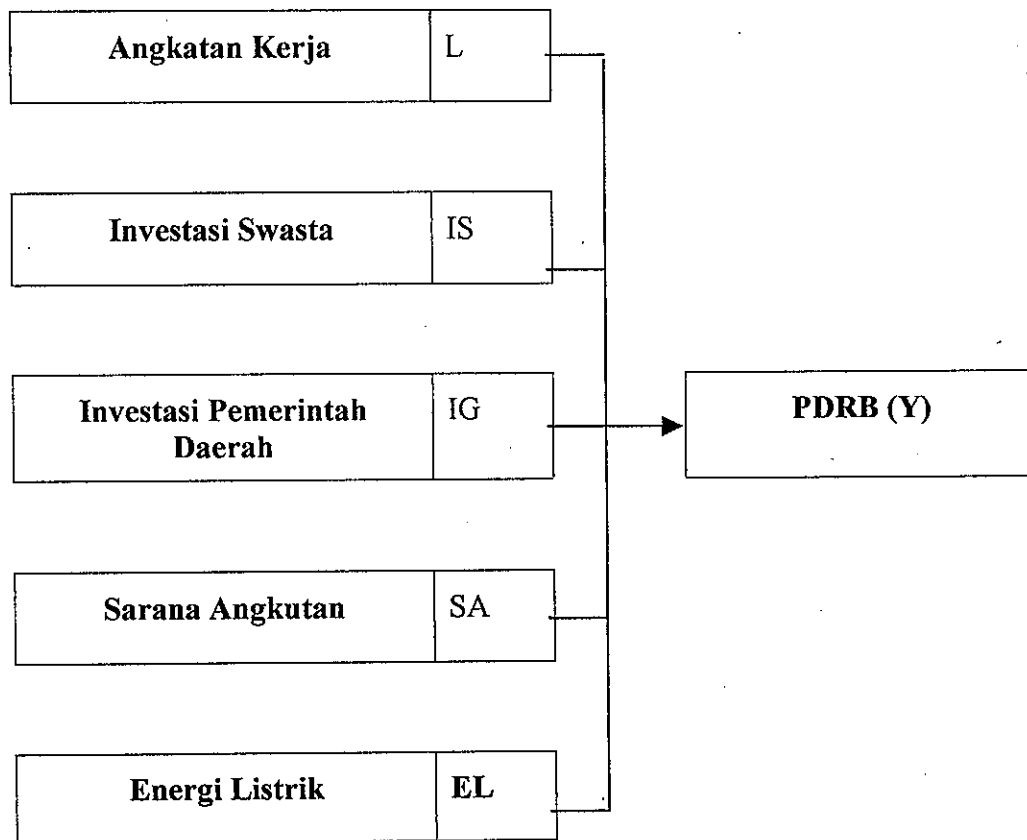
Keterangan :

- Y : Produk Domestik Regional Bruto
- L : Angkatan Kerja
- IS : Investasi swasta
- IG : Investasi pemerintah daerah
- SA : Sarana angkutan
- EL : Energi listrik
- et : variabel gangguan
- $\alpha$  : konstanta

### 2.4.3. Bagan

Kerangka pemikiran teoritis dari permodelan yang disusun dapat sederhanakan dalam bagan sebagaimana Gambar 2.4..

**Gambar 2.4**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



## 2.5. Hipotesis

Beberapa hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga angkatan kerja yang sedang bekerja berpengaruh (L) positif terhadap PDRB Kabupaten / kota di Jawa Tengah
2. Diduga investasi swasta nasional (IS) berpengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten / kota di Jawa Tengah
3. Diduga investasi pemerintah daerah (IG) berpengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten / kota di Jawa Tengah
4. Diduga sarana angkutan (SA) berpengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten / kota di Jawa Tengah
5. Diduga energi listrik (EL) berpengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten / kota di Jawa Tengah

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data pooling atau gabungan dari data silang tempat (*cross section*) yaitu data dari 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah dan data runtut waktu (*time-series*) dari tahun 1995 sampai dengan 2001 (7 tahun), sehingga dihasilkan jumlah observasi (N) sebanyak 245.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Biro Keuangan SETDA Propinsi Jawa Tengah, Badan Penanaman Modal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan data yang diperlukan meliputi :

1. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/kota se Jawa Tengah atas dasar harga konstan tahun 1993
2. Data angkatan kerja (L) menurut Kabupaten/kota se Jawa Tengah.
3. Data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurut Kabupaten/kota se Jawa Tengah
4. Data investasi pada sub sektor industri kecil dan menengah menurut Kabupaten/kota se Jawa Tengah.
5. Data realisasi pengeluaran pembangunan pemerintah daerah kabupaten/kota se Jawa Tengah.
6. Data sarana angkutan menurut Kabupaten/kota se Jawa Tengah.
7. Data Energi Listrik menurut Kabupaten/kota se Jawa Tengah

### 3.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data melalui buku-buku, dokumentasi, bahan laporan instansi serta sumber-sumber yang dihimpun oleh pihak lain.

### 3.3. Teknis Analisis

**Spesifikasi Model.** Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah dari model pertumbuhan ekonomi neoklasik Solow (*Solow neoclassical growth model*), maka fungsi produksi agregat standart adalah sama seperti yang digunakan dalam persamaan sektor modern Lewis, yakni :

$$Y = Ae^{ht} K^\alpha L^{1-\alpha} \dots\dots\dots (25)$$

Keterangan :

- Y : produk domestik regional bruto
- K : stok modal fisik dan modal manusia
- L : tenaga kerja non terampil
- A : suatu konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar

Sehubungan tidak tersedianya data stok modal fisik dan manusia, maka diproksikan dengan data investasi yang terjadi didaerah, yaitu investasi yang berasal dari swasta dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Demikian juga dengan data tenaga non trampil yang tidak tersedia, maka diproksikan dengan jumlah angkatan kerja yang sedang bekerja.

Dengan asumsi bahwa PDRB Kabupaten /kota sebagai Y, investasi swasta (IS) dan investasi pemerintah daerah (IG), sebagai K; sarana angkutan (SA) dan listrik

(EL) sebagai A, angkatan kerja sebagai L, maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = f(L, IS, IG, SA, EL) \dots\dots\dots (26)$$

Dari persamaan (25) dan (26), maka diperoleh :

$$Y = A L^{\beta_1} IS^{\beta_2} IG^{\beta_3} SA^{\beta_4} EL^{\beta_5} \dots\dots\dots (27)$$

Untuk memperoleh linier bentuk dari persamaan (27) tersebut diatas, maka persamaan tersebut dilinierkan dengan menggunakan log, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\text{Log } Y = \beta_0 + \beta_1 \text{ Log } L + \beta_2 \text{ Log } IS + \beta_3 \text{ Log } IG + \beta_4 \text{ Log } SA + \beta_5 \text{ Log } EL + e_t \dots\dots\dots (28)$$

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi yang terjadi selama masa pengamatan, yaitu adanya krisis ekonomi pada tahun 1997, maka digunakan variabel dummy (D1), di mana waktu sebelum krisis (1995 – 1997) diberikan nilai 0 dan waktu sesudahnya diberikan nilai 1, sehingga diperoleh persamaan akhir sebagai berikut :

$$\text{Log } Y = \beta_0 + \beta_1 \text{ Log } L + \beta_2 \text{ Log } IS + \beta_3 \text{ Log } IG + \beta_4 \text{ Log } SA + \beta_5 \text{ Log } EL + \beta_6 D1 + e_t \dots\dots\dots (29)$$

Keterangan :

- Y : produk domestik regional bruto Kabupaten/kota (juta rupiah)
- L : angkatan kerja (orang)
- IS : investasi swasta nasional (juta rupiah)
- IG : investasi pemerintah daerah (juta rupiah)
- SA : sarana angkutan (unit)
- EL : Energi listrik (KVA)
- D1 : kondisi krisis ekonomi tahun 1997 ( sesudah krisis = 1; dan nilai=0

- untuk kondisi lainnya
- $\beta_0$  : konstanta
- $\epsilon_t$  : variabel gangguan (residual)

### 3.4. Definisi Operasional Variabel

Untuk memudahkan pemahaman akan variabel yang diteliti, maka dijelaskan dalam definisi operasional yang digunakan. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi disuatu daerah dalam waktu tertentu (Rp/th); Data PDRB digunakan adalah PDRB atas harga konstan tahun 1993 tanpa migas Data PDRB dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp).
2. Angkatan kerja (L) adalah jumlah angkatan kerja yang sedang bekerja di suatu daerah, yaitu mencakup orang berusia diatas 10 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu dengan maksud untuk mencari penghasilan. Dengan demikian penduduk usia kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan tidak termasuk dalam kriteria angkatan kerja ini. Satuan jumlah angkatan kerja dinyatakan dalam satuan orang. Data jumlah angkatan kerja diperoleh dari Jawa Tengah Dalam Angka yang dikeluarkan oleh BPS Jawa Tengah.
3. Investasi Swasta (IS) adalah jumlah investasi swasta, yang merupakan jumlah keseluruhan investasi swasta meliputi : investasi dengan fasilitas PMDN dan investasi non fasilitas pada sub sektor industri kecil dan menengah. dinyatakan

dalam satuan jutaan rupiah (Rp). Data investasi swasta non fasilitas tersebut diperoleh dari BPS dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah, sedangkan data mengenai realisasi investasi swasta dengan fasilitas PMDN diperoleh dari Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Tengah.

4. Investasi Pemerintah Daerah (IG) adalah besarnya pengeluaran anggaran pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota. Besarnya investasi pemerintah daerah diprosikan dari data APBD "Pembangunan" Kabupaten/Kota, sedangkan anggaran pembangunan yang berasal dari APBN dan APBD Propinsi tidak dimasukkan. Hal ini disebabkan karena anggaran pembangunan yang berasal dari APBN, dana Inpres dan APBD Propinsi yang dilaksanakan per Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah tidak dipublikasikan, sehingga untuk mendapatkan datanya belum memungkinkan untuk dilakukan. Besarnya pengeluaran anggaran pembangunan pemerintah daerah dinyatakan dalam satuan jutaan rupiah (Rp). Data tersebut diperoleh Ringkasan APBD Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang disusun oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah.
5. Sarana Angkutan (SA) adalah jumlah kendaraan motor wajib uji, yang meliputi mobil penumpang (termasuk di dalamnya mobil, bus baik umum maupun tidak umum) mobil barang (termasuk didalamnya truk, tangki dan pick-up), kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempel. Sarana angkutan yang berupa kendaraan pribadi (tidak umum) yang tidak memiliki kewajiban menjalankan wajib uji (kir) tidak dapat dimasukkan karena tidak tersedianya data menurut kabupaten/kota. Data sarana angkutan dinyatakan

dalam satuan unit, dan diperoleh dari Jawa Tengah Dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah.

6. Energi Listrik (EL) adalah besarnya daya listrik tersambung yang terjual oleh PT PLN Distribusi Jawa Tengah. Data tersebut dinyatakan dalam satuan Kilo Volt Ampere (KVA). Energi listrik yang berpengaruh terhadap output suatu daerah adalah energi listrik yang digunakan untuk kegiatan produktif seperti industri, perkantoran, dan usaha. Sedangkan dari jenis pelanggan rumah tangga dan penerangan umum kurang memberikan pengaruh terhadap output suatu daerah secara langsung. Namun karena ketidakterseidannya data penggunaan energi listrik (daya listrik tersambung) dari jenis pelanggan tersebut menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah, maka data energi listrik diproyksi dari daya listrik tersambung secara total. Data tersebut berasal dari Jawa Tengah Dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Tengah

### 3.5. Uji Ekonometrik

Data yang digunakan adalah data panel, dimana penggunaan data panel ini adalah untuk meningkatkan jumlah sampel populasi ( $n$ ), sehingga akan memperbesar derajat bebas dari penelitian yang dilaksanakan. Untuk dapat menggunakan suatu persamaan dari hasil penelitian empiris yang dilakukan sebagai persamaan yang baik, maka perlu dilakukan dengan uji asumsi klasik, untuk mengetahui bahwa persamaan tersebut telah terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan outokorelasi.

**3.5.1. Uji Asumsi Klasik** Uji ekonometrik merupakan uji adanya penyimpangan asumsi klasik. Uji ini untuk melihat apakah hasil estimasi yang diperoleh memiliki perkiraan yang linier, tidak bias dan varians kecil. Uji ini meliputi. :

- Uji Multikolinieritas, adalah suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai  $R^2$ , F hitung dan t-hitung. Dimana apabila nilai  $R^2$  dan F hitung tinggi namun t hitung banyak yang tidak signifikan maka dapat diduga data yang ada mengalami gangguan multikolinieritas. Pengujian multikolinieritas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara regresi parsial, yaitu dengan melakukan *auxiliary regression* antar variabel independen, kemudian membandingkan nilai  $R^2$  dari *auxiliary regression* dengan  $R^2$  model utama. Jika nilai  $R^2$  dari *auxiliary regression* lebih tinggi dari nilai  $R^2$  model utama, maka berarti didalam model utama terdapat multikolinieritas. Sebaliknya bila nilai  $R^2$  dari *auxiliary regression* lebih rendah dari nilai  $R^2$  model utama maka berarti tidak ada multikolinieritas antar variabel dalam persamaan tersebut.
- Uji autokorelasi. Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan (*error*) pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada periode lainnya. Autokorelasi biasanya yang muncul pada data runtut waktu (*time series*). Namun demikian tidak menutup kemungkinan data silang

tempat juga mengalami masalah dalam autokorelasi, Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji *Breusch-Gofrey*. (Uji B-G).

Untuk menentukan uji ini maka dilakukan regresi dengan persamaan

$$u_t = \rho_1 u_{t-1} + \rho_2 u_{t-2} + \dots + \rho_p u_{t-p} + e_t \quad \dots \dots \dots (30)$$

dengan menghitung nilai  $R^2$  untuk menghitung  $X^2$ , di mana

$$X^2 = n * R^2 \quad \dots \dots \dots (31)$$

$N$  = jumlah observasi (sampel)

Hipotesa nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $\rho$ ) sama dengan nol, atau  $H_0 : \rho_i = 0$  artinya bahwa variabel dalam persamaan terjadi terjadi otokorelasi;

Hipotesa alternatif ( $H_a$ ) parameter tidak sama dengan nol atau  $H_a : \rho_i \neq 0$  artinya bahwa variabel dalam persamaan terjadi tidak terjadi otokorelasi;

Pengujian hipotesa adalah :

- ❖ Jika nilai  $X^2$  -hitung > nilai  $X^2$ -tabel, maka hipotesa yang menyatakan bahwa tidak ada otokorelasi ditolak;
- ❖ Jika nilai  $X^2$  -hitung < nilai  $X^2$ -tabel, maka hipotesa yang menyatakan bahwa dalam persamaan tidak ada otokorelasi tidak dapat ditolak.

Untuk melihat ada tidaknya autokorelasi juga dapat dilihat dari besarnya nilai probabilitas dari  $n * R^2$ , bila nilai probabilitasnya lebih besar dari taraf alpha yang ditentukan ( 5 %), maka berarti adanya autokorelasi dalam persamaan regresi tersebut ditolak dengan kata lain tidak terjadi autokorelasi.

- Uji Heterokedastisitas. Heterokedastisitas adalah keadaan dimana gangguan pada persamaan persamaan regresi tidak mempunyai varians yang sama untuk semua observasi. Akibat dari adanya heterokedastisitas menjadi tidak tidak efisien. Suatu model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan uji *white heteroskedastisitas* (*White heteroskedasticity test*). Untuk menentukan uji ini maka dilakukan dengan menghitung nilai  $R^2$  untuk menghitung  $X^2$ , di mana

$$X^2 = n * R^2 \dots\dots\dots (32)$$

$N$  = jumlah observasi (sampel)

Hipotesa nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $\mu$ ) sama dengan nol, atau  $H_0 : \mu_i = 0$  artinya bahwa residual dari persamaan regresi tersebut mempunyai varians yang tidak sama untuk setiap observasi (heteroskedastisitas);

Hipotesa alternatif ( $H_a$ ) parameter tidak sama dengan nol atau  $H_a : \mu_i \neq 0$  artinya bahwa residual dari persamaan regresi tersebut mempunyai varians yang sama untuk setiap observasi (homoskedastisitas); Pengujian hipotesa adalah :

- ❖ Jika nilai  $X^2$  -hitung  $>$  nilai  $X^2$ -tabel, maka hipotesa yang menyatakan bahwa residual dari persamaan adalah homoskedastisitas ditolak;

❖ Jika nilai  $X^2$  -hitung < nilai  $X^2$ -tabel, maka hipotesa yang menyatakan bahwa residual dari persamaan adalah homoskedastisitas tidak dapat ditolak

Untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas juga dapat dilihat dari besarnya nilai probabilitas dari  $n * R^2$ , bila nilai probabilitasnya lebih besar dari taraf alpha yang ditentukan (5%), maka berarti adanya heteroskedastisitas dalam persamaan regresi tersebut ditolak dengan kata lain tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam persamaan tersebut.

- Uji Linieritas. Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang kita gunakan sudah benar aatau tidak, apakah fungsi yang kita gunakan dalam penelitian empiris benar berbentuk linier atau tidak. Sedangkan uji linieritas yang digunakan pada penelitian ini adalah uji Ramsey (Ramsey RESET Test).

Dengan memasukkan fitted  $Y_t$ , sebagai variabel tambahan pada variabel bebas, maka akan diperoleh nilai  $R^2_{new}$ , kemudian menghitung F-hitung dengan rumus

$$F = \frac{(R^2_{new} - R^2) / m}{(1 - R^2_{new}) / (n - k)} \dots\dots\dots (33)$$

Keterangan :

- m = jumlah variabel bebas yang baru masuk
- n = jumlah data/ observasi
- k = banyaknya parameter dalam persamaan baru

**3.5.2. Uji Statistik.** Setelah model yang ada terbebas dari adanya penyimpangan asumsi klasik, maka dapat dilakukan analisa terhadap model yang ada, yaitu dengan menganalisa nilai dari F hitung, t hitung, dan koefisien determinasi hasil perhitungan dari persamaan regresi yang diperoleh.

- Uji F (F-test). Untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan antara nilai F-hitung dengan F-tabel. Di mana nilai F-hitung diperoleh dari :

$$F = \frac{SSR / k}{SSE / n-(k-1)} \dots\dots\dots (34)$$

Keterangan

- SSR : Sum of Square Regression
- SSE : Sum of Square Error
- N : jumlah observasi (sampel)
- k : jumlah variabel independent

F- Hipotesa nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $\beta_1$ ) sama dengan nol, atau

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_k = 0$  artinya bahwa seluruh variabel independen / bebas dari persamaan regresi tersebut secara simultan bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependennya.

Hipotesa alternatif ( $H_a$ ) parameter tidak sama dengan nol atau

$H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \dots \neq \beta_k \neq 0$  artinya bahwa variabel independen /bebas dari persamaan regresi tersebut secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependennya. Pengujian hipotesa adalah :

- ❖ Jika nilai F-hitung < nilai F-tabel, maka hipotesa ( $H_0$ ) diterima

- ❖ Jika nilai  $F$ -hitung  $>$  nilai  $F$ -tabel, maka hipotesa ( $H_0$ ) ditolak;
- **Uji t (t-test).** Untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individu, dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Dalam penelitian ini ada 6 variabel, sehingga

Hipotesa nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $\beta_i$ ) sama dengan nol, atau

$$H_0 : \beta_1 = 0 \text{ dan } H_a : \beta_1 \neq 0$$

$$H_0 : \beta_2 = 0 \text{ dan } H_a : \beta_2 \neq 0$$

$$H_0 : \beta_3 = 0 \text{ dan } H_a : \beta_3 \neq 0$$

$$H_0 : \beta_4 = 0 \text{ dan } H_a : \beta_4 \neq 0$$

$$H_0 : \beta_5 = 0 \text{ dan } H_a : \beta_5 \neq 0$$

$$H_0 : \beta_6 = 0 \text{ dan } H_a : \beta_6 \neq 0$$

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_k = 0$  artinya bahwa variabel independen /bebas dari persamaan regresi tersebut bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependennya.

Hipotesa alternatif ( $H_a$ ) parameter tidak sama dengan nol atau

$H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \dots \neq \beta_k \neq 0$  artinya bahwa variabel independen /bebas dari persamaan regresi tersebut secara individu merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependennya. Pengujian hipotesa adalah :

- ❖ Jika nilai  $t$ -hitung  $<$  nilai  $t$ -tabel, maka hipotesa ( $H_0$ ) diterima
- ❖ Jika nilai  $t$ -hitung  $>$  nilai  $t$ -tabel, maka hipotesa ( $H_0$ ) ditolak;
- **Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).** Merupakan ukuran yang menyatakan bahwa proporsi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen, karena memberikan suatu ukuran keseluruhan sejauhmana variasi dalam suatu variabel menentukan variasi dalam variabel lainnya.

Adjusted  $R^2$  secara umum memberikan hukuman terhadap penambahan variabel bebas yang tidak mampu menambah daya prediksi suatu model. Nilai adjusted  $R^2$  tidak akan pernah melebihi nilai  $R^2$ , bahkan akan turun jika penambahan variabel bebas yang tidak perlu.

- **Uji Chow (*Chow test*)**. Untuk mengetahui apakah model regresi linier dari penelitian empiris kedua kondisi sebelum dan sesudah terjadinya krisis adalah sama maka dilakukan dengan uji chow (*Chow-test*). Adapun tahap dalam pengujian chow adalah sebagai berikut :

- ❖ Periode penelitian dibagi dalam dua periode, yaitu sebelum krisis (1995 – 1997) sebagai periode I dan sesudah krisis (1998-2001) sebagai periode II.
- ❖ Untuk tiap-tiap periode dihitung nilai koefisiennya dan nilai estimasi *Residual Sum of Squares (RSS)*. Nilai RSS periode I disebut  $S_1$  dan RSS periode II disebut  $S_2$ . Nilai  $S_1$  dan  $S_2$  dijumlahkan dan diberi notasi  $S_3$ . Nilai RSS dari regresi secara keseluruhan diberi konotasi  $S_4$ , sedangkan selisih nilai  $S_4$  dan  $S_3$  diberi konotasi  $S_5$  ( $S_5 = S_4 - S_3$ )
- ❖ Menghitung nilai F-hitung dengan rumus :

$$F = \frac{S_5/k}{S_3/(n_1+n_2-2k)} \dots\dots\dots (35)$$

- ❖ Kriteria penyimpulan :

Apabila nilai F hitung > nilai F tabel (signifikan  $\alpha = 5 \%$ ), maka disimpulkan bahwa nilai koefisien (BETA) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya berbeda antara sebelum dan sesudah masa krisis ekonomi.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

#### 4.1. Keadaan Wilayah

Jawa Tengah sebagai salah satu propinsi di Jawa yang terletak antara  $5^{\circ} 40'$  dan  $8^{\circ}30'$  Lintang Selatan dan antara  $108^{\circ}30'$  dan  $111^{\circ}30'$  Bujur Timur (termasuk Kepulauan Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 (tidak termasuk Kepulauan Karimunjawa). Luas Wilayah Jawa Tengah pada tahun 2001 tercatat sebesar 3.254.412 hektar. Batas wilayah Jawa Tengah adalah sebagai berikut, sebelah utara laut Jawa, sebelah timur Propinsi Jawa Timur, sebelah selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra Indonesia, serta sebelah barat Propinsi Jawa Barat. Posisi strategis ini memberikan keuntungan sekaligus memberikan kerugian secara ekonomis karena menerima beban bagi arus lalu lintas yang ada.

Sampai dengan tahun 2001 Propinsi Jawa Tengah secara administratif terbagi dalam 35 Kabupaten/Kota, dimana terdapat 29 Kabupaten dan 6 Kota, yang terdiri dari 553 Kecamatan meliputi 7.869 desa dan 681 kelurahan. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas wilayah 213.851 hektar (6,57 % dari luas Jawa Tengah), sedangkan Kota terluas adalah Kota Semarang dengan luas 37.367 hektar (1,15 % dari luas Jawa Tengah). Kabupaten tersempit adalah Kabupaten Kudus dengan luas wilayah 42.512 hektar (1,31 % luas Jawa Tengah), sedangkan kota tersempit adalah kota Magelang dengan luas 1.812 hektar (0,06 % dari luas Jawa Tengah).

Pada tahun 2001 tataguna lahan di Jawa Tengah terdiri dari 999 ribu hektar (30,70 %) lahan sawah dan 2,26 juta hektar (69,30 %) bukan lahan sawah. Dari keseluruhan lahan sawah yang ada 38,48 % berpengairan teknis, dan selebihnya setengah teknis, sederhana dan tadah hujan. Sedangkan yang digunakan untuk bangunan dan pekarangan seluas 581.491 ha atau 17,9 %.

Sumber tambang di Jawa Tengah relatif melimpah., terutama bahan galian golongan C telah banyak diusahakan dan telah memberikan sumbangan pada penerimaan pendapatan daerah. Jenis-jenis bahan galian golongan C tersebut antara lain batu kapur, tanah liat, batu andesit, pasir sungai, pasir urug batu kali dan sirtu

#### **4.2. Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah**

Secara umum struktur ekonomi di Jawa Tengah selama tahun 1995 sampai dengan 2001 masih didominasi oleh sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Sektor Pertanian. Dari ketiga sektor mampu memberikan kontribusi lebih dari 80 % terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah. Seperti terlihat pada Tabel 4.1, bahwa kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, bangunan keuangan dan jasa pada tahun 2001 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 1995. Sedangkan kontribusi sektor pertambangan, listrik, perdagangan dan pengangkutan mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 1995.

**Tabel 4.1.**  
**PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993**  
**Propinsi Jawa Tengah Tahun 1995 dan 2001 (Jutaan Rupiah)**

Lapangan Usaha	Tahun 1995		Tahun 2001	
	Nilai	%	Nilai	%
Pertanian	10,631,588.86	22.82	8,598,967.98	20.33
Pertambangan	527,281.54	1.13	642,027.09	1.52
Industri Pengolahan	14,863,277.45	31.91	12,819,594.90	30.30
Listrik	331,214.04	0.71	509,108.39	1.20
Bangunan	1,982,583.28	4.26	1,693,045.33	4.00
Perdagangan	9,631,030.91	20.67	10,092,087.90	23.85
Pengangkutan	1,721,990.22	3.70	2,219,896.60	5.25
Keuangan	2,274,679.52	4.88	1,622,747.76	3.84
Jasa	4,622,387.09	9.92	4,107,700.47	9.71
Jumlah	46,586,032.91	100.00	42,307,177.42	100.00

*Sumber : BPS, Pendapatan Regional Jawa Tengah, Tahun 1995 dan 2001*

Berdasarkan data PDRB Kabupaten / Kota di Jawa Tengah menurut lapangan usaha tahun 2001 (seperti terlihat pada Lampiran 4), bahwa secara umum keempat sektor yaitu pertanian, industri pengolahan perdagangan dan jasa mampu memberikan kontribusi diatas 50 %. Kota-kota di Jawa Tengah secara umum peranan sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB relatif kecil, sedangkan sektor yang dominan adalah industri, perdagangan dan jasa-jasa. Khusus kota Magelang sektor yang dominan adalah sektor jasa-jasa, angkutan dan konstruksi.

Sektor Pertanian memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB pada Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen Wonosobo, Magelang, Boyolali, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Demak, Temanggung, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB pada

Kabupaten Cilacap, Karanganyar, Kudus, Jepara, Kendal, Batang, Pekalongan, Kota Surakarta, dan Kota Pekalongan. Sektor Jasa-jasa memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB pada Kabupaten Klaten, Kota Semarang dan Kota Tegal. Khusus untuk Kota Magelang kontribusi pembentukan PDRB berasal dari sektor Jasa-jasa (36,37 %), Angkutan (21,47 %), dan Konstruksi (12,61 %).

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antar Kabupaten / Kota di Jawa Tengah dapat diukur dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kabupaten / kota di Jawa Tengah. Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa Kota Semarang merupakan daerah yang mampu menyumbangkan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Jawa Tengah. Nilai rata-rata kontribusi Kota Semarang dalam pembentukan PDRB Jawa Tengah pada tahun 1995 – 2001 yakni mencapai 13.8 % dari total PDRB Jawa Tengah atau rata-rata 5,134,398.97 juta rupiah pertahun disusul kemudian Kabupaten Kudus 8.58 % (3,188,595.25 juta), Cilacap 5.66 % (2,105,031.24 juta), Kendal 4.17 % (1,548,724.84 juta rupiah), Kota Surakarta 3.54 % (1,315,218.04 juta rupiah), Klaten 3.26 % (1,211,827.72 juta rupiah), dan Karanganyar 3.17 % (1,177,253.31 juta rupiah).

Dari ketujuh Kabupaten/kota tersebut mampu menyumbangkan 42,18 % Sedangkan Kota yang memberikan kontribusi terkecil adalah Kota Salatiga (rata-rata hanya 0,66 % dari PDRB Propinsi Jawa Tengah).

Tabel 4.2.

**Besarnya Nilai Rata-rata PDRB, Distribusi PDRB dan PDRB Perkapita  
Kabupaten/kota di Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 1993  
Tahun 1995 - 2001**

No	Kabupaten/kota	Rata-rata PDRB (Juta Rp)	Rata-rata Distribusi (%)	Rata-rata PDRB/Kap (Juta Rp)
1	Cilacap	2,105,031.24	5.66	3.644
2	Banyumas	1,012,677.50	2.73	0.699
3	Purbalingga	611,669.00	1.65	0.748
4	Banjarnegara	848,239.75	2.28	1.009
5	Kebumen	910,969.71	2.45	0.762
6	Purworejo	674,763.47	1.82	0.904
7	Wonosobo	523,196.78	1.41	0.719
8	Magelang	1,027,496.70	2.77	0.954
9	Boyolali	914,032.63	2.46	1.005
10	Klaten	1,211,827.72	3.26	1.020
11	Sukoharjo	1,118,467.51	3.01	1.456
12	Wonogiri	761,080.95	2.05	0.694
13	Karanganyar	1,177,253.31	3.17	1.524
14	Sragen	694,499.38	1.87	0.799
15	Grobogan	735,798.27	1.98	0.571
16	Blora	670,535.59	1.81	0.863
17	Rembang	496,299.88	1.34	0.904
18	Pati	940,158.41	2.53	0.818
19	Kudus	3,188,595.25	8.58	4.753
20	Jejara	941,506.82	2.53	1.057
21	Demak	740,867.65	1.99	0.806
22	Semarang	1,066,272.42	2.87	1.301
23	Temanggung	689,483.80	1.86	1.071
24	Kendal	1,548,724.84	4.17	1.807
25	Batang	724,645.78	1.95	1.132
26	Pekalongan	852,055.03	2.29	1.113
27	Pemalang	1,041,294.46	2.80	0.853
28	Tegal	889,312.98	2.39	0.667
29	Brebes	1,275,558.37	3.43	0.796
30	Kota Magelang	308,308.35	0.83	2.660
31	Kota Surakarta	1,315,218.04	3.54	2.512
32	Kota Salatiga	243,812.50	0.66	1.686
33	Kota Semarang	5,134,398.97	13.80	4.046
34	Kota Pekalongan	423,258.75	1.14	1.683
35	Kota Tegal	344,924.66	0.93	1.465
	Rata-rata	1,061,778.18		1.33759
	Jawa Tengah	38,354,385.80		1.26382

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, Pendapatan Regional Jawa Tengah, 1995-2001 diolah.

### 4.3. PDRB Perkapita di Jawa Tengah

PDRB perkapita merupakan salah satu ukuran dari tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Dengan membagi besarnya PDRB dari suatu daerah jumlah penduduk pada suatu waktu tertentu, maka dapat diperoleh angka PDRB/kapita dari suatu daerah. Besarnya PDRB /kapita Jawa Tengah pada tahun 2001 adalah sebesar Rp 1.356.627,15 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 38.062,57 dibandingkan dengan nilai PDRB perkapita tahun 1995 yang besarnya Rp. 1.318.564,58 atau mengalami kenaikan sebesar 2,89 % selama enam tahun. Suatu kenaikan yang relatif kecil karena rata-rata kenaikan pertahunnya hanya 0,489 % . Sedangkan nilai rata-rata PDRB perkapita propinsi Jawa Tengah antara tahun 1995 – 2001 adalah sebesar 1,33759 juta rupiah pertahun.

Besarnya nilai PDRB perkapita Kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.2. Berdasarkan Tabel 4.2. tersebut, dapat diketahui bahwa lima besar kabupaten/kota yang memiliki rata-rata PDRB perkapita tertinggi selama tahun 1995-2001 berturut turut adalah Kudus (4.753 juta rupiah/kapita/th), Kota Semarang (4.046 juta rupiah /kapita/th), Kabupaten Cilacap 3.644 juta rupiah/kapita/tahun), Kota Magelang (2.660 juta rupiah/kapita/th), Kota Surakarta (2.512 juta rupiah/kapita/th), dan Kota Salatiga (1.686 juta rupiah/kapita/th), sedangkan kabupaten/kota dengan rata-rata PDRB perkapita terendah adalah Grobogan (0.571 juta rupiah/kapita/th). Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki PDRB perkapita di atas PDRB perkapita Jawa Tengah, adalah, Kudus, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Cilacap Sukoharjo, Semarang, Kendal, dan Karanganyar.

#### 4.4. Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah

Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama kurun waktu 7 tahun, yaitu pada tahun 1995 sampai 2001 secara rata-rata 1.56 % pertahun. Dari Lampiran 3. terlihat bahwa pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menurun tajam (-11,74 %), hal ini sebagai dampak adanya krisis ekonomi yang dimulai pertengahan tahun 1997. Pada tahun sebelumnya (1996) pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah adalah 7,30 % dan tahun 1997 sebesar 3,03 %, dan tahun 1998 turun sebesar -11,74 %. Sedangkan tahun 1999 sampai 2001 tumbuh berturut turut 3,49 %, 3,93 % dan 3,33.

Laju pertumbuhan ekonomi dari masing-masing Kabupaten / kota di Jawa Tengah selama tahun 1995 sampai dengan 2001 seperti terlihat pada Tabel 4.3. sangat bervariasi, yakni berkisar antara - 0, 49 % pertahun (terkecil , yaitu Kabupaten Grobogan ) sampai dengan 5,18 % pertahun (tertinggi, yaitu Brebes). Terdapat 19 Kabupaten/kota yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Brebes, Jepara, Cilacap, Kota Tegal, Pemalang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Tegal, Wonogiri , Magelang, Temanggung, Pekalongan, Purworejo, Semarang, , dan Sukoharjo.

Kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari rata-rata adalah kabupaten Kota Surakarta, Kudus, Kendal, Karanganyar, Batang, Klaten, Boyolali, Banjarnegara, Wonosobo, Blora, Rembang, Demak, Sragen, Pati, Purbalingga, Kebumen, Banyumas dan Grobogan.

Tabel 4.3

Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten /Kota di Jawa Tengah  
Tahun 1995 -2001 Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Dalam Persentase)

No	Kab/Kota	TAHUN					
		1996	1997	1998	1999	2000	2001
1	Cilacap	10.45	5.10	(5.21)	2.19	5.25	3.88
2	Banyumas	4.63	3.61	(6.80)	0.53	4.03	1.13
3	Purbalingga	7.02	2.20	(8.27)	1.10	2.78	2.98
4	Banjarnegara	7.37	0.82	(4.35)	0.44	1.13	0.15
5	Kebumen	6.23	2.75	(16.75)	3.75	4.67	1.78
6	Purworejo	7.48	2.43	(6.49)	2.48	2.41	3.40
7	Wonosobo	10.70	(6.87)	(9.37)	3.81	3.94	1.02
8	Magelang	6.53	1.17	(3.14)	1.64	3.50	3.91
9	Boyolali	6.55	2.02	(9.51)	1.18	2.06	3.63
10	Klaten	7.12	2.68	(11.35)	0.49	3.98	4.02
11	Sukoharjo	9.50	2.78	(11.23)	1.25	3.52	4.05
12	Wonogiri	7.76	2.70	(4.67)	1.95	3.54	2.62
13	Karanganyar	7.97	3.77	(11.65)	2.90	4.51	1.42
14	Sragen	7.54	2.30	(9.10)	1.98	2.85	2.26
15	Grobogan	3.37	(2.43)	(9.56)	(3.28)	5.55	4.22
16	Blora	3.27	3.14	(5.40)	1.06	2.45	2.55
17	Rembang	4.03	4.17	(10.25)	2.91	4.98	3.98
18	Pati	0.36	3.87	(4.02)	1.55	0.36	2.99
19	Kudus	7.57	(0.37)	(11.79)	0.79	1.89	3.18
20	Jepara	7.31	4.31	0.03	0.67	4.61	4.92
21	Demak	7.58	4.96	(10.52)	2.33	2.89	3.32
22	Semarang	15.98	3.76	(17.79)	1.46	4.78	3.34
23	Temanggung	6.22	7.85	(10.57)	2.25	3.47	4.38
24	Kendal	6.40	4.32	(9.29)	1.97	2.20	2.86
25	Batang	7.02	3.02	(10.17)	2.32	2.01	2.15
26	Pekalongan	6.84	3.88	(8.66)	3.66	2.37	4.32
27	Pemalang	6.98	4.74	(1.63)	1.59	3.71	3.24
28	Tegal	6.54	5.45	(9.02)	2.53	4.90	4.43
29	Brebes	6.22	5.41	2.28	4.42	4.56	4.84
30	Kota Magelang	8.99	3.05	(7.17)	3.73	3.96	3.06
31	Kota Surakarta	9.18	4.22	(13.93)	1.44	4.15	3.93
32	Kota Salatiga	7.06	3.73	(1.51)	1.79	3.57	3.65
33	Kota Semarang	12.77	9.73	(18.22)	3.40	4.97	5.11
34	Kota Pekalongan	7.59	3.32	(8.13)	3.96	3.99	4.30
35	Kota Tegal	8.28	3.59	(4.64)	2.12	5.11	5.22
	Jumlah	256.42	111.20	(287.87)	68.34	124.65	116.23
	Jawa Tengah	7.30	3.03	(11.74)	3.49	3.93	3.33
	Rata-Rata	7.33	3.18	(8.22)	1.95	3.56	3.32

Sumber : BPS, Pendapatan Regional Jawa Tengah, beberapa tahun terbitan.

#### 4.5. Typologi Klassen Jawa Tengah

Berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari PDRB perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka dapat disusun Typologi Klassen dalam suatu regional (Jawa Tengah). Sedangkan klasifikasi penyusunan Typologi Klassen adalah sebagai berikut :

- Jika  $r_i > r_n$  dan  $Y_i > Y_n$  = Daerah Maju dan Tumbuh Cepat (MT)
- Jika  $r_i > r_n$  dan  $Y_i < Y_n$  = Daerah Berkembang Cepat (B)
- Jika  $r_i < r_n$  dan  $Y_i > Y_n$  = Daerah Maju tapi Tertekan (M)
- Jika  $r_i < r_n$  dan  $Y_i < Y_n$  = Daerah Kurang Berkembang (KB)

Keterangan :

$r_i$  = laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah/regional

$r_n$  = laju pertumbuhan ekonomi nasional

$Y_i$  = Pendapatan perkapita suatu daerah

$Y_n$  = Pendapatan perkapita nasional

Dalam implementasinya pada penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Sjafrizal (1996), pertumbuhan ekonomi diukur dari pertumbuhan PDRB, sedangkan pendapatan perkapita diproksikan dari PDRB perkapita.

Pada penelitian ini penyusunan typologi klasen di Jawa Tengah dilakukan terhadap kabupaten/kota sebagai region, dengan membandingkan terhadap kondisi di Jawa Tengah. Data laju pertumbuhan ekonomi diproksikan dengan laju pertumbuhan PDRB dan data pendapatan perkapita diproksikan dengan PDRB Perkapita baik untuk tingkat Jawa Tengah maupun Kabupaten /Kota.

Tabel 4.4.

**Pembagian Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Menurut Typologi  
Klassen Berdasarkan Nilai PDRB perkapita dan Laju Pertumbuhan  
Ekonomi pada Tahun 2001 Atas Dasar Harga Konstan 1993**

Daerah Maju dan Tumbuh Cepat (MT) $Y_i > Y_n$ dan $r_i > r_n$ ;	PDRB Perkapita ( $Y_n$ )	Daerah Berkembang (B) $Y_i < Y_n$ dan $r_i > r_n$ ;
Kota Semarang Kota Salatiga Kota Surakarta Kota Tegal Sukoharjo Kota Pekalongan Cilacap		Jepara Pekalongan Purworejo Klaten Boyolali Semarang Brebes Tegal Magelang Temanggung Rembang Grobogan
<b>Laju Pertumbuhan Jawa Tengah / <math>r_n</math> (2001) = 3.33 % /th</b>		
Daerah Maju tapi Tertekan (M) $Y_i > Y_n$ dan $r_i < r_n$ ;	Jawa Tengah (2001) 1.356627 juta/org/th	Daerah Kurang Berkembang (KB) $Y_i < Y_n$ dan $r_i < r_n$ ;
Karanganyar Kudus Kendal Kota Magelang		Batang Wonogiri Pemalang Wonosobo Banjarnegara Blora Demak Sragen Pati Purbalingga Kebumen Banyumas

*Sumber : Data yang diolah*

Kota di Jawa Tengah kecuali Kota Magelang merupakan daerah maju dan tumbuh cepat, sedangkan kabupaten yang masuk dalam kuadran ini adalah kabupaten Sukoharjo dan Cilacap. Daerah ini secara umum struktur ekonominya tidak bergantung pada sumberdaya alam (sektor primer) yang ditandai dengan kecilnya peranan sektor pertanian dan telah mencapai industrialisasi dimana kontribusi sektor industri pengolahan, jasa dan perdagangan cukup besar. Pada kuadran daerah maju tapi tertekan secara umum peranan industri pengolahan,

perdagangan dan jasa telah berkembang dan sektor pertanian relatif lebih kecil dibandingkan dengan sektor industri kecil.

Pada daerah berkembang peranan industri pengolahan mulai tumbuh, namun secara umum peranan sektor pertanian masih cukup besar dalam pembentukan PDRB. Pada daerah kurang berkembang secara umum ketergantungan aktifitas ekonomi pada sektor primer (pertanian) masih cukup besar. Sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tersier (perdagangan dan jasa) kontribusinya terhadap pembentukan PDRB secara umum dibawah sektor pertanian.

#### **4.6. Sektor Unggulan di Jawa Tengah**

Suatu sektor dikatakan sebagai sektor unggulan apabila sektor tersebut merupakan penggerak utama dalam pembangunan daerah. Adanya sektor unggulan maka memungkinkan dilaksanakan pemusatan industri yang akan mempercepat pertumbuhan perekonomian. Salah satu analisa yang digunakan untuk menentukan sektor unggulan adalah analisis *location quotient* (LQ).

Pada daerah maju dan tumbuh cepat (MT) ekonomi daerah secara umum telah didominasi oleh aktifitas sektor industri, perdagangan dan jasa, sedangkan peranan sektor pertanian relatif kecil dibandingkan dengan ketiga sektor tersebut diatas. Hal ini memberikan gambaran bahwa ekonomi masyarakat tidak lagi bergantung dengan sumberdaya alam yang ada, ekonomi masyarakat telah berorientasi pada sektor sekunder dan tersier. Dengan melihat nilai LQ-nya yang lebih besar dari 1 maka pada umumnya sektor jasa merupakan sektor unggulan karena memiliki kemampuan untuk dipertukarkan dengan daerah lain (kabupaten/kota) di Jawa Tengah.

Pada daerah maju tapi tertekan (M) peranan sektor industri dan sektor pertanian masih cukup besar, kecuali Kabupaten Kudus di mana sektor pertanian sangat kecil perannya dalam kontribusi pembentukan PDRB. Dengan melihat nilai LQ-nya yang lebih besar dari 1, maka semua daerah memiliki kemampuan sektor industri sebagai sektor unggulan.

Pada daerah berkembang (B) pada umumnya sektor pertanian, perdagangan dan industri merupakan sektor yang dominan. Sedangkan sektor unggulannya adalah sektor pertanian dan perdagangan. Pada daerah yang tergolong kurang berkembang (KB) secara umum sektor dominannya adalah pertanian, perdagangan, industri dan jasa. Sektor pertanian, perdagangan dan jasa juga merupakan sektor unggulan, sedangkan sektor industri pada umumnya tidak menjadi sektor unggulan. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5

## Sektor Dominan dan Nilai LQ Dalam Perekonomian di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2001

No	Kabupaten/kota	Sektor Dominan	% Thdp PDRB	Nilai LQ	No	Kabupaten/kota	Sektor Dominan	% Thdp PDRB	Nilai LQ	
<b>DAERAH MAJU DAN TUMBUH CEPAT (MT)</b>					7	Tegal	Pertanian	26.52	1.30	
1	Cilacap	Industri	48.85	1.61	8	Temanggung	Perdagangan	22.30	1.01	
		Perdagangan	11.43	0.48			Industri	20.72	0.68	
		Pertanian	10.84	0.53			Pertanian	33.14	1.63	
2	Sukoharjo	Industri	26.06	0.86	9	Magelang	Jasa-jasa	20.16	2.08	
		Pertanian	20.68	1.02			Industri	16.23	0.54	
3	Kota Tegal	Jasa-jasa	13.27	1.37	10	Purworejo	Pertanian	30.56	1.50	
		Perdagangan	22.75	0.95			Industri	20.28	0.67	
		Industri	20.33	0.67			Jasa-jasa	15.37	1.58	
4	Kota Semarang	Jasa jasa	14.81	1.33	11	Rembang	Perdagangan	14.53	0.61	
		Perdagangan	35.39	1.48			Pertanian	33.54	1.65	
		Industri	31.56	1.04			Jasa-jasa	20.40	2.10	
5	Kota Salatiga	Jasa-jasa	13.22	1.36	12	Grobogan	Perdagangan	18.15	0.76	
		Jasa-jasa	28.33	2.92			Pertanian	46.68	2.30	
		Industri	19.70	0.65			Perdagangan	17.36	0.73	
6	Kota Surakarta	Perdagangan	17.83	0.75	12	Grobogan	Jasa-jasa	12.97	1.34	
		Industri	25.01	0.83			Pertanian	45.94	2.26	
		Perdagangan	22.34	0.94			Perdagangan	20.85	0.87	
7	Kota Pekalongan	Jasa-jasa	14.30	1.47	12	Grobogan	Jasa-jasa	15.91	1.64	
		Industri	24.95	0.82			<b>DAERAH KURANG BERKEMBANG (KB)</b>			
		Perdagangan	20.32	0.85			1	Wonogiri	Pertanian	48.05
<b>DAERAH MAJU TERTEKAN (M)</b>					2	Batang	Jasa-jasa	16.48	1.70	
1	Kota Magelang	Jasa-jasa	36.37	3.75			Perdagangan	11.36	0.48	
		Angkutan	21.47	4.09			Industri	29.52	0.97	
		Konstruksi	12.61	3.15	Pertanian	26.24	1.29			
2	Kudus	Industri	60.13	1.98	3	Boyolali	Perdagangan	17.48	0.73	
		Perdagangan	27.38	1.15			Pertanian	31.14	1.53	
3	Kendal	Industri	44.94	1.48	4	Banjarnegara	Perdagangan	26.09	1.09	
		Pertanian	18.60	0.91			Industri	17.53	0.58	
		Perdagangan	17.63	0.74			Pertanian	37.20	1.83	
4	Karanganyar	Industri	37.41	1.23	5	Blora	Jasa-jasa	17.88	1.84	
		Pertanian	20.07	0.99			Industri	15.49	0.51	
		Perdagangan	17.52	0.73			Pertanian	47.40	2.33	
5	Klaten	Jasa-jasa	13.50	1.39	6	Sragen	Perdagangan	17.92	0.75	
		Industri	41.68	1.38			Jasa-jasa	12.67	1.30	
		Perdagangan	17.61	0.74			Pertanian	37.78	1.86	
2	Jepara	Pertanian	16.94	0.83	7	Wonosobo	Industri	17.19	0.57	
		Industri	27.19	0.90			Perdagangan	14.22	0.60	
		Perdagangan	22.72	0.95			Jasa-jasa	14.13	1.46	
3	Pemalang	Pertanian	22.20	1.09	8	Pati	Pertanian	47.94	2.36	
		Pertanian	33.00	1.62			Perdagangan	18.39	0.77	
		Perdagangan	22.30	0.93			Pertanian	44.77	2.20	
4	Klaten	Industri	20.13	0.67	9	Purbalingga	Perdagangan	15.20	0.64	
		Perdagangan	27.00	1.13			Industri	13.14	0.43	
		Industri	23.37	0.77			Pertanian	30.86	1.52	
5	Brebes	Pertanian	18.49	0.91	10	Kebumen	Jasa-jasa	23.12	2.38	
		Pertanian	52.50	2.58			Perdagangan	17.60	0.74	
		Perdagangan	22.16	0.93			Pertanian	39.39	1.94	
6	Pekalongan	Industri	10.20	0.34	11	Banyumas	Jasa-jasa	18.45	1.90	
		Industri	32.24	1.06			Perdagangan	15.06	0.63	
		Perdagangan	21.17	0.89			Pertanian	25.02	1.23	
7	Demak	Pertanian	14.09	0.81	12	Demak	Industri	18.80	0.62	
		Pertanian	44.00	2.16			Jasa-jasa	16.93	1.74	
					12	Demak	Perdagangan	20.48	0.86	
							Jasa-jasa	12.61	1.30	

Sumber : Data yang diolah

#### 4.7. Kondisi Angkatan Kerja di Jawa Tengah

Pertumbuhan penduduk setiap tahun akan berdampak pada peningkatan usia kerja dalam suatu daerah, dan pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan maupun jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja yang terampil merupakan potensi sumberdaya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Menurut BPS, penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berusia 10 tahun ke atas, dan dapat dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu angkatan kerja yang sedang bekerja dan angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja yang sedang bekerja merupakan jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu.

**Tabel 4.6.**  
**Jumlah Angkatan Kerja di Jawa Tengah Tahun 1995 – 2001**

Lapangan Usaha	Tahun 1995		Tahun 2001	
	Jiwa	%	Jiwa	%
Pertanian	6,466,506	45.99	6,730,367	44.67
Pertambangan	138,847	0.99	78,416	0.52
Industri Pengolahan	1,881,367	13.38	2,447,195	16.24
Listrik	41,813	0.30	13,546	0.09
Bangunan	670,068	4.77	687,807	4.57
Perdagangan	2,415,213	17.18	2,826,300	18.76
Pengangkutan	422,517	3.00	592,019	3.93
Keuangan	65,413	0.47	120,576	0.80
Jasa	1,881,043	13.38	1,563,931	10.38
Lainnya	79,299	0.56	6,355	0.04
<b>Jumlah</b>	<b>14,062,086</b>	<b>100</b>	<b>15,066,512</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS, Jawa Tengah dalam Angka, Tahun 1996 dan 2002

Jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah pada tahun 1995 adalah sebanyak 14,062,086 jiwa, dan meningkat menjadi 15,066,512 jiwa pada tahun 2001 atau mengalami peningkatan sebesar 7,14 % selama 6 tahun. Secara lengkap jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Pada tahun 2001 lapangan usaha pada Sektor Pertanian mampu menyerap angkatan kerja sebanyak 6,730,367 orang atau 44,67 % dari jumlah angkatan kerja yang ada, sedangkan sektor perdagangan menyerap 2,826,300 orang ( 18,76 %), sektor industri menyerap 2,447,195 orang ( 16,24 %) dan sektor jasa menyerap 1,563,931 orang (10,38 %), serta selebihnya sebanyak 1,378,143 orang (9,15 %) terserap pada sektor-sektor lainnya.

Jumlah angkatan kerja rata-rata menurut Kabupaten/kota di Jawa Tengah terbesar adalah Kabupaten Brebes (766.169 orang), Cilacap (656,220 orang), dan Banyumas (630,410 orang) sedangkan terkecil adalah Kota Salatiga (48,370 orang). Distribusi angkatan kerja di Jawa Tengah yaitu berkisar antara terendah 0,34 % (Kota Salatiga) sampai dengan tertinggi 5,37 % (Kabupaten Brebes). Pada umumnya kota di Jawa Tengah memiliki angkatan kerja yang relatif kecil jumlahnya kecuali kota Semarang. Hal ini dapat disebabkan kota-kota di Jawa Tengah memiliki luas wilayah yang sempit, dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, sehingga jumlah angkatan kerja yang adapun relatif sedikit, namun apabila dikaitkan antara jumlah penduduk dan luas wilayahnya, maka kota-kota di Jawa Tengah relatif lebih padat. Dengan melihat struktur ekonomi pada kota-kota di Jawa Tengah yang umumnya pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa-jasa dikaitkan dengan Angkatan kerja yang ada, maka dapat diduga bahwa sektor-sektor tersebut mampu menyerap angkatan kerja yang ada. Hal ini

diperkuat adanya dari data bahwa angkatan kerja lebih menyebar pada Kabupaten di Jawa Tengah yang umumnya struktur ekonominya bertumpu pada sektor Pertanian seperti Brebes, Banyumas, Tegal, Pemalang. Secara lengkap distribusi angkatan kerja di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Laju pertumbuhan angkatan kerja rata-rata di Jawa Tengah selama tahun 1995-2001 sebesar 1,4171 % pertahun. Laju pertumbuhan angkatan kerja rata-rata tertinggi adalah Kota Salatiga, yaitu sebesar 10,33 % pertahun sedangkan laju pertumbuhan angkatan kerja terendah adalah Kota Pekalongan yaitu sebesar -2,67 % pertahun. Besarnya laju pertumbuhan angkatan kerja di Jawa Tengah per Kabupaten/kota secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7

**Nilai Rata-rata Jumlah Angkatan Kerja, Distribusi dan Rata-rata  
Pertumbuhan Angkatan Kerja Kabupaten Kota di Jawa Tengah Tahun  
1995 – 2001**

No	Kabupaten/kota	Rata-rata Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	Rata-rata Distribusi (%)	Rata-rata Laju Pertumbuhan) (%)
1	Cilacap	656,220	4.60	0.13
2	Banyumas	630,410	4.42	0.14
3	Purbalingga	354,617	2.48	0.20
4	Banjarnegara	394,835	2.77	1.76
5	Kebumen	514,846	3.61	0.16
6	Purworejo	338,103	2.37	(0.08)
7	Wonosobo	365,415	2.56	1.00
8	Magelang	545,798	3.82	0.89
9	Boyolali	464,089	3.25	2.38
10	Klaten	549,351	3.85	1.20
11	Sukoharjo	353,519	2.47	4.14
12	Wonogiri	530,850	3.72	0.93
13	Karanganyar	403,399	2.83	0.31
14	Sragen	421,245	2.95	0.98
15	Grobogan	595,490	4.17	2.26
16	Blora	417,288	2.92	(0.34)
17	Rembang	267,357	1.87	2.93
18	Pati	554,098	3.88	0.87
19	Kudus	343,283	2.40	1.26
20	Jebara	427,469	2.99	2.60
21	Demak	415,066	2.90	2.68
22	Semarang	428,403	3.00	0.70
23	Temanggung	344,000	2.41	1.37
24	Kendal	374,792	2.63	1.04
25	Batang	298,873	2.09	0.75
26	Pekalongan	344,038	2.41	3.34
27	Pemalang	504,461	3.53	2.47
28	Tegal	537,777	3.76	4.07
29	Brebes	766,169	5.37	0.20
30	Kota Magelang	50,667	0.36	(1.01)
31	Kota Surakarta	218,115	1.53	(0.24)
32	Kota Salatiga	48,370	0.34	10.33
33	Kota Semarang	572,021	4.01	0.67
34	Kota Pekalongan	132,933	0.93	(2.67)
35	Kota Tegal	115,343	0.81	(2.19)
	Jawa Tengah	14,278,707	100	1.41

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah Dalam Angka, Berbagai Tahun yang diolah

#### 4.5. Investasi di Jawa Tengah

Pembangunan yang dilaksanakan di daerah tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah (baik pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota), tetapi juga dibiayai oleh swasta (baik swasta asing /PMA, swasta dalam negeri / PMDN dan Non Fasilitas), dan swadaya masyarakat.

Dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SPPMDN) memiliki beberapa pengertian, yaitu

- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam bentuk proyek baru
- Perluasan Usaha dari Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari proyek yang telah ada
- Perubahan atau tambahan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah ada; Perubahan ini menyangkut lokasi perusahaan, luas lahan yang digunakan, output, sumber pembiayaan, dan perubahan penggunaan tenaga kerja asing.

Sedangkan nilai realisasi investasi merupakan besarnya realisasi investasi dari proyek yang telah disetujui sebelumnya. Bidang usaha yang diminati oleh investor di Jawa Tengah meliputi lapangan usaha bidang industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan telekomunikasi, pertambangan, keuangan dan pertanian.

Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimiawi atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat

kepada pemakai akhir. Jenis industri pengolahan antara lain : industri kayu; industri makanan; industri tekstil; industri kertas; industri farmasi; industri kimia; industri mineral non logam; industri logam dasar dan industri lainnya. Dari jenis industri tersebut industri makanan, industri kayu, industri tekstil lebih diminati oleh investor di Jawa Tengah.

Penyebaran investasi PMDN di Jawa Tengah menunjukkan adanya kecenderungan mengarah pada pengelompokan pada daerah-daerah tertentu, dimana investasi sebagian besar terjadi pada wilayah Semarang (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak dan Kendal), Wilayah Kudus dan Jepara, Wilayah Surakarta ( Kota Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo dan Sragen) dan Wilayah Pekalongan (Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Pemalang dan Tegal). Beberapa Kabupaten seperti Blora, Grobogan, Rembang, Purworejo, Wonogiri, Wonosobo , Klaten, Kebumen, Purbalingga, Pati kurang diminati oleh investor. Daerah-daerah ini dalam Typologi Klassen termasuk dalam daerah kurang berkembang. Dengan kata lain secara umum bahwa daerah kurang berkembang kurang menarik bagi investor swasta.

Investasi swasta sektor industri kecil dan menengah (non fasilitas) relatif menyebar di semua daerah di Jawa Tengah. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah, sampai dengan tahun 2001 di Jawa Tengah terdapat 643.504 industri kecil dan menengah. Sedangkan besarnya investasi tahun 2001 tercatat 1.133.933 juta rupiah. Sedangkan jenis industri kecil dan menengah dapat dibedakan menjadi industri Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri), Industri Logam, Mesin dan Bahan Kimia ; dan Aneka Industri.

UPT-PUSTAK-HRDIP

Industri pengolah hasil pertanian pada umumnya terdapat di kawasan perdesaan, di mana industri tersebut memanfaatkan produksi hasil pertanian setempat sebagai bahan bakunya. Jenis industri pengolahan hasil pertanian antara lain : penggilingan padi, pembuatan tahu/tempe, pengolahan ikan, pengolahan kayu dan hasil hutan lainnya. Orientasi pemasaran dari hasil industri kecil dan menengah ini secara umum adalah pasar lokal dan domestik, dan hanya sebagian kecil yang berorientasi ekspor.

Pengembangan industri kecil dan menengah di Jawa Tengah pada saat ini menunjukkan gejala untuk membentuk suatu kelompok usaha dalam model sentra-sentra industri. Sentra sentra industri ini terdapat dalam suatu wilayah atau perkampungan yang memiliki sumberdaya, baik bahan baku maupun sumberdaya manusia yang memiliki ketrampilan tertentu, sebagai contoh adalah :

- sentra industri gula merah (Purworejo, Purbalingga, Banjarnegara);
- sentra industri pakaian jadi (Sukoharjo, Pekalongan);
- sentra industri kerajinan kayu jati (Blora, Jepara).
- Sentra industri keramik (Banjarnegara)

Dengan model pendirian sentra-sentra industri ini berdampak positif dalam pengembangan industri kerajinan karena akan memberikan kemudahan dalam pemasaran dan memberikan corak kegiatan ekonomi bagi kawasan tersebut.

Besarnya nilai investasi sektor industri kecil dan menengah seperti terlihat pada Lampiran 13, bahwa investasi ini relatif merata, dimana Kabupaten Klaten secara rata-rata selama masa penelitian (tahun 1995 – 2001) memiliki investasi terbesar. Sedangkan Investasi terkecil adalah Kota Salatiga.

Tabel 4.8

**Besarnya Rata-rata Nilai Investasi Swasta (IS), Anggaran Pembangunan Pemerintah Daerah (IG), Rasio Investasi Swasta Terhadap PDRB (IS/Y), Rasio Anggaran Pembangunan Terhadap PDRB (IG/Y) dan Rasio IG Terhadap APBD Kabupaten Kota di Jawa Tengah Tahun 1995-2001**

No	Kabupaten/kota	IS (Juta Rp)	IG (Juta Rp)	IS/Y	IG/Y	IG/APBD
1	Cilacap	50,810	31,965	0.0241	0.0152	0.3587
2	Banyumas	44,982	23,610	0.0444	0.0233	0.2729
3	Purbalingga	36,695	22,299	0.0600	0.0365	0.3386
4	Banjarnegara	28,470	15,514	0.0336	0.0183	0.3109
5	Kebumen	43,027	20,300	0.0472	0.0223	0.3210
6	Purworejo	92,290	23,142	0.1368	0.0343	0.2818
7	Wonosobo	14,552	14,405	0.0278	0.0275	0.2936
8	Magelang	31,331	18,469	0.0305	0.0180	0.2989
9	Boyolali	35,494	16,699	0.0388	0.0183	0.2895
10	Klaten	114,648	20,685	0.0946	0.0171	0.2722
11	Sukoharjo	44,499	16,845	0.0398	0.0151	0.3345
12	Wonogiri	28,859	21,018	0.0379	0.0276	0.3256
13	Karanganyar	89,573	19,379	0.0761	0.0165	0.3249
14	Sragen	61,482	21,056	0.0885	0.0303	0.3251
15	Grobogan	35,526	18,226	0.0483	0.0248	0.2986
16	Blora	24,196	28,199	0.0361	0.0421	0.3372
17	Rembang	26,795	17,044	0.0540	0.0343	0.3378
18	Pati	17,309	23,272	0.0184	0.0248	0.2980
19	Kudus	32,352	15,002	0.0101	0.0047	0.2626
20	Jepara	30,400	20,107	0.0323	0.0214	0.3475
21	Demak	25,452	13,467	0.0344	0.0182	0.3198
22	Semarang	146,363	22,046	0.1373	0.0207	0.3431
23	Temanggung	22,455	18,425	0.0326	0.0267	0.3226
24	Kendal	264,601	36,134	0.1709	0.0233	0.3945
25	Batang	15,932	18,055	0.0220	0.0249	0.3415
26	Pekalongan	78,185	15,780	0.0918	0.0185	0.2991
27	Pemalang	26,117	22,884	0.0251	0.0220	0.3504
28	Tegal	53,719	28,978	0.0604	0.0326	0.3543
29	Brebes	20,715	20,839	0.0162	0.0163	0.3191
30	Kota Magelang	7,911	8,798	0.0257	0.0285	0.2646
31	Kota Surakarta	79,383	33,372	0.0604	0.0254	0.3663
32	Kota Salatiga	16,549	6,821	0.0679	0.0280	0.2827
33	Kota Semarang	287,190	84,388	0.0559	0.0164	0.3602
34	Kota Pekalongan	51,163	9,139	0.1209	0.0216	0.3157
35	Kota Tegal	13,435	9,733	0.0390	0.0282	0.2813
	Rata-rata	56,927	21,603	0.0554	0.0235	0.3184

Sumber : Data yang diolah

Keterangan : IS = Investasi swasta

IG = Anggaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

Y = PDRB Non Migas ADHK 1993

APBD = APBD Kabupaten/kota

Besarnya Investasi swasta pada kabupaten/kota di Jawa Tengah secara rata-rata selama tahun 1995 sampai dengan 2001 adalah 56.297 juta rupiah per-kabupaten/kota. Kota Semarang merupakan daerah yang menarik bagi investor swasta untuk menanamkan modalnya, hal ini ditunjukkan dari besarnya nilai investasi swasta yang menempati urutan terbesar, yaitu sebesar 287.190 juta rupiah/tahunnya atau 14,41 % dari jumlah rata-rata Kabupaten/kota di Jawa Tengah, disusul kemudian adalah Kendal (264.601 juta rupiah/tahun atau 13,28 %), Semarang (146.363 juta rupiah/tahun atau 7,35 %), dan Klaten (114.648 juta rupiah/tahun atau 5,75). Sedangkan daerah dengan investasi terkecil adalah Kota Magelang yaitu sebesar 7.911 juta rupiah/tahun atau 0,4 % dari jumlah rata-rata Kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Peranan investasi swasta dalam pembentukan PDRB Kabupaten/kota di Jawa Tengah secara rata-rata untuk tiap Kabupaten/kota adalah sebesar 5,54 %. Kabupaten Kendal merupakan daerah yang memiliki rasio investasi swasta terhadap PDRB terbesar, yaitu sebesar 17,09 %, disusul kemudian Semarang (13,73), Purworejo (13,68) dan Kota Pekalongan (12,09), sedangkan daerah yang memiliki nilai rasio investasi PDRB terhadap PDRB terkecil adalah Kabupaten Kudus (1,01 %).

#### **4.6. Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah**

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam era otonomi daerah diharapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian daerah. Pembangunan daerah disusun berdasarkan dokumen perencanaan

pembangunan , yakni Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) dan sebelumnya didasarkan atas Pola Dasar Program (POLDAS), Rencana Pembangunan Lima Tahunan Daerah (REPELITADA) dan Rencana Umum Pembangunan Tahunan (RUPTD). Pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam bentuk proyek-proyek pembangunan daerah yang dilaksanakan setiap tahun anggaran dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dilihat dari dua sisi yaitu sumber dana pembangunan (Pemerintah Pusat (APBN Sektor, INPRES), Pemerintah Propinsi (APBD Propinsi (sektoral dan Bantuan Kepada Daerah Bawahan (2P.0.A) dan APBD Kabupaten/kota), dan sektor pembangunannya (20 sektor pembangunan). Sektor-sektor pembangunan itu meliputi (1) Sektor Industri; (2) Pertanian dan Kehutanan; (3) Sumberdaya Air dan Irigasi; (4) Tenaga Kerja; (5) Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi ; (6) Transportasi (7) Pertambangan dan Energi ; (8) Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah; (9) Pembangunan Daerah dan Pemukiman; (10) Lingkungan Hidup dan Tata Ruang; (11) Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olahraga; (12) Kependudukan dan Keluarga Berencana; (13) Kesehatan, Kesejahteraan Sosial. Peranan Wanita, Anak dan Remaja; (14) Perumahan dan Pemukiman; (15) Agama; (16) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (17) Hukum (18) Aparatur Pemerintah dan Pengawasan; (19) Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa; (20) Keamanan dan Ketertiban Umum, dan Subsidi kepada Daerah Bawahan.

Anggaran pembangunan yang berasal dari Pemerintah pusat dapat berasal dari dana INPRES (Inpres Sekolah Dasar; Inpres Pasar, Inpres Jalan, Inpres Penghijauan) dan APBN Sektoral yang dilaksanakan di daerah. Sedangkan pengeluaran pembangunan yang berasal dari dana APBD Propinsi merupakan pembelanjaan pembangunan oleh pemerintah propinsi yang dilaksanakan yang dilaksanakan di daerah. Sejak tahun anggaran 2001 bersamaan dengan diberlakukannya UU No, 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemernitah Pusat dan Daerah, maka sumber penerimaan dari pusat dalam bentuk *Block Grant* , yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan *Specific Grant*, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagai pengganti dana Inpres sebelumnya. Hal ini menyebabkan meningkatnya besar APBD Kabupaten/kota sebagai konsekuensi dari diserahkannya beberapa kewenangan propinsi dan pusat ke daerah.

Pada Tabel 4.8 terlihat bahwa besarnya anggaran pembangunan pemerintah daerah Kabupaten/kota selama tahun 1995 sampai dengan 2001 rata-ratanya adalah sebesar 21603 juta rupiah/tahun/kabupaten-kota. Kota Semarang sebagai ibukota propinsi merupakan daerah dengan anggaran pembangunan daerah terbesar yaitu 84.388 juta rupiah/tahunnya atau 11,16 % dari jumlah rata-rata daerah di Jawa Tengah, disusul kemudian Kendal ( 36,135 juta rupiah/tahunnya atau 4,78 % dari jumlah rata-rata daerah di Jawa Tengah, Surakarta (33,372 juta rupiah/tahunnya atau 4,41 % dari jumlah rata-rata daerah di Jawa Tengah dan Cilacap (31,965 juta rupiah/tahun atau 4,23 % dari jumlah rata-rata daerah di Jawa Tengah. Sedangkan kota Salatiga merupakan daerah dengan jumlah anggaran pembangunan terkecil. Hal ini dapat dipahami karena

kota Salatiga merupakan kota yang kecil dan jumlah penduduk yang relatif sedikit

Dengan membandingkan anggaran pembangunan dengan jumlah keseluruhan APBD Kabupaten/kota, seperti terlihat pada Tabel 4.8 terlihat bahwa secara-rata rata rasio antara anggaran pembangunan terhadap APBD hanya sebesar 31,84 %. Hal ini menunjukkan bahwa APBD Kabupaten/kota di Jawa Tengah lebih digunakan untuk membiayai kegiatan rutin atau konsumsi pemerintah daerah. Sedangkan yang digunakan untuk pembangunan relatif kecil. Lebih lanjut apabila diperhatikan dari rasio antara anggaran pembangunan daerah terhadap APBD pertahunnya seperti terlihat pada Lampiran 21, dapat diketahui bahwa terdapat kecenderungan rasio anggaran pembangunan terhadap APBD semakin menurun terutama dengan diberlakukannya otonomi daerah tahun 2001. Pada tahun 1995 rasio anggaran pembangunan terhadap APBD secara rata-rata kabupaten/kota sebesar 50.16 %, namun pada tahun 2001 hanya sebesar 19,03%.

Salah satu dari indikator peran pemerintah daerah dalam pembentukan PDRB adalah rasio dari anggaran pengeluaran pemerintah terhadap PDRB. Semakin besar nilai rasio anggaran pengeluaran pemerintah terhadap PDRB berarti semakin besar peranan pemerintah dalam perekonomian daerah (pembentukan PDRB), dan semakin kecilnya nilai rasio, maka berarti peranan pemerintah semakin kecil karena peranan sektor swasta dalam perekonomian daerah telah semakin besar. Dengan membandingkan rasio antara anggaran pembangunan daerah terhadap PDRB seperti terlihat pada Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa secara rata-rata selama masa penelitian adalah sebesar 2,35 %

tiap Kabupaten/kota. Kabupaten Blora merupakan daerah yang memiliki rasio terbesar, yaitu 4,21 % disusul kemudian adalah Purbalingga (3,65 %), Rembang (3,42 %) dan Purworejo (3,43 %). Sedangkan Kabupaten Kudus merupakan daerah yang memiliki rasio anggaran pembangunan daerah terhadap PDRB terendah, yaitu sebesar 0,47 %. Hal ini dapat diartikan peranan pemerintah Kabupaten Blora relatif lebih besar dalam perekonomian daerah, dan peranan pemerintah Kabupaten Kudus relatif paling kecil dalam perekonomian daerah dibandingkan dengan daerah lainnya.

Disamping dana pembangunan yang berasal dari APBD Kabupaten/kota tersebut juga dimungkinkan adanya pembangunan yang bersumber dana dari APBN Sektoral, APBD Propinsi dan Bantuan/donatur negara asing yang dilaksanakan di daerah. Namun karena keterbatasan kemampuan dan waktu yang dimiliki besarnya investasi pemerintah yang bersumber dana di luar APBD "Pembangunan" Kabupaten / Kota tidak dapat kami jelaskan.

Jumlah keseluruhan pengeluaran pembangunan pemerintah daerah yang berasal dari APBD Kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 1995 adalah sebesar Rp. 472,237.785 juta dan meningkat menjadi sebesar Rp 1,688,701.466 juta atau 237 % dalam waktu tujuh tahun atau rata-rata sebesar 39,58 % pertahun. Peningkatan tertinggi anggaran pembangunan daerah terjadi pada tahun 2001, yaitu sebesar 151,56 %, hal ini sebagai konsekuensi dari mulai dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Sedangkan pada tahun 1998 dan 2000 mengalami penurunan jumlah anggaran pembangunan daerah Kabupaten/ Kota. Pada tahun 1998 ini sebagai akibat adanya krisis ekonomi yang menyebabkan penurunan pada sisi penerimaan dari

daerah, sedangkan penurunan APBD pada tahun 2000, lebih disebabkan karena masa transisi (peralihan) dari sistem anggaran pemerintah, dimana pada tahun tersebut dimulai dari bulan april sampai dengan desember (9 bulan).

Distribusi anggaran pembangunan pemerintah daerah di Jawa Tengah selama tahun 1995 sampai dengan tahun 2001 terbesar pada kota Semarang 11,2 %, Kendal 4,8 % dan Kota Surakarta 4,43 %, sedangkan terkecil adalah Kota Salatiga 0,91 %.

#### **4.7. Sarana Angkutan**

Sarana umum merupakan kerangka utama dari pembangunan ekonomi, di mana dengan tersedianya sarana umum yang baik akan mampu memberikan kenyamanan hidup pada suatu wilayah. Salah satu dari sarana umum adalah fasilitas sarana transportasi. Fasilitas sarana transportasi (angkutan) merupakan suatu kebutuhan penting bagi suatu daerah, karena dengan semakin baiknya sarana transportasi akan menyebabkan semakin mudahnya mobilitas manusia dan barang dari suatu daerah dan akhirnya akan menyebabkan berkembangnya sektor perdagangan, lancarnya perekonomian dari suatu daerah. Kondisi tersebut pada akhirnya diharapkan akan menyebabkan semakin cepatnya pertumbuhan ekonomi regional.

Sarana transportasi antar Kabupaten/kota di lingkup Jawa Tengah yang utama adalah sarana transportasi darat, yang meliputi kereta api dan kendaraan bermotor termasuk didalamnya kendaraan pribadi, bus, truk, pick up, dan kereta gandengan. Angkutan Sungai dan Pelayaran hanya terdapat pada Kabupaten Jepara, yakni menghubungkan Kota Jepara dengan Kecamatan Karimunjawa.

**Tabel 4.9.**  
**Rata-rata Jumlah dan Pertumbuhan Sarana Angkutan Menurut**  
**Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 1995-2001**

No	Kabupaten/kota	Rata-rata Jumlah Sarana Angkutan		Rata-rata Pertumbuhan
		Unit	%	
1	Cilacap	5,831	3.59	4.57
2	Banyumas	6,988	4.30	0.62
3	Purbalingga	2,926	1.80	3.55
4	Banjarnegara	2,857	1.76	1.90
5	Kebumen	3,275	2.02	3.22
6	Purworejo	2,634	1.62	2.13
7	Wonosobo	3,658	2.25	4.08
8	Magelang	5,023	3.09	5.88
9	Boyolali	3,588	2.21	12.26
10	Klaten	6,439	3.97	4.75
11	Sukoharjo	3,907	2.41	5.76
12	Wonogiri	3,763	2.32	2.77
13	Karanganyar	4,408	2.71	4.29
14	Sragen	3,164	1.95	11.13
15	Grobogan	2,719	1.67	4.15
16	Blora	2,423	1.49	3.06
17	Rembang	2,157	1.33	(0.17)
18	Pati	5,890	3.63	3.70
19	Kudus	4,855	2.99	2.60
20	Jepara	6,334	3.90	13.38
21	Demak	2,031	1.25	8.89
22	Semarang	4,051	2.50	2.44
23	Temanggung	4,611	2.84	6.40
24	Kendal	3,643	2.24	5.39
25	Batang	1,858	1.14	0.78
26	Pekalongan	1,697	1.05	4.39
27	Pemalang	2,518	1.55	2.21
28	Tegal	3,116	1.92	4.19
29	Brebes	2,717	1.67	3.37
30	Kota Magelang	3,222	1.98	(3.14)
31	Kota Surakarta	12,801	7.88	3.83
32	Kota Salatiga	1,605	0.99	4.13
33	Kota Semarang	30,031	18.50	5.82
34	Kota Pekalongan	2,759	1.70	2.34
35	Kota Tegal	2,860	1.76	(2.04)
	Jawa Tengah	162,357	100	3.79

Sumber : BPS Jawa Tengah, Jawa Tengah Dalam Angka, Data yang diolah

Berdasarkan Tabel 4.9. dapat diketahui bahwa secara rata-rata jumlah sarana angkutan di Jawa Tengah selama masa penelitian berjumlah 162.357 unit. Kota Semarang memiliki rata-rata jumlah sarana angkutan terbanyak yaitu sebanyak 30.031 unit atau 18,5 % dari jumlah sarana angkutan yang ada di Jawa Tengah, disusul kemudian Kota Surakarta sebanyak 12.801 unit atau 7,88 %. Sedangkan daerah yang memiliki rata-rata jumlah sarana angkutan tersedikit adalah kota Salatiga, yaitu sebanyak 1.605 unit atau 0,99 % dari rata-rata jumlah sarana angkutan di Jawa Tengah.

Pertumbuhan rata-rata jumlah sarana angkutan Kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah sebesar 3,79 % pertahun. Kabupaten Jepara merupakan daerah yang memiliki rata-rata pertumbuhan sarana angkutan terbesar, yaitu 13,38 %, disusul dengan Boyolali (12,26 %), Sragen (11,13 %) dan Demak (8,89 %). Sedangkan Kota Magelang secara rata rata mengalami pertumbuhan sebesar 3,14 % pertahun.

Dengan melihat jumlah sarana angkutan pada kabupaten/kota pertahunnya seperti terlihat pada Lampiran 23, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 1995 jumlah sarana angkutan yang ada di Jawa Tengah mencapai jumlah 137.305 unit kendaraan meningkat menjadi 172.542 unit kendaraan pada tahun 2001 atau bertambah sebanyak 35.237 unit kendaraan atau meningkat sebesar 25,66 % selama 6 tahun terakhir. Secara rata-rata peningkatan sarana angkutan adalah sebesar 3,79 % pertahun. Namun demikian apabila diperhatikan jumlah sarana angkutan pertahunnya, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 1998 dan 1999 terjadi penurunan jumlah sarana angkutan. Pada tahun 1998 terjadi penurunan jumlah sarana angkutan sebesar 1,39 % dan pada tahun 1999 menurun

sebesar 2,68 % dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi sebagai dampak terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan meningkatnya harga suku cadang kendaraan bermotor sehingga banyak kendaraan yang rusak tidak mampu diperbaiki atau diperbaiki dengan sistem *kanibal*. Peningkatan jumlah kendaraan mulai terjadi pada tahun 2000 dan 2001.

Seperti terlihat pada Lampiran 26, bahwa pada tahun 2001, jumlah sarana angkutan penumpang di Jawa Tengah di dominasi oleh mobil bus, yakni sebesar 26116 unit ( 90,29 % dari jumlah angkutan penumpang), dan mobil penumpang sebanyak 2809 unit atau 9,71 %. Dari jumlah bus yang ada jumlah bus tidak umum hanya sebanyak 2.483 unit atau 8,58 %) dan mobil penumpang tidak umum (68 unit atau 0,23 %) relatif lebih sedikit dibandingkan dengan bus umum atau mobil penumpang umum. Sedangkan jumlah bus umum terbanyak terdapat pada Kota Semarang (1.533 unit), Banyumas (1.5037 unit), Kota Surakarta (1.214 unit), Wonogiri (1.157 unit) dan Magelang(1052 unit). Sedangkan Kabupaten yang memiliki jumlah bus umum terkecil adalah Batang sebanyak 230 unit.

Sarana angkutan barang baik untuk jenis truk, tangki, mobil sumbu III barang, pick up dan bestel jumlahnya lebih banyak yang tidak untuk umum (perusahaan, instansi ) bila dibandingkan dengan yang umum. Jumlah truk di Jawa Tengah pada tahun 2001 mencapai 46.758 unit dari jumlah tersebut 44.457 adalah truk tidak umum yang dimiliki oleh suatu perusahaan /instansi untuk mengangkut barang milik perusahaan /instansi. Jumlah Truk terbanyak berada di Kota Semarang yaitu sebanyak 8.215 unit, Rembang sebanyak 3.057 unit, Kota Magelang sebanyak 2.990 unit dan Klaten sebanyak 2.021 unit. Daerah yang

memiliki jumlah truk tersedikit adalah Kota Salatiga, yaitu sebanyak 424 unit. Mobil barang jenis pick up di Jawa Tengah terdapat sebanyak 88.305 unit yang terdiri 87.858 unit pick up tidak umum dan 645 unit pick up umum. Daerah yang memiliki mobil barang jenis pick up adalah kota Semarang sebanyak 16.956 unit, disusul Kota Surakarta sebanyak 8.131 unit, dan Jepara sebanyak 5.431 unit. Secara lengkap jumlah sarana angkutan penumpang dan barang dapat dilihat pada Lampiran 26.

#### **4.8. Energi Listrik**

Listrik merupakan salah satu sumber energi utama dalam kegiatan produktif di masyarakat. Tersedianya energi listrik juga akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk tinggal di suatu daerah. Energi listrik digunakan sebagai sarana penerangan, sumber energi bagi peralatan rumah tangga, industri, perkantoran dan kegiatan produksi lainnya. Semakin meningkat pendapatan masyarakat maka kebutuhan akan listrik akan menjadi semakin besar, demikian juga dalam suatu perusahaan semakin besar usaha dan semakin modern peralatan yang digunakan maka ketergantungan akan sumber energi listrik semakin besar.

Produksi energi listrik di Jawa Tengah terdapat di beberapa daerah (kabupaten/kota) seperti Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Semarang, Cilacap dan Wonosobo. Energi listrik ini diproduksi dengan berbagai teknologi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Dieng. Pada tahun 2001 jumlah energi listrik yang di produksi di Jawa Tengah sebesar

5.642.112 MWh. Untuk menghubungkan energi listrik yang telah dihasilkan agar dapat di distribusikan, maka dihubungkan dalam jaringan interkoneksi pengatur beban yang ada di Ungaran, Kabupaten Semarang.

Di Jawa Tengah terdapat 10 cabang distribusi PT. PLN (Persero), yaitu Semarang (meliputi ranting/rayon Semarang, Kendal, Purwodadi, Demak) , Surakarta (Surakarta, Karanganyar, Sragen, Wonogiri dan Sukoharjo), Purwokerto (Purwokerto, Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga), Tegal (Tegal, Pemalang, Slawi, Brebes), Magelang ( Magelang, Purworejo, Temanggung, Muntilan), Kudus (Kudus, Pati, Jepara, Rembang, Blora), Salatiga (Salatiga, Ungaran, Ambarawa), Klaten (Klaten, dan Boyolali), dan Pekalongan (Pekalongan dan Batang), Cilacap (Cilacap dan Kebumen). Pembagian batas wilayah kerja dari masing masing cabang tidak selalu sama dengan batas administrasi Kabupaten/kota.

Pengguna listrik PLN di Jawa Tengah secara umum dapat dikelompokkan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu :

1. Kelompok Rumah tangga
2. Kelompok Industri
3. Kelompok Usaha
4. Kelompok Sosial
5. Kelompok Kantor Pemerintah
6. Kelompok Penerangan Jalan

Kelompok rumah tangga merupakan terbesar dalam jumlah pelanggan dan pengguna daya listrik. Berdasarkan data tahun 2001, di Jawa Tengah terdapat 4.388.881 pelanggan rumah tangga dan menyerap 2.672.611 KVA daya listrik

tersambung. Dari sisi penggunaan daya listrik tersambung persatuan pelanggan, maka kelompok rumah tangga adalah yang terkecil, yaitu rata-rata setiap pelanggan hanya menggunakan daya listrik sebesar 0,609 KVA.

Kelompok industri dari sisi jumlah pelanggan relatif lebih kecil, yaitu hanya 4.288 pelanggan, namun dari sisi pengguna daya listrik adalah terbesar kedua setelah kelompok rumah tangga, yaitu sebesar 951.557 KVA atau rata-rata satu pelanggan membutuhkan daya listrik sebesar 221,912 KVA.

Kelompok pelanggan jenis usaha di Jawa Tengah terdapat 131.844 pelanggan dan membutuhkan daya listrik sebesar 424.252 KVA atau rata-rata setiap pelanggan membutuhkan daya listrik terpasang sebesar 3,218 KVA. Secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 30.

Sedangkan jumlah daya listrik tersambung di Jawa Tengah pada tahun 1995 adalah sebesar 2,553,652 KVA sedangkan tahun 2001 meningkat menjadi sebesar 4.280.674,151 KVA atau meningkat sebesar 1,727,022 KVA dalam waktu 6 tahun terakhir atau rata-rata peningkatan pertahun sebesar 9,66 %. Sedangkan pertumbuhan rata-rata daya listrik terpasang di Kabupaten/kota selama tahun 1995-2001 adalah 8,18 % pertahun.

Kota Semarang merupakan daerah yang membutuhkan energi listrik terbesar, dimana secara rata-rata selama tahun 1995 - 2001 sebesar 582.005,3 KVA daya listrik terpasang, sedangkan terbesar berikutnya adalah Kota Surakarta (186.341,4 KVA), Kendal (164.984 KVA) dan Cilacap (162.442 KVA). Keempat daerah tersebut merupakan daerah dengan tingkat PDRB perkapitanya relatif lebih tinggi dan sektor industri telah tumbuh, sehingga sektor industri dan sektor rumah tangga membutuhkan tenaga listrik dalam jumlah cukup besar. Sedangkan

Daerah terendah dalam penggunaan listrik adalah Kabupaten Rembang (35.463.6 KVA). Kabupaten Rembang merupakan daerah yang tergolong daerah kurang berkembang, dan sektor industri bukanlah merupakan sektor yang dominan (sektor dominan adalah pertanian), sehingga kebutuhan masyarakat akan energi listrik relatif kecil

Pertumbuhan penggunaan listrik dilihat dari pertumbuhan daya listrik terpasang menurut Kabupaten/kota di Jawa Tengah selama Tahun 1995 – 2001 secara-rata-rata adalah 8,18 % pertahun. Pertumbuhan rata-rata penggunaan daya listrik tertinggi adalah Kabupaten Grobogan yaitu mencapai 32,65 % pertahun, disusul Cilacap 30,67 % / tahun, Jepara (27,65 %/tahun), dan Banjarnegara 23,48 % /tahun. Sedangkan daerah yang mengalami pertumbuhan terendah adalah Kabupaten Semarang (4,15 % pertahun).

Tabel 4.10

**Besar Rata-rata, Distribusi dan Pertumbuhan Daya Listrik Tersambung  
Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 1995-2001**

No	Kabupaten/kota	Rata-rata Daya Listrik Tersambung (KVA)	Distribusi (%)	Rata rata Pertumbuhan (%)
1	Cilacap	162,442.4	4.72	30.67
2	Banyumas	120,722.6	3.50	13.03
3	Purbalingga	46,596.8	1.35	21.35
4	Banjarnegara	36,092.8	1.05	23.48
5	Kebumen	73,065.5	2.12	15.57
6	Purworejo	61,221.6	1.78	15.66
7	Wonosobo	48,440.6	1.41	14.40
8	Magelang	51,954.9	1.51	10.25
9	Boyolali	53,187.4	1.54	11.19
10	Klaten	130,467.8	3.79	8.84
11	Sukoharjo	117,398.9	3.41	8.36
12	Wonogiri	76,883.2	2.23	14.05
13	Karanganyar	125,878.7	3.65	9.61
14	Sragen	108,042.2	3.14	11.33
15	Grobogan	98,998.5	2.87	32.65
16	Biora	62,102.3	1.80	12.76
17	Rembang	35,463.6	1.03	13.67
18	Pati	97,797.5	2.84	13.97
19	Kudus	118,632.1	3.44	9.04
20	Jepara	70,435.0	2.04	27.65
21	Demak	55,637.5	1.62	10.71
22	Semarang	116,044.5	3.37	4.15
23	Temanggung	59,247.9	1.72	9.99
24	Kendal	164,984.0	4.79	20.49
25	Batang	42,946.7	1.25	23.07
26	Pekalongan	52,650.0	1.53	12.43
27	Pemalang	80,860.6	2.35	8.24
28	Tegal	58,514.0	1.70	13.10
29	Brebes	82,977.9	2.41	16.96
30	Kota Magelang	74,939.7	2.18	7.92
31	Kota Surakarta	186,341.4	5.41	8.25
32	Kota Salatiga	66,723.8	1.94	12.36
33	Kota Semarang	582,005.3	16.90	4.32
34	Kota Pekalongan	49,347.9	1.43	17.90
35	Kota Tegal	75,451.3	2.19	7.35
	Jawa Tengah	3,444,497	100.00	8.18

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka Data yang diolah

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam bab ini membahas mengenai hasil perhitungan model regresi berganda, termasuk di dalamnya adalah uji asumsi klasik dan uji statistik. Penggunaan model regresi berganda dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB kabupaten/kota, yaitu jumlah angkatan kerja, investasi swasta, investasi pemerintah daerah, sarana angkutan dan energi listrik. Pada masa penelitian, yaitu dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2001 terdapat masalah ekonomi yang luar biasa, yaitu terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 sehingga untuk memberikan gambaran yang lebih realistis diantisipasi dengan pemberian variabel dummy (D1), di mana obyek pengamatan setelah tahun 1997 diberikan nilai 1 (tahun 1998, 1999, 2000 dan 2001) dan obyek pengamatan lainnya diberikan nilai 0. Untuk membantu pengolahan data digunakan alat bantu paket program E-views 3,0.

#### 5.1. Hasil Pengujian Regresi

Model awal dari penelitian empiris yang digunakan adalah model pertumbuhan makroekonomi dari Skinner, namun karena hasil yang diperoleh memberikan hasil yang kurang memuaskan dimana variabel laju pertumbuhan angkatan kerja, investasi swasta, pengeluaran konsumsi pemerintah dan pajak memberikan nilai koefisien parsial yang berlawanan arah dengan landasan teori, sehingga dicoba dengan menggunakan model yang lain, yakni model

pertumbuhan ekonomi neoklasik dengan menggunakan pendekatan fungsi produksi Cobb Douglas. Penghilangan variabel nilai investasi yang berasal dari PMA dikarenakan bahwa data yang ada dalam bentuk dolar Amerika (US\$), sehingga harus dikonversikan dengan nilai rupiah pada tahun tersebut agar dapat digabungkan dengan data realisasi PMDN. Dari hasil perhitungan ternyata memberikan hasil yang kurang memuaskan karena nilai koefisiennya negatif (berlawanan dengan teori), sehingga dispesifikan variabel yang baru yaitu dengan menggabungkan variabel nilai realisasi PMDN dan investasi swasta non fasilitas pada subsektor industri kecil dan menengah menjadi variabel baru yaitu investasi swasta. Penggabungan variabel PMDN dengan investasi swasta nasional non fasilitas pada industri kecil dan menengah juga didasari alasan karena realisasi PMDN tidak tiap daerah kabupaten/kota dalam setiap tahunnya ada, sehingga untuk menghindari kehilangan jumlah obyek penelitian (N). Demikian juga dengan variabel pajak daerah dihilangkan karena nilai koefisiennya positif (berlawanan dengan teori seharusnya negatif). Penghilangan variabel pengeluaran konsumsi pemerintah disebabkan menimbulkan adanya multikolinieritas pada variabel independen. (lihat lampiran 13.a. uji multikolinieritas) Hasil akhir dari model tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Log Y} = \beta_0 a + \beta_1 \log L + \beta_2 \log IS + \beta_3 \log IG + \beta_4 \log SA + \beta_5 \log EL \\ + \beta_6 D1 + v \dots\dots\dots (49)$$

Keterangan :

Y	:	PDRB Kabupaten/kota atas dasar harga konstan 1993
L	:	Angkatan kerja (orang)
IS	:	Investasi swasta (juta rupiah)
IG	:	Investasi Pemerintah Daerah (juta rupiah)
EL	:	Sumber Energi listrik (KVA)
SA	:	Sarana angkutan (Unit)
D1	:	Variabel dummy untuk membedakan kondisi sebelum dan sesudah krisis ekonomi tahun 1997, sesudah = 1 lainnya = 0

Pengujian model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini sangat menentukan hasil analisis berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Namun demikian sebelum melakukan uji terhadap model regresi berganda yang ada, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sehingga hasil model regresi yang diharapkan akan benar-benar sebagai suatu model regresi yang baik dan efisien.

### 5.1.1. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi ada tidaknya penyakit yang terdapat dalam model regresi yang digunakan seperti multikolinieritas, heteroskedastisitas dan outokorelasi, dan linieritas. Apabila ada penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut, maka hasil uji t dan uji F yang dilakukan menjadi tidak valid dan secara statistik dapat mengacaukan kesimpulan yang diperoleh.

**5.1.1.1 Uji Multikolinieritas** Multikolinieritas adalah adanya hubungan eksaklinier antar variabel penjelas. Multikolinieritas diduga terjadi bila nilai *adjs*

$R^2$  tinggi tetapi nilai semua atau sebagian besar variabel penjelas tidak signifikan dan nilai F-hitung tinggi. Pengujian terhadap ada tidaknya multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan cara regresi parsial, yaitu membandingkan nilai *adjs R<sup>2</sup>* dari model regresi awal atau utama dengan *adjs R<sup>2</sup>* model *auxiliary regression* antar variabel penjelas. Apabila nilai *adjs R<sup>2</sup>* dari model regresi awal atau utama lebih tinggi dari *adjs R<sup>2</sup>* model *auxiliary regression* antar variabel penjelas maka tidak terdapat multikolinieritas.

Dari hasil pengujian ternyata memperlihatkan nilai  $R^2$  dari model regresi awal atau utama (0.770645) lebih tinggi dari nilai  $R^2$  model *auxiliary regression* antar variabel penjelas seperti terlihat pada tabel 5.1. Dengan demikian dalam model penelitian tidak terdapat multikolinieritas antara variabel penjelas.

**Tabel 5.1**

**Perbandingan Nilai  $R^2$  dari model regresi awal atau utama dengan  $R^2$  model *auxiliary regression* antar variabel penjelas**

No	Model Regresi	Nilai Adj $R^2$
1	<b>Model Regresi Awal</b> $L_Y = f\{L_L, L_{IS}, L_{IG}, L_{EL}, L_{SA}, D1\}$	0.770645
2	$L_L = f\{L_{IS}, L_{IG}, L_{EL}, L_{SA}, D1\}$	0.321102
3	$L_{IS} = f\{L_L, L_{IG}, L_{EL}, L_{SA}, D1\}$	0.338563
4	$L_{IG} = f\{L_L, L_{IS}, L_{EL}, L_{SA}, D1\}$	0.402345
5	$L_{EL} = f\{L_L, L_{IS}, L_{IG}, L_{SA}, D1\}$	0.642958
6	$L_{SA} = f\{L_L, L_{IS}, L_{IG}, L_{EL}, D1\}$	0.594548
7	$D1 = f\{L_L, L_{IS}, L_{IG}, L_{EL}, L_{SA}\}$	0.122011

Sumber : Data yang diolah

**5.1.1.2. Uji Heteroskedastisitas.** Penyimpangan terhadap asumsi homoskedastisitas disebut dengan heteroskedastisitas. Hal ini terjadi bila distribusi probabilitas tidak sama dalam semua observasi dan varian setiap residual tidak sama untuk semua nilai variabel penjelas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *White Heteroskedasticity*. Pada pengujian ini apabila nilai probabilitas dari  $obs * R\text{-square statistic}$  lebih kecil dari nilai  $\alpha$  ( $\alpha$ ) yang ditentukan, maka hipotesis  $H_0$  : Homoskedastisitas ditolak dengan kata lain terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini nilai  $\alpha$  ( $\alpha$ ) yang ditentukan adalah sebesar 5 %. Hasil pengujian *White Heteroskedasticity* menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya ternyata lebih besar dari 5 %, yaitu 30,82 % (0.308220), sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  : homoskedastisitas tidak dapat ditolak dengan kata lain tidak terjadi penyimpangan heteroskedastisitas.

**5.1.1.3 Uji Autokorelasi.** Autokorelasi terjadi bila nilai gangguan dalam periode tertentu berhubungan dengan nilai gangguan sebelumnya. Pengujian ada tidaknya autokorelasi digunakan dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW-test) *Breusch-Godfrey test*. Berdasarkan tabel statistik d-Durbin Watson pada taraf signifikansi  $\alpha = 5\%$  dengan  $n = 245$ ,  $k = 6$  diketahui bahwa  $d_l = 1,707$  dan  $d_u = 1,831$ . Hasil perhitungan DW sebesar 2.034729, hal ini berarti berada pada daerah bebas autokorelasi. Demikian juga dengan hasil *Breusch-Godfrey test* dimana probabilitas dari  $obs * R\text{-squared}$  sebesar 0.208983 (20,9 %) di mana lebih besar

dari nilai alpha 5 %, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi (Secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 33).

**5.1.1.4. Uji Linieritas.** Uji linieritas penting karena berguna untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak, dalam arti apakah fungsi yang digunakan dalam studi empiris benar dalam bentuk linier. Dalam penelitian ini pengujian linieritas yang digunakan adalah uji Ramsey (*Ramsey RESET Test*). Uji ini bertujuan untuk menghasilkan nilai F-hitung,, kemudian dibandingkan dengan F-tabel. Jika  $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ , maka hipotesa nol ( $H_0$ ) : bahwa spesifikasi model yang digunakan dalam bentuk fungsi linier adalah ditolak. Berdasarkan hasil uji Ramsey di peroleh nilai F-hitung sebesar 3.148554 sedangkan F-tabel (6,245); pada  $\alpha = 0,05$  adalah 2,14. Nilai Probabilitas F test sebesar 0.077278 atau lebih besar dari 5 % (0,05), sehingga  $H_0$ : spesifikasi model dalam bentuk linier adalah ditolak, dengan demikian persamaan yang tepat spesifikasinya adalah persamaan mula-mula

### 5.1.2. Pengujian Statistik

Uji statistik dari model regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : uji signifikansi parameter secara bersama (uji statistik F), dan uji parameter secara individual (uji statistik t) .

**5.1.2.1 Uji Statistik F.** Uji statistik F merupakan uji ketepatan model yang biasa kita kenal dengan *goodness of fit* dibawah hipotesa  $H_0$  : semua parameter yang diduga adalah nol. Nilai F yang besar lebih baik dibandingkan dengan nilai F

hitung yang rendah. Sedangkan nilai prob. F merupakan tingkat signifikansi marginal dari uji-F. Dengan nilai probabilitas F, maka dapat dilakukan penolakan hipotesa  $H_0$  jika nilai prob F kurang dari nilai alpha ( $\alpha$ ). Nilai alpha ( $\alpha$ ) yang digunakan adalah 5 %. Dari hasil perhitungan seperti terlihat pada tabel 5.2. terlihat bahwa nilai probabilitas F-statistik adalah 0,0000 yang berarti jauh lebih kecil dari nilai  $\alpha$  (0,05) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel yang dijelaskan, yaitu PDRB Kabupaten/kota. Dengan melihat nilai F-statistik sebesar 137.6419 yang jauh lebih besar dari nilai F-tabel (245; 6) pada  $\alpha = 0,05$  sebesar 2,14 yang berarti  $H_0$  : ditolak.

**5.1.2.2. . Uji Statistik t.** Uji statistik t (t-test) bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen secara individual terhadap terhadap variabel dependen. Signifikansi variabel secara individual ditunjukkan dari nilai probabilitas masing-masing variabel, dan dibandingkan dengan derajat alpha ( $\alpha$ ) yang ditentukan dalam hal ini 5 % (0,05).

Dari hasil perhitungan yang dilakukan dapat diketahui bahwa variabel angkatan kerja / L\_L (nilai probabilitas 0,00), Investasi swasta /L\_IS (nilai probabilitas 0,000), listrik (nilai probabilitas 0,000), dan angkutan (nilai probabilitas 0,0001) berpengaruh sangat signifikan pada derajat  $\alpha = 5$  % terhadap PDRB Kabupaten/kota. Variabel investasi pemerintah daerah kabupaten/kota (nilai probabilitas 0.3959) tidak berpengaruh secara signifikan pada derajat alpha

sebesar 5 %. Variabel D1 (dummy untuk masa krisis tahun 1997) memiliki nilai arah negatif dan signifikan pada derajat  $\alpha = 5$  %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecuali variabel investasi pemerintah daerah, seluruh variabel penjelas tersebut secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (yang dijelaskan).

**5.1.2.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).** Nilai *R-squared* ( $R^2$ ) statistik mengukur tingkat keberhasilan model yang digunakan dalam memprediksi nilai variabel tak bebas, atau dengan kata lain, untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas tersebut secara bersama-sama dapat dilihat dari besarnya  $R^2$ . Besarnya nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0.770645 hal ini dapat diartikan bahwa 77.06 % variasi variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel penjelas (independen) di dalam model. Sedangkan sisanya sebesar 22,94 % dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya di luar model.

**5.1.2.4. Uji Chow (Chow test).** Untuk mengetahui apakah model regresi linier dari penelitian empiris kedua kondisi sebelum dan sesudah terjadinya krisis adalah sama. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai *residual sum squared* (RSS) persamaan periode sebelum krisis (S1) sebesar 8.623998, S2 sebesar 9.054000, sehingga S3 (S1 + S2) sebesar 17.68 dan S4 sebesar 20.36542 sehingga S5 (S4-S3) sebesar 2.69 jumlah observasi sebelum krisis (N1) adalah 105 dan sesudah krisis adalah 140. Sehingga dapat dihitung besarnya nilai F-hitung sebesar 7.144974 ( $F_{tabel} = 2,14$ ). Karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka

dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien (beta) dari variabel independen yang mempengaruhi PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk periode sebelum dan sesudah masa krisis adalah berbeda. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sama antara kondisi sebelum dan sesudah krisis.

## 5.2 Pembahasan

Beberapa pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, ternyata menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan sudah baik, terbebas dari penyakit asumsi klasik. Dari variabel bebas yang digunakan ternyata variabel angkatan kerja, investasi swasta, sarana angkutan dan fasilitas listrik, signifikan pada derajat  $\alpha = 5\%$ , sedangkan variabel investasi pemerintah memberikan hasil tidak signifikan dan variabel dummy signifikan dengan arah negatif.

Berdasarkan Tabel 5.2, maka dapat dijelaskan bahwa hasil persamaan regresi dengan menggunakan variabel dummy ternyata pengaruh angkatan kerja terhadap output daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah signifikan dan berarah positif dengan elastisitas angkatan kerja sebesar 0.397302. Nilai ini berarti bahwa apabila angkatan kerja dalam jumlah jiwa/orang di Kabupaten/kota di Jawa Tengah meningkat 1 persen, maka akan meningkatkan PDRB Kabupaten/kota di Jawa Tengah sebesar 0.397302 persen. Pada periode sebelum krisis elastisitas angkatan kerja sebesar 0,45, sedangkan periode sesudah krisis elastisitas angkatan kerja sebesar 0.314. Hal ini berarti bahwa terjadi penurunan nilai elastisitas angkatan kerja.

Tabel 5.2.  
Hasil Perhitungan Model Regresi Hasil Penelitian

Variabel	Koefisien	t-hitung	Probabilitas	Signifikansi
<b>Hasil Persamaan Regresi Dengan Memasukkan Variabel Dummy (D1)</b>				
C	1.697440	3.563803	0.0004	***
L L	0.397302	11.41540	0.0000	***
L IS	0.104260	4.748808	0.0000	***
L IG	0.031734	0.850574	0.3959	
L SA	0.201253	4.039281	0.0001	***
L EL	0.352188	6.890353	0.0000	***
D1	-0.186718	-4.802133	0.0000	***
Adjst R <sup>2</sup> = 0.77064	F <sub>hit</sub> = 137.6419		DW = 2.03472	
<b>Hasil Persamaan Regresi Periode Sebelum Krisis (untuk uji chow)</b>				
C	1.711602	2.267637	0.0255	**
L L	0.450194	7.842541	0.0000	***
L IS	0.073849	2.562899	0.0119	**
L IG	0.013235	0.181761	0.8561	
L SA	0.238130	2.823152	0.0057	***
L EL	0.306803	3.793393	0.0003	***
Adjst R <sup>2</sup> = 0.75155	F <sub>hit</sub> = 63.92047		DW = 2.000723	RSS = 8.623998
<b>Hasil Persamaan Regresi Periode Sesudah Krisis (untuk uji chow)</b>				
C	1.514448	2.498454	0.0137	**
L L	0.313740	6.912714	0.0000	***
L IS	0.200559	5.420659	0.0000	***
L IG	0.023077	0.551098	0.5825	
L SA	0.140024	2.292477	0.0234	**
L EL	0.409501	6.330210	0.0000	***
Adjst R <sup>2</sup> = 0.79813	F <sub>hit</sub> = 110.9178		DW = 1.95926	RSS = 9.05400
<b>Hasil Persamaan Regresi Keseluruhan (untuk uji chow)</b>				
C	2.090882	4.263825	0.0000	***
L L	0.407612	11.22726	0.0000	***
L IS	0.104179	4.540191	0.0000	***
L IG	-0.004595	-0.120333	0.9043	
L SA	0.250374	4.912814	0.0000	***
L EL	0.291866	5.636463	0.0000	***
Adjst R <sup>2</sup> = 0.74947	F <sub>hit</sub> = 146.9905		DW = 1.94088	RSS = 20.36542

Sumber : Data yang diolah

Keterangan :

\*\*\* = signifikan pada derajat alpha = 0,01

\*\* = signifikan pada derajat alpha = 0,05

Semakin menurunnya elastisitas angkatan kerja ini memberi arti bahwa semakin menurunnya produktifitas angkatan kerja. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : sebagai dampak dari krisis ekonomi maka menyebabkan kemampuan daya beli masyarakat relatif tetap bahkan cenderung menurun. Kondisi ini ditunjukkan dengan menurunnya permintaan atas barang/jasa yang diproduksi. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung untuk mempertahankan kapasitas produksi atau bahkan menurunkannya. Untuk menjaga tingkat keuntungan yang diperoleh maka idealnya perusahaan dapat mengurangi jumlah tenaga kerja agar efisiensi usaha dapat dipertahankan. Namun pada sisi yang lain, bersamaan dengan krisis ekonomi juga muncul era reformasi yang menyebabkan kemampuan tawar dari federasi buruh/pekerja terhadap perusahaan semakin kuat. Hal ini menyebabkan pengusaha tidak dengan mudah mengambil kebijakan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja. Sebagai solusi tengahnya pengusaha melakukan pengurangan jam kerja. Sebagai contoh dengan melakukan penggiliran hari masuk kerja (seminggu hanya bekerja selama 3 hari dari 6 hari kerja yang ada), dan hal ini menyebabkan menurunnya produktifitas angkatan kerja.

Menurunnya produktifitas angkatan kerja juga dapat disebabkan karena kondisi kelebihan tenaga kerja sebagai akibat dari semakin sempitnya lapangan usaha atau tidak seimbanginya peningkatan lapangan kerja dengan peningkatan angkatan kerja baru. Sebagai akibatnya suatu kegiatan ekonomi yang seharusnya

dapat dilaksanakan oleh satu orang harus dikerjakan lebih dari satu orang, sehingga produktifitasnya menurun.

Nilai elastisitas tenaga kerja sesudah krisis sebesar 0,314 berarti bahwa apabila angkatan kerja dalam jumlah jiwa/orang di Kabupaten/kota di Jawa Tengah meningkat 1 persen, maka akan meningkatkan PDRB Kabupaten/kota di Jawa Tengah sebesar 0.314 persen.

Hasil pengaruh positif angkatan kerja terhadap produk domestik regional bruto sebagai gambaran dari total output suatu daerah yang pada akhirnya akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, bahwa pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor, di mana salah satunya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Dalam penelitian empiris sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Kim, Sung Tai (1997) di Korea bahwa laju pertumbuhan angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Korea Selatan. Di Jawa Tengah seperti yang dilaporkan oleh Arief Hadiono((2001) dan Sofwin Hardiati (2002) bahwa laju pertumbuhan angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan output (PDRB).

Pada Kabupaten/kota di Jawa Tengah sektor-sektor yang dominan dalam pembentukan PDRB adalah sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan jasa. Sektor- sektor ini secara umum bersifat padat karya dan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya, bahwa sektor pertanian pada tahun 2001 mampu menyerap

44,67 % angkatan kerja, sedangkan sektor industri (16, 24 %), perdagangan (18,76 %) dan Jasa (10,38). Dengan demikian pengaruh angkatan kerja dalam pembentukan PDRB Kabupaten /kota di Jawa Tengah menjadi sangat besar. Oleh sebab itu sudah sewajarnya apabila pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Tengah memperhatikan masalah ketenaga kerjaan agar kualitas tenaga kerja yang ada menjadi lebih baik, dan memberikan dorongan pengembangan sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Adanya kecenderungan menurunnya elastisitas tenaga kerja juga dapat menjadi beban yang lebih berat bagi pemerintah daerah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih besar dimasa yang akan datang. Peningkatan lapangan kerja ternyata tidak sebanding dengan penambahan penduduk yang memasuki angkatan kerja baru. Oleh karena itu perlu diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja yang seluas luasnya bagi masyarakat.

Investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap output daerah (PDRB) Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian empiris yang dilakukan diketahui dengan variabel dummy diketahui bahwa elastisitas investasi swasta sebesar 0.1. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap penambahan 1 persen unit investasi swasta (juta rupiah) akan mengakibatkan peningkatan output daerah (PDRB) Kabupaten/kota di Jawa Tengah sebesar 0,1 persen unit ( juta rupiah). Pada periode sebelum krisis elastisitas investasi swasta sebesar 0.07, sedangkan sesudah krisis sebesar 0.2 atau elastisitas investasi swasta semakin besar. Pada

kondisi sesudah krisis persaingan antar kegiatan ekonomi semakin ketat, sehingga diperlukan efisiensi usaha dan peningkatan kualitas produk. Hal ini mendorong kegiatan ekonomi mengarah pada perbaikan teknologi produksi yang memerlukan tambahan investasi yang lebih besar. Pada sisi lainnya dengan era otonomi daerah, maka semua daerah berupaya untuk mencari investor baru guna mau untuk menanamkan modal di daerahnya. Hal ini menyebabkan semakin ketatnya persaingan untuk mencari tambahan investasi baru dari swasta. Dengan semakin langkanya investasi swasta maka kepekaan adanya investasi swasta terhadap pembentukan PDRB menjadi semakin elastis. Nilai elastisitas investasi swasta sesudah krisis sebesar 0,2 berarti bahwa apabila investasi swasta dalam juta rupiah di Kabupaten/kota di Jawa Tengah meningkat 1 persen, maka akan meningkatkan PDRB Kabupaten/kota di Jawa Tengah sebesar 0.2 persen. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian empiris yang telah dilakukan sebelumnya oleh Kim, Sung Tai (1997) di Korea; Toshihiko Kawagooe (1997) dan Neni Pancawati (2000) di Indonesia.

Investasi swasta terbukti berpengaruh terhadap pembentukan PDRB Kabupaten / kota di Jawa Tengah, hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan adanya investasi swasta maka pengelolaan atau perusahaan sumberdaya yang ada di daerah akan lebih besar. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memberikan perhatian terhadap minat investasi swasta. Investasi swasta di Kabupaten/kota di Jawa Tengah tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah sendiri, namun juga berasal dari luar Jawa Tengah, oleh karena itu pemerintah daerah

Kabupaten/kota perlu memberikan fasilitas dan menciptakan lingkungan usaha yang baik agar mampu mendorong investor mau menanamkan modalnya. Dalam era otonomi daerah dimana "persaingan" antar Kabupaten/kota dalam mengembangkan perekonomian daerahnya, maka pemerintah daerah dituntut mampu untuk mengidentifikasi dan mempromosikan potensi sumberdaya yang dimiliki agar mampu lebih menarik investor swasta di daerah. Untuk menciptakan daerah agar mampu bersaing dalam menarik investor, maka perlu ditunjang kelayakan fasilitas/ prasarana penunjang kelancaran usaha seperti sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

Investasi dengan fasilitas PMDN pada Kabupaten/kota di Jawa Tengah dari sisi jumlah perusahaannya lebih sedikit dibandingkan dengan investasi swasta yang non fasilitas, namun dari sisi besarnya investasi relatif lebih besar. Investasi dengan fasilitas PMDN penyebarannya juga belum merata. Sedangkan investasi pada sektor industri kecil dan menengah dari sisi jumlah investasi relatif lebih kecil, namun mampu berkembang secara merata di seluruh daerah. Hubungan yang sinergi dari kedua jenis investasi ini ternyata mampu berpengaruh terhadap peningkatan PDRB Kabupaten /kota di Jawa Tengah.

Investasi pemerintah daerah Kabupaten/kota di Jawa Tengah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan output daerah (PDRB kabupaten/kota) di Jawa Tengah, dimana elastisitasnya sebesar 0.03. Berdasarkan nilai tersebut dapat diartikan bahwa setiap penambahan 1 persen unit investasi pemerintah daerah (juta rupiah) akan memberikan dampak peningkatan

output daerah ( PDRB Kabupaten/kota ) di Jawa Tengah sebesar 0.03 %. Nilai elastisitas investasi pemerintah daerah sebelum krisis sebesar 0.01 dan sesudah krisis sebesar 0,02 atau mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran pembangunan pemerintah daerah pada periode sesudah krisis telah mengalami perbaikan. Peningkatan elastisitas investasi pemerintah daerah ini juga dapat disebabkan karena semakin terbatasnya anggaran pembangunan yang dimiliki daerah yang dilihat dari prosentase terhadap APBD keseluruhan semakin kecil. Keterbatasan ini menyebabkan dilakukannya penajaman pada skala prioritas pembangunan. Pada periode sesudah krisis elastisitas investasi pemerintah daerah sebesar 0.02. Nilai ini berarti bahwa apabila investasi pemerintah daerah dalam jumlah juta rupiah di Kabupaten/kota di Jawa Tengah meningkat 1 persen, maka akan meningkatkan PDRB Kabupaten / kota di Jawa Tengah sebesar 0.02 persen

Dengan melihat realitas potensi ekonomi masing masing daerah khususnya daerah berkembang dan daerah kurang dimana potensi ekonominya (dilihat dari struktur ekonomi dan nilai LQ-nya) secara umum adalah pertanian dan industri, namun alokasi anggaran pembangunan pada sektor tersebut ternyata relatif kecil yakni rata-rata kurang dari 5 %. Dengan melihat Lampiran 17, dapat diketahui bahwa alokasi anggaran untuk sektor industri pada daerah berkembang 1,34 % dari total anggaran, dan untuk daerah kurang berkembang hanya 0,84 %. Alokasi anggaran pada sektor pertanian 3.6 % untuk daerah berkembang dan 4,26 % untuk daerah kurang berkembang. Alokasi anggaran pembangunan daerah

Kabupaten/kota banyak terserap pada sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, pembangunan daerah dan permukiman serta sektor aparatur pemerintah dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan yang diambil pemerintah daerah lebih cenderung untuk memfokuskan pada upaya pelayanan pada masyarakat melalui peningkatan kinerja aparatur, penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan bagi masyarakat, pemerataan hasil pembangunan secara lebih luas dan penyediaan infra struktur (transportasi) yang lebih berdampak pada pembangunan jangka panjang namun pengaruh secara langsung terhadap output jangka pendek belum nampak.

Terbaiknya potensi daerah dalam pengalokasian anggaran pembangunan daerah hal ini juga disebabkan keterbatasan daerah dalam penerimaan anggaran, sehingga anggaran yang ada banyak digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumsi pemerintah daerah (belanja rutin). Hal ini dapat terlihat dari perbandingan antara anggaran belanja pembangunan dengan total APBD Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2000 dan 2001. Apabila diperhatikan perbandingan antara pengeluaran pembangunan pemerintah daerah Kabupaten/kota terhadap jumlah APBD-nya pada tahun 2000 dan 2001 dimana secara rata-rata pada tahun 2000 sebesar 20,02 % dan tahun 2001 sebesar 19,03 %, hal ini memberikan bukti bahwa anggaran pemerintah daerah sebagian besar (sekitar 80 %) digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Dengan keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, maka menyebabkan prioritas pembangunan

lebih diarahkan pada upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan dan sektor-sektor lain yang dianggap lebih strategis.

Dampak investasi pemerintah daerah di Jawa Tengah terhadap output daerah relatif kecil, hal ini disebabkan karena secara umum pengalokasian anggaran dalam pengeluaran pembangunan daerah cenderung ke arah pemerataan pembangunan, bukan pada pertumbuhan output daerah.

Terbaikannya potensi daerah pada sektor pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan jasa juga disebabkan karena faktor kelembagaan yang ada di daerah. Pada masa sebelum diberlakukannya otonomi daerah Instansi pemerintah yang menangani /mengampu sektor tersebut (pertanian tanaman pangan, perkebunan, industri) merupakan instansi vertikal pemerintah propinsi yang ada di daerah. Hal ini berarti secara struktural tidak bertanggung jawab secara langsung kepada kepala daerah setempat (Bupati/Walikota), dan anggaran APBD Kabupaten/kota tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh institusi tersebut, namun harus melalui institusi daerah (Bappeda atau Bagian pada Setda Kabupaten/kota). Kondisi menyebabkan kemampuan untuk mendapatkan anggaran yang berasal dari pemerintah daerah Kabupaten/kota lebih lemah dan pada akhirnya menyebabkan terbaiknya pengalokasian anggaran pada sektor sektor unggulan. Masalah ketenagakerjaan juga belum mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah yang dicerminkan dengan relatif kecilnya alokasi anggaran pembangunan dalam APBD. Penanganan masalah ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota diserahkan pada pemerintah yang lebih tinggi baik

propinsi maupun pemerintah pusat melalui lembaga vertikal di daerah (Cabang dinas dan Kandeap Tenaga Kerja).

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Toshihiko Kawagooe (1997) bahwa pengeluaran pembangunan pemerintah di Indonesia lebih berdampak pada kesejahteraan, bukan pertumbuhan. Menurut Sjafrizal, (1997). Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah bersangkutan. Lebih lanjut dikatakan oleh Nasyith Majidi, (1997), bahwa penyusunan anggaran pembangunan, pemerintah sering kurang menggunakan pertimbangan strategis sehingga alokasi anggaran daerah, benar-benar ekonomis, efisien dan membantu mengurangi kesenjangan regional.

Sarana angkutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap output daerah (PDRB Kabupaten/kota) di Jawa Tengah. Dari hasil persamaan regresi dengan memasukkan variabel dummy diperoleh hasil elastisitas sarana angkutan sebesar 0.2. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan 1 persen unit sarana angkutan akan mampu menyebabkan peningkatan output daerah sebesar 0.2 persen. Elastisitas sarana angkutan sebelum krisis sebesar 0,24 dan sesudah krisis sebesar 0,14 atau mengalami penurunan. Penurunan elastisitas sarana angkutan ini disebabkan karena merosotnya kualitas sarana angkutan yang ada sebagai akibatnya semakin mahalnya biaya perawatan sarana angkutan akibat dari krisis ekonomi. Walaupun dari sisi jumlah sarana angkutan yang ada besar,

kualitasnya mengalami penurunan. Dengan merosotnya kualitas sarana angkutan maka menyebabkan produktifitas sarana angkutan menjadi lebih rendah, dan pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya pengaruh sarana angkutan terhadap pembentukan PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah pada masa sesudah krisis. Menurunnya produktifitas sarana angkutan ini juga dapat disebabkan karena lebih lambatnya peningkatan mobilitas manusia dan barang dibandingkan dengan peningkatan sarana angkutan yang ada.

Pada periode sesudah krisis elastisitas sarana angkutan sebesar 0.14, Nilai ini berarti bahwa apabila sarana angkutan dalam jumlah unit kendaraan di Kabupaten/kota di Jawa Tengah meningkat 1 persen, maka akan meningkatkan PDRB Kabupaten/kota di Jawa Tengah sebesar 0.14 persen.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Arief Hadiono (2001) bahwa sarana angkutan umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan output daerah di Jawa Tengah.

Pengaruh sarana angkutan terhadap PDRB Kabupaten/kota di Jawa Tengah, hal ini berkaitan dengan mobilitas penduduk dalam melakukan aktifitas ekonomi dan distribusi barang /komoditi hasil aktifitas ekonomi antar Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sarana angkutan merupakan fasilitas yang mendukung mobilitas barang dan orang dari suatu daerah, sehingga komoditas yang dihasilkan dari suatu daerah mudah dipertukarkan dengan daerah lain. Dengan semakin meningkatnya sarana angkutan maka akan mendorong semakin

meningkatnya nilai ekonomis komoditas yang dimiliki daerah tersebut, dan aktifitas ekonomi masyarakat setempat.

Pada Tahun 1998, 1999 dan 2001 secara rata-rata di Jawa Tengah terjadi penurunan jumlah sarana angkutan sebesar  $-1,39\%$ ,  $-2,68\%$  dan  $-0,22\%$ . Penurunan ini secara tidak langsung menyebabkan penurunan PDRB Kabupaten / Kota, namun karena faktor lain yang mampu mendorong pertumbuhan PDRB Kabupaten/kota lainnya mengalami kenaikan pada tahun 1999 dan 2001, maka PDRB Kabupaten/kota masih dapat tumbuh walaupun tidak begitu besar.

Fasilitas dasar listrik dalam hal ini diproksikan dengan daya listrik tersambung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan output daerah (kabupaten/kota) di Jawa Tengah. Dari hasil perhitungan dengan persamaan regresi dengan memasukkan variabel dummy diketahui bahwa, elastisitas sebesar 0.35. Hal ini dapat diartikan bahwa dapat diartikan bahwa setiap peningkatan 1 persen unit daya listrik tersambung (Kilo Volt Ampere/KVA) akan mampu menyebabkan peningkatan output daerah sebesar 0,35 persen. Elastisitas energi listrik sebelum krisis sebesar 0,31 dan sesudah krisis sebesar 0,41 atau mengalami peningkatan elastisitasnya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kegiatan ekonomi yang ada di Jawa Tengah pada periode sesudah krisis cenderung melakukan perbaikan kualitas dan penekanan biaya produksi agar produksinya dapat bersaing. Keadaan ini mendorong upaya elektrifikasi sarana produksi yang akhirnya akan menyebabkan meningkatnya

daya listrik, dan semakin besarnya peranan energi listrik dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Semakin meningkatnya harga listrik secara berkala, menyebabkan semakin mahalnya harga listrik persatuan KVA. Kondisi ini mendorong kegiatan produktif yang ada di masyarakat untuk semakin menghemat penggunaan listrik. Dengan semakin tingginya kehati-hatian dalam penggunaan listrik, maka menyebabkan setiap penambahan daya listrik diharapkan akan memberikan hasil yang optimal, dan pada akhirnya akan menyebabkan meningkatnya elastisitas energi listrik sebagai dampak meningkatnya produktifitas dalam penggunaan listrik. Pada periode sesudah krisis elastisitas energi listrik sebesar 0,41. Nilai ini berarti bahwa apabila energi listrik (daya listrik tersambung) dalam jumlah KVA di Kabupaten/kota di Jawa Tengah meningkat 1 persen, maka akan meningkatkan PDRB Kabupaten/kota di Jawa Tengah sebesar 0.41 persen

Energi listrik berpengaruh bagi PDRB Kabupaten/kota hal ini berkaitan dengan dukungan energi listrik terhadap aktifitas ekonomi masyarakat, dimana dengan energi listrik maka akan menyebabkan aktifitas ekonomi lebih produktif, ekonomis, praktis dan hasilnya lebih berkualitas. Dengan energi listrik juga menyebabkan perubahan teknologi yang digunakan bagi aktifitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian perusahaan sumberdaya yang ada di daerah akan menjadi lebih besar.

Energi listrik sebagai fasilitas dasar bagi pengembangan ekonomi masyarakat daerah, memiliki peranan strategis, karena dengan adanya sumberdaya listrik yang mencukupi akan mempermudah masyarakat mengembangkan kegiatan ekonominya dan semakin menarik bagi investor bersedia mengembangkan usaha di daerah tersebut. Dengan tersedianya sumber energi listrik yang memadai maka akan mempermudah bagi sektor perusahaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan efisiensi serta outputnya, dan pada akhirnya akan meningkatkan output daerah.

Apabila diperhatikan dari penggunaan energi listrik menurut golongan pelanggan, dimana setiap pelanggan golongan industri rata-rata membutuhkan daya 221.912 KVA dan golongan usaha membutuhkan 3,218 KVA maka pemerintah dalam hal ini PT (Persero) PLN mampu memprediksi berapa kebutuhan energi listrik di Kabupaten/kota di Jawa Tengah di kemudian hari sebagai akibat tumbuhnya industri dan sektor usaha di Jawa Tengah. Hal ini disebabkan energi listrik terbukti mampu berpengaruh terhadap pembentukan PDRB Kabupaten/kota.

Kondisi krisis ekonomi pada tahun 1997 (D1) ternyata memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan output daerah (PDRB Kabupaten/kota) di Jawa Tengah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah krisis berbeda nyata, dimana krisis ekonomi mampu menyebabkan penurunan output di Jawa Tengah.

## BAB VI PENUTUP

### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi PDRB Kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah angkatan kerja, investasi swasta, jumlah sarana angkutan, dan energi listrik. Investasi pemerintah daerah tidak berpengaruh secara nyata terhadap PDRB Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Adanya krisis ekonomi pada tahun 1997 menyebabkan perbedaan yang nyata antara sebelum dan sesudah terjadinya krisis ekonomi, dan memberikan dampak yang negatif atau menyebabkan penurunan.
2. Penurunan elastisitas angkatan kerja di Jawa Tengah pada masa sesudah krisis disebabkan karena semakin menurunnya produktifitas angkatan kerja dan semakin sempitnya lapangan kerja yang tersedia. Hal ini menyebabkan pengangguran terselubung yang ada di Jawa Tengah semakin besar.
3. Elastisitas investasi swasta terhadap PDRB Kabupaten kota pada masa sesudah krisis mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan waktu sebelum krisis. Hal ini disebabkan karena dalam era otonomi daerah masing-masing daerah berupaya meningkatkan investasi swasta di daerahnya pada sisi lain akibat krisis ekonomi menyebabkan semakin langkanya modal dari sektor swasta dalam negeri.

4. Pengaruh investasi pemerintah daerah yang berasal dari APBD “Permbangunan” Kabupaten/kota di Jawa Tengah terhadap PDRB Kabupaten/kota ternyata tidak signifikan, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran pembangunannya. Hal ini ditunjukkan dengan semakin menurunnya rasio antara anggranan pembangunan terhadap APBD secara keseluruhan. Pengalokasian anggaran persektor juga belum mencerminkan atau mengabaikan potensi ekonomi daerah, hal ini disebabkan karena prioritas pembangunan lebih ditujukan pada masalah pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan peningkatan aparatur dan pengawasan
5. Elastisitas Sarana angkutan terhadap PDRB mengalami penurunan sebagai akibat adanya krisis. Hal ini disebabkan karena menurunnya produktifitas sarana angkutan yang disebabkan oleh menurunnya kualitas sarana angkutan.
6. Energi listrik menjadi semakin meningkat elastisitasnya terhadap PDRB pada masa sesudah krisis. Hal ini disebabkan pada masa sesudah krisis harga energi listrik semakin mahal, sehingga penambahan daya listrik hanya akan dilakukan bila benar benar dibutuhkan. Dengan kondisi seperti ini maka setiap penambahan daya listrik diharapkan akan memberikan penambahan hasil yang cukup besar bagi peningkatan PDRB.

## 6.2. Limitasi

Penelitian ini apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang sejenis, maka terdapat perbedaan terutama variabel yang mempengaruhi PDRB Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini

merupakan kombinasi dari beberapa penelitian sejenis dan disesuaikan dengan kondisi daerah, sehingga variabel yang digunakan meliputi angkatan kerja, investasi swasta, investasi pemerintah daerah, jumlah sarana angkutan, energi listrik dan memperhatikan kondisi sebelum dan sesudah krisis sebagai pembeda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Tri Rahayu SA (2000) adalah pada model yang digunakan, di mana model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pertumbuhan ekonomi neoklasik dengan pendekatan fungsi produksi Cobb Douglass sedangkan Tri Rahayu SA menggunakan model pertumbuhan makroekonomi yang dikembangkan oleh Skinner. Perbedaan dengan Penelitian Arief Hadiono (2001), adalah dalam variabel yang digunakan dan lama pengamatan. Penelitian ini memasukan variabel investasi swasta, energi listrik sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB Kabupaten/kota di Jawa Tengah serta karena selama waktu pengamatan (1995 – 2001) terdapat kondisi yang khusus/spesifik dimana terjadi krisis pada tahun 1997, maka diakomodasi dengan menambahkan variabel dummy, sedangkan pada penelitian Arief Hadiono variabel yang digunakan hanya investasi pemerintah daerah, tenaga kerja dan sarana angkutan umum serta data yang digunakan data tahun 1994 – 1998.

Perbedaan ini dengan penelitian Sofwin Hardiati (2002), adalah pada variabel yang digunakan dan data yang digunakan. Pada penelitian ini nilai investasi swasta merupakan penjumlahan dari investasi swasta non fasilitas pada industri kecil dan menengah dan PMDN, dan data yang dipergunakan data pooling (1995 – 2001), sedangkan penelitian Sofwin Hardiati investasi PMDN dan PMA masing masing diamati tersendiri dan tanpa memasukkan investasi non

fasilitas, serta data yang digunakan adalah data runtut waktu tahun 1980 – 2001. Tidak digunakannya variabel PMDN dan PMA sebagai variabel independen yang tersendiri karena tidak semua Kabupaten/kota dalam setiap tahun terdapat realisasi investasi PMA atau PMDN.

### 6.3. Rekomendasi Kebijakan

Untuk mendorong pertumbuhan PDRB Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang lebih baik di masa yang akan datang, maka peran pemerintah daerah sangat diperlukan terutama dikaitkan dengan kebijakan dan strategi pembangunan sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu untuk meningkatkan perhatian pada sektor-sektor basis sesuai karakteristik daerah seperti pertanian, industri, perdagangan dan jasa melalui alokasi pengeluaran pembangunannya agar dampak pembangunan bagi pertumbuhan output daerah lebih besar.
2. Penurunan produktifitas sarana angkutan sebagai akibat dari krisis ekonomi yang terjadi di Jawa Tengah perlu mendapatkan perhatian, agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah di kemudian hari. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan subsidi bagi perawatan kendaraan umum agar kualitas kelayakannya dapat terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Hadiono, 2001. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah*. Tesis S-2 MEP UGM Yogyakarta ( Tidak dipublikasikan).
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM), *Realisasi Proyek-proyek PMA/PMDN di Jawa Tengah*, Tahun 1995 – 2001.
- Badan Pusat Statistik. *Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 1996 – 2002*.
- Badan Pusat Statistik., *Pendapatan Regional Jawa Tengah*, Tahun 1995 – 2001.
- Bambang Kustianto dan Istikomah, 1999. Peranan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 14 No. 2 hlm 1- 13
- Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah. *Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten /Kota se- Jawa Tengah*. Tahun 1995 – 2001
- Brodjonegoro B and Asanuma S, 2000. Regional Autonomy and Fiscal Decentralization in Democratic Indonesia. *Hitotsubashi Journal of Economic* 41 (2000), pp 111-122.
- Cullis, John G and Philip R Jones, 1992. *Public Finance and Public Choice*. McGraw-Hill, Inc
- Davey, K.J. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah - Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Pers.,
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 1999. *Penjelasan UU No. 25/1999 : Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta, 1999.
- Edy Suandi Hamid. 1999. Peran dan Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian.. *Journal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 1999.
- Glasson, John, 1977. *Pengantar Perencanaan Regional* (diterjemahkan oleh Paul Sitohang), Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Gujarati, Damodar. 1995. *Basic Econometrics Third Edition*. McGraw-Hill, Inc.
- Gunawan Sumodiningrat, 1999. Pemantapan Program Pembangunan di Era Reformasi. *Journal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 1999.
- Gunawan Sumodiningrat. 2001. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dalam Perspektif Otonomi Daerah. Tidak dipublikasikan *Makalah pada Kuliah Tamu pada UKSW Salatiga*, pada tanggal 14 Mei 2001

- Hairul Aswandi dan Mudrajad Kuncoro, 2002. Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan : Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993 – 1999. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol 17., No,1, 2002, hlm. 27-45.
- Hyman, David N., 1996. *Public Finance*, A contemporary Application of Theory to Policy, fifth edition, The Dryden Press, USA.
- Kawagoe, Toshihiko, 1997. *Inter-regional Resource Transfer and Economic Growth in Indonesia*. Paper at the World Bank workshop May 5 – 6, 1997.
- Kim, Sung Tai. 1997. "The Role of Local Publics Sector in Regional Economic Growth in Korea" *Asian Economic Journal* 1997, Vol 11, Number 2, June pp155-168 .
- Lee, Robert D and Ronald W Johnson, 1998. *Public Budgeting Systems 6<sup>th</sup> edition*. AN Aspen Publication Gaitherberg Maryland.
- Lincoln Arsyad, 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi ketiga, Yogyakarta : Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Lincoln Arsyad, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta; BPFE.
- Majidi Nasyith, 1997. Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah. *Majalah Prisma*, 3 Maret 1997 hlm 1-16.
- McCawley, P, 1981. Pertumbuhan Sektor Industri, dalam Both, Anne dan Peter Mc Cawley., *Ekonomi Orde Baru* (alih Bahasa oleh Boediono), Jakarta; Penerbit LP3ES, hlm 79 – 127.
- Mudrajat Kuncoro, 2001 *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : Penerbit AMP YKPN-, 2001.
- Musgrave, Richard A and Peggy B Musgrave, 1998. *Public Finance in Theory and Practise 5<sup>th</sup> ed*. US of America, McGraw-Hill.
- Neni Pancawati, 2000. Pengaruh Rasio Kapital-Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Stock Kapital dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pertumbuhan GDP Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 2000, Vol 15 No. 2 hlm 179-185.
- Nicholson, Walter, 1995. *Teori Mikroekonomi Buku I*. Prinsip Dasar dan Perluasan (alih Bahasa Daniel Wirajaya), Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara.
- Nopirin. 1998. *Ekonomi Moneter. Buku II*. Yogyakarta; Penerbit BPFE UGM.
- Prasetyo Soepono, 2001. Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (Ekspor) : Posisi dan Sumbangannya Bagi Perbendaharaan Alat-alat Analisis Regional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol 16, No.1, 2001, hlm 41 - 534

- Ram, Rati. 1986. Government Size and Economic Growth : A New Framework and some rvidence from Cross Section and Time Series Data. *American Economic Review*, 76, pp 191-203
- Republik Indonesia , Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Richardson, Harry W, 1977. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional* (diterjemahkan oleh Paul Sihontang) Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sadono Sukirno, 20010 *Makroekonomi Modern. Perkembangan Pemikiran dari Kasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta : Penerbit Rajawali Pers.
- Sekretariat Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 : Undang-undang No, 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- Sekretariat Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia 1999: Undang-undang No, 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta.
- Shah, Anwar, 1998. Indonesia dan Pakistan : Desentralisasi Fiskal : Tekad atau Retorika ? dalam Bird, Richard M dan Valillancourt F. *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*. Jakarta : Penerbit Gramedi, 2000, hlm 159 - 209.
- Siti Aisyah Tri Rahayu, 2000. Peranan Sektor Publik Dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional. *Tesis* Tidak dipublikasikan.
- Sjafrizal, 1983. Teori Ekonomi Regional : Konsep dan Pengembangan. Makalah pada Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ke 9 di Cipanas, tanggal 27 – 30 Juli 1983.
- Sjafrizal, 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. *Majalah Prisma*, 3 Maret 1997 hlm 27 – 38.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 1988. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : Penerbit UPP AMP YKPN.
- Sofwin Hardiati, 2002. Analisis Pertumbuhan Propinsi Jawa Tengah. *Tesis S-2 MIESP UNDIP Semarang* (Tidak Dipublikasikan)
- Sukanto Reksohadiprodjo 2001. *Ekonomika Publik*. Edisi Pertama Yogyakarta : Penerbit BPFE.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta,; Penerbit Andi.
- Todaro, Michael P. 2001 *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* Edisi ketujuh. Jilid I dan II, Jakarta : Penerbit Erlangga,.